

**RENCANA TINDAK PRIORITAS BIDANG PEREKONOMIAN**

**BIDANG PEMBANGUNAN : PEREKONOMIAN**

**PRIORITAS : Peningkatan Investasi**

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil <i>outcomes/output</i> yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
1.	FOKUS : Peningkatan harmonisasi kebijakan dan penyederhanaan perijinan investasi	<i>Starting a business</i>	Jumlah hari untuk proses perijinan	60 hari			BKPM	253,1
a.	Peningkatan Deregulasi Kebijakan Penanaman Modal	Merealisasikan kegiatan kajian analisis kebijakan dan kegiatan sosialisasi kebijakan yang berorientasi pada peningkatan daya saing	1. Jumlah rumusan untuk rekomendasi bahan penyusunan kebijakan penanaman modal	1 rekomendasi	5 rekomendasi <sup>K)</sup>	PROGRAM PENINGKATAN DAYA SAING PENANAMAN MODAL	BKPM	92,3
			2. Jumlah rumusan kebijakan sebagai masukan bagi penyempurnaan kebijakan dan pengembangan penanaman modal yang berdaya saing	1 rumusan	5 rumusan <sup>K)</sup>			

**BIDANG PEMBANGUNAN : PEREKONOMIAN**

**PRIORITAS : Peningkatan Investasi**

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil <i>outcomes/output</i> yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
			3. Jumlah kegiatan dan peserta sosialisasi kebijakan penanaman modal	55 kegiatan (15 sosialisasi di dalam negeri, 5 sosialisasi di luar negeri, 20 fasilitasi di dalam negeri, 15 fasilitasi di luar negeri)	55 kegiatan (15 sosialisasi di dalam negeri, 5 sosialisasi di luar negeri, 20 fasilitasi di dalam negeri, 15 fasilitasi di luar negeri)			
b.	Pengembangan Potensi Penanaman Modal Daerah (prioritas bidang)	Merealisasikan kegiatan identifikasi pemetaan dan pengembangan potensi yang diarahkan bagi peningkatan penanaman modal di daerah	1. Jumlah Informasi data potensi daerah yang mutakhir yang didokumentasikan secara elektronik.  2. Jumlah kegiatan dan peserta workshop pengembangan potensi daerah dan sosialisasi Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID)  3. Jumlah hasil kajian dan pemetaan tentang potensi daerah serta pengembangan potensi wilayah investasi dan pengembangan industri.	33 Prop  <i>Workshop</i> :4 daerah 400 psrta Sosialisasi: 5 daerah 250 org	33 Prop  <i>Workshop</i> : 6 daerah 600 psrta Sosialisasi:5 daerah 500 org	PROGRAM PENINGKATAN DAYA SAING PENANAMAN MODAL	BKPM	37,1

**BIDANG PEMBANGUNAN : PEREKONOMIAN**

**PRIORITAS : Peningkatan Investasi**

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil <i>outcomes/output</i> yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
				10 peta potensi daerah (mendalam) dan 23 peta potensi daerah secara umum	10 peta potensi daerah (mendalam) dan 23 peta potensi daerah secara umum			
c.	Pemberdayaan Usaha Nasional (prioritas bidang)	Merealisasikan kegiatan fasilitasi kemitraan usaha bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam	1. Jumlah pelaksanaan Forum Komunikasi Pemberdayaan Usaha Nasional. 2. Jumlah pelaksanaan <i>Matchmaking</i> Dalam dan Luar Negeri. 3. Jumlah pelaksanaan Pelatihan Peningkatan Kemampuan Kewirausahaan UMKMK. 4. Jumlah hasil Kajian Peningkatan Partisipasi UMKM.	5 Lokasi  4 Lokasi 5 Negara 5 Lokasi 1 Set	4 Lokasi  4 Lokasi 4 Negara 6 Lokasi 5 set <sup>K)</sup>	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR BKPM	BKPM	39,4

**BIDANG PEMBANGUNAN : PEREKONOMIAN**

**PRIORITAS : Peningkatan Investasi**

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil <i>outcomes/output</i> yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
d.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Persetujuan Penanaman Modal (prioritas bidang)	Meningkatnya kualitas pelayanan penerbitan surat persetujuan penanaman modal	1. Jumlah persetujuan yang dapat diproses dalam satu satuan waktu tertentu.	100%	100%	PROGRAM PENINGKATAN DAYA SAING PENANAMAN MODAL	BKPM	25,4
			2. Jumlah partisipasi instansi sektoral dan daerah dalam pelaksanaan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).	100%	100%			
			3. Jumlah kegiatan sinkronisasi dan harmonisasi tentang tata cara pelayanan penerbitan surat persetujuan penanaman modal bagi aparatur pemerintah propinsi dan kabupaten atau kota serta dunia usaha	100%	100%			
			4. Jumlah pedoman penilaian permohonan penanaman modal	1 (satu) buah buku pedoman	5 (lima) buah <sup>K)</sup> buku pedoman			
			5. Jumlah penyelenggaraan peningkatan kapasitas teknis bagi aparatur pelaksana pelayanan penanaman modal	90%	90%			

**BIDANG PEMBANGUNAN : PEREKONOMIAN**

**PRIORITAS : Peningkatan Investasi**

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil <i>outcomes/output</i> yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
e.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan Penanaman Modal (prioritas bidang)	Meningkatnya kapasitas pelayanan perijinan penanaman modal	1. Jumlah perijinan yang dapat diproses dalam satu satuan waktu tertentu.	100%	100%	PROGRAM PENINGKATAN DAYA SAING PENANAMAN MODAL	BKPM	19,3
			2. Jumlah partisipasi instansi sektoral dan daerah dalam pelaksanaan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).	100%	100%			
			3. Jumlah kegiatan sinkronisasi dan harmonisasi tentang tata cara pelayanan perijinan penanaman modal bagi aparatur pemerintah propinsi dan kabupaten atau kota serta dunia usaha	100%	100%			
			4. Jumlah pedoman penilaian permohonan penanaman modal	1 (satu) buah buku pedoman	5 (lima) buah buku pedoman <sup>K)</sup>			
			5. Jumlah penyelenggaraan peningkatan kapasitas teknis bagi aparatur pelaksana pelayanan penanaman modal	100%	100%			
f.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal (prioritas bidang)	Meningkatnya kualitas pelayanan fasilitas penanaman modal	1. Jumlah fasilitas penanaman modal yang dapat diproses dalam satu satuan waktu tertentu.	100%	100%	PROGRAM PENINGKATAN DAYA SAING PENANAMAN MODAL	BKPM	24,0
			2. Jumlah partisipasi instansi sektoral dan daerah dalam pelaksanaan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu	100%	100%			

**BIDANG PEMBANGUNAN : PEREKONOMIAN**

**PRIORITAS : Peningkatan Investasi**

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil <i>outcomes/output</i> yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
			3. Jumlah kegiatan sinkronisasi dan harmonisasi tentang tata cara pelayanan fasilitas penanaman modal bagi aparatur pemerintah propinsi dan kabupaten atau kota serta dunia usaha	5 Provinsi	10 Provinsi			
			4. Jumlah pedoman penilaian permohonan penanaman modal	2 pedoman	11 pedoman <sup>K)</sup>			
			5. Jumlah penyelenggaraan peningkatan kapasitas teknis bagi aparatur pelaksana pelayanan penanaman modal	6 Materi	8 Materi			
			6. Tercapainya peningkatan jumlah komoditas yang dapat dijadikan acuan dalam proses penilaian	10 Bidang	54 Bidang <sup>K)</sup>			
g.	Koordinasi Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi (PEPI)	Meningkatnya Koordinasi di Bidang peningkatan Ekspor dan peningkatan Investasi	Persentase Rekomendasi hasil koordinasi kebijakan di Bidang Peningkatan Ekspor dan Investasi yang terimplementasikan	65%	85%	Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian	Kemeko Perekonomian	15,8

**BIDANG PEMBANGUNAN : PEREKONOMIAN**

**PRIORITAS : Peningkatan Investasi**

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil <i>outcomes/output</i> yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
2.	FOKUS : Peningkatan Fasilitas Investasi	Meningkatkan realisasi investasi PMDN dan PMA	IUT PMDN(Rp. triliun)	35,28-39,50	61,71-78,02		BKPM	1.356,8
			IUT PMA (USD miliar)	13,08-13,20	22,88-26,10			
a.	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Penanaman Modal (prioritas nasional)	Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal di pusat dan di daerah	Pendidikan dan Pelatihan Penyelenggaraan PTSP di bidang Penanaman Modal	Peserta : 2.000 orang	Peserta : 2.000 orang	PROGRAM PENINGKATAN DAYA SAING PENANAMAN MODAL	BKPM	265,7
				4 jenis pelatihan:	4 jenis pelatihan:			
				Dasar, Lanjutan I, Lanjutan II, & SPIPISE	Dasar, Lanjutan I, Lanjutan II, & SPIPISE			
			Penetapan Kualifikasi Kelembagaan PTSP di Bidang Penanaman Modal	265 PTSP	265 PTSP			
			Pengadaan sarana dan prasarana penunjang Penyelenggaraan PTSP di bidang Penanaman Modal	33 Prop + 30 kab/kota	33 Prop + 90 kab/kota <sup>K)</sup>			
			Sosialisasi perijinan dan nonperijinan di bidang penanaman modal	33 Propinsi	33 Propinsi			
			Fasilitasi Penghubung di BKPM	19 instansi + 33 propinsi masing-masing 1 orang	19 instansi + 33 propinsi masing-masing 1 orang			

**BIDANG PEMBANGUNAN : PEREKONOMIAN**

**PRIORITAS : Peningkatan Investasi**

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil <i>outcomes/output</i> yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
			Penyederhanaan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal ( <i>Streamlining</i> Bisnis Proses Perijinan dan Nonperijinan)	3 Instansi	3 Instansi			
b.	Pengembangan Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)  (Prioritas Nasional)	Meningkatnya kualitas pengembangan Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik/ <i>Online</i> (SPIPISE)	Peningkatan jumlah aplikasi perijinan dan non perijinan yang menjadi wewenang BKPM, PTSP Propinsi, PTSP Kab./Kota yang terbangun dalam SPIPISE	Perijinan di 3 sektor	Implementasi nasional untuk semua sektor	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA BKPM	BKPM	100,3
		Jumlah peningkatan PTSP Prop. dan Kab/Kota yang terhubung dalam SPIPISE	50 Kab/Kota dan 33 Propinsi	50 Kab/Kota dan 33 Propinsi				
		Terbangunnya infrastruktur dan <i>database</i> penanaman modal yang terintegrasi	Penambahan kapasitas dan kemampuan infrastruktur pada jaringan BKPM	Penambahan kapasitas dan kemampuan infrastruktur pada jaringan BKPM				



**BIDANG PEMBANGUNAN : PEREKONOMIAN**

**PRIORITAS : Peningkatan Investasi**

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil <i>outcomes/output</i> yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
			Jumlah propinsi dan Kab/Kota yang mengikuti sosialisasi & pelatihan	50 Kab/Kota dan 33 Propinsi	50 Kab/Kota dan 33 Propinsi			
c.	Pengembangan Sumber Daya Manusia (Prioritas Bidang)	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dan pengkoordinasian pendidikan dan pelatihan bagi aparatur	Jumlah aparatur BKPM yang mengikuti Diklat Struktural, Diklat Teknis, Diklat Fungsional, dan tenaga kediklatan serta jumlah kurikulum dan modul diklat.	2.579 Orang 10 modul	2.000 Orang 19 modul	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA BKPM	BKPM	34,1
d.	Peningkatan Pelayanan Hukum Penanaman Modal (Prioritas Bidang)	Meningkatnya kualitas pelayanan, pertimbangan dan bantuan hukum serta penyelesaian kasus/sengketa di bidang penanaman modal	Jumlah pelaksanaan bantuan hukum dan penyelesaian sengketa di bidang penanaman modal secara efisien efektif.	Pelayanan konsultasi hukum penanaman modal sejumlah 48 kali konsultasi	Pelayanan konsultasi hukum penanaman modal sejumlah 34 kali konsultasi	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA BKPM	BKPM	33,7

**BIDANG PEMBANGUNAN : PEREKONOMIAN**

**PRIORITAS : Peningkatan Investasi**

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil <i>outcomes/output</i> yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
				Penanganan permasalahan dan bantuan hukum bidang penanaman modal di dalam/di luar pengadilan sejumlah 18 kegiatan	Penanganan permasalahan dan bantuan hukum bidang penanaman modal di dalam/di luar pengadilan sejumlah 14 kegiatan			
e.	Pembangunan/pengadaan/ peningkatan sarana dan prasarana (Prioritas Bidang)	Meningkatnya sarana dan prasarana kerja yang dibutuhkan	Persentase tercapainya peningkatan sarana dan prasarana kerja di pusat dan daerah	100%	100%	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR BKPM	BKPM	63,0
f.	Pengembangan Penanaman Modal di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) (prioritas nasional)	Terbentuknya KEK di 5 lokasi	Persentase penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan KEK	100%	100%	PROGRAM PENINGKATAN DAYA SAING PENANAMAN MODAL	BKPM	18,0

**BIDANG PEMBANGUNAN : PEREKONOMIAN**

**PRIORITAS : Peningkatan Investasi**

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil <i>outcomes/output</i> yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
			Persentase penetapan institusi Sekretariat Dewan Nasional KEK	100%	100%			
			Persentase pengoperasian Sekretariat Dewan Nasional KEK	-	100%			
			asistensi dan fasilitasi dalam rangka penetapan dan pengembangan KEK (a.l. verifikasi, <i>assessment</i> , evaluasi)	100%	100%			
			Hasil Koordinasi masalah strategis di bidang pengembangan KEK	1 buku laporan	5 buku laporan <sup>K)</sup>			
			Jumlah promosi penanaman modal di KEK	2 negara & 3 daerah	7 negara & 8 daerah			
			Kerja sama di bidang pengembangan KEK	-	5 negara			
g.	Koordinasi Pengembangan Urusan Penataan Ruang Dan Pengembangan Wilayah (termasuk KEK, KAPET, dan kawasan lainnya)	a. Meningkatnya Koordinasi Urusan Penataan Ruang Dan Pengembangan Wilayah	Persentase rekomendasi hasil koordinasi kebijakan Urusan Penataan Ruang dan Pengembangan Wilayah yang terimplementasi	75%	90%	Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian	Kemenko Perekonomian	22,7
		b. Terselesaikannya Peraturan Penyelenggaraan KEK dan penetapan Lokasi KEK dan pengembangan KAPET	Persentase peraturan pelaksana UU KEK yang terselesaikan	60%	95%			
			Jumlah Lokasi KEK yang ditetapkan	1	7 <sup>K)</sup>			

**BIDANG PEMBANGUNAN : PEREKONOMIAN**

**PRIORITAS : Peningkatan Investasi**

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil <i>outcomes/output</i> yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
h.	Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal Sektor Industri Agribisnis & Sumber Daya Alam Lainnya (prioritas bidang)	Meningkatnya kualitas Pemetaan & Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal Sektor Industri Agribisnis & Sumber Daya Alam Lainnya	<p>1. Jumlah pedoman arah kebijakan umum perencanaan penanaman modal yang berorientasi pada peningkatan daya saing di sektor industri agribisnis dan sumber daya alam lainnya.</p> <p>2. Jumlah kajian perencanaan pengembangan penanaman modal yang berorientasi pada peningkatan daya saing di sektor industri agribisnis dan sumber daya alam lainnya.</p> <p>3. Jumlah kajian perencanaan insentif penanaman modal di sektor industri agribisnis dan sumber daya alam lainnya.</p> <p>4. Jumlah buku pedoman tentang Norma, Standar dan Prosedur yang Baku dalam melakukan Perencanaan Penanaman Modal di Pusat dan di Daerah di Sektor Agribisnis &amp; Sumber Daya Alam lainnya.</p>	<p>1 pedoman arah kebijakan penanaman modal</p> <p>1 kajian sektor baru dan 1 kajian sektor <i>Up-Dating</i></p> <p>1 kajian perencanaan insentif penanaman modal</p> <p>1 buku pedoman NSP perencanaan penanaman modal</p>	<p>5 pedoman arah kebijakan penanaman modal <sup>K)</sup></p> <p>5 kajian sektor baru dan 1 kajian sektor <i>Up-Dating</i> <sup>K)</sup></p> <p>5 kajian perencanaan insentif penanaman modal <sup>K)</sup></p> <p>5 buku pedoman NSP perencanaan penanaman modal <sup>K)</sup></p>	PROGRAM PENINGKATAN DAYA SAING PENANAMAN MODAL	BKPM	31,2

**BIDANG PEMBANGUNAN : PEREKONOMIAN**

**PRIORITAS : Peningkatan Investasi**

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil <i>outcomes/output</i> yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
i.	Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal Sektor Industri Manufaktur (prioritas bidang)	Meningkatnya kualitas Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal Sektor Industri Manufaktur	1. Jumlah pedoman arah kebijakan perencanaan penanaman modal yang berorientasi pada peningkatan daya saing di sektor industri manufaktur.	1 pedoman arah kebijakan penanaman modal	5 pedoman arah kebijakan penanaman modal <sup>K)</sup>	PROGRAM PENINGKATAN DAYA SAING PENANAMAN MODAL	BKPM	31,8
			2. Jumlah kajian perencanaan pengembangan penanaman modal yang berorientasi pada peningkatan daya saing di sektor industri manufaktur.	1 kajian sektor baru dan 1 kajian sektor <i>Up-Dating</i>	5 kajian sektor baru dan 1 kajian sektor <i>Up-Dating</i> <sup>K)</sup>			
			3. Jumlah kajian Perencanaan Insentif Penanaman Modal di Sektor Industri Manufaktur	1 kajian perencanaan insentif penanaman modal	5 kajian perencanaan insentif penanaman modal <sup>K)</sup>			
			4. Jumlah buku tentang Norma, Standar dan Prosedur yang Baku dalam melakukan Perencanaan Penanaman Modal di Pusat dan di Daerah di Sektor Industri Manufaktur	1 buku pedoman NSP perencanaan penanaman modal	5 buku pedoman NSP perencanaan penanaman modal <sup>K)</sup>			

**BIDANG PEMBANGUNAN : PEREKONOMIAN**

**PRIORITAS : Peningkatan Investasi**

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil <i>outcomes/output</i> yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
j.	Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal di bidang Sarana, Prasarana, Jasa dan Kawasan (prioritas bidang)	Meningkatnya kualitas Pemetaan & Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal di Bidang Sarana, Prasarana, Jasa dan Kawasan	<p>1. Jumlah pedoman arah kebijakan perencanaan penanaman modal yang berorientasi pada peningkatan daya saing di sektor sarana prasarana, jasa dan kawasan.</p> <p>2. Jumlah kajian perencanaan pengembangan penanaman modal yang berorientasi pada peningkatan daya saing di sektor sarana prasarana, jasa dan kawasan.</p> <p>3. Jumlah kajian Perencanaan Insentif Penanaman Modal di sektor Sarana, Prasarana, Jasa dan Kawasan.</p> <p>4. Jumlah buku tentang Norma, Standar dan Prosedur Baku dalam melakukan Perencanaan Penanaman Modal di Pusat dan di Daerah di sektor Sarana, Prasarana, Jasa dan Kawasan.</p>	<p>1 pedoman</p> <p>1 kajian baru dan 1 <i>updating</i> kajian sektor</p> <p>1 kajian</p> <p>1 buku pedoman NSP perencanaan penanaman modal/1 <i>Updating</i> kajian sektor</p>	<p>5 pedoman <sup>K)</sup></p> <p>5 kajian baru dan 1 <i>updating</i> kajian sektor</p> <p>5 kajian <sup>K)</sup></p> <p>5 buku pedoman <sup>K)</sup> NSP perencanaan penanaman modal/ 1 <i>Updating</i> kajian sektor</p>	PROGRAM PENINGKATAN DAYA SAING PENANAMAN MODAL	BKPM	27,1

**BIDANG PEMBANGUNAN : PEREKONOMIAN**

**PRIORITAS : Peningkatan Investasi**

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil <i>outcomes/output</i> yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
k.	Peningkatan Kualitas Strategi Promosi di Bidang Penanaman Modal (prioritas bidang)	Meningkatnya kualitas pengembangan strategi promosi yang berpijak pada peningkatan daya saing penanaman modal	<p>1. Pemetaan kebijakan, insentif dan potensi penanaman modal negara pesaing dan negara target investasi yang berorientasi pada peningkatan strategi promosi penanaman modal.</p> <p>2. Pemetaan sektor potensial di Indonesia yang berorientasi pada pengembangan kebijakan promosi penanaman modal.</p> <p>3. Jumlah perencanaan dan pengembangan fokus strategi promosi penanaman modal yang berbasis sektor, wilayah dan baurannya.</p> <p>4. Jumlah strategi promosi penanaman modal yang efektif dan efisien dengan mengedepankan daya saing penanaman modal.</p>	<p>180 target investor potensial</p> <p>informasi iklim investasi di Indonesia dan 6 negara pesaing</p> <p>16 bahan masukan dalam penyusunan strategi promosi investasi</p> <p>16 strategi promosi</p>	<p>240 target investor potensial</p> <p>informasi iklim investasi di Indonesia dan 12 negara pesaing</p> <p>24 bahan masukan dalam penyusunan strategi promosi investasi</p> <p>24 strategi promosi</p>	PROGRAM PENINGKATAN DAYA SAING PENANAMAN MODAL	BKPM	207,3

**BIDANG PEMBANGUNAN : PEREKONOMIAN**

**PRIORITAS : Peningkatan Investasi**

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil <i>outcomes/output</i> yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
			5. Sarana promosi penanaman modal yang efektif dengan pengembangan kantor perwakilan BKPM di luar negeri.	Mendapatkan investor asing sebanyak-banyaknya dari 6 perwakilan di luar negeri	Mendapatkan investor asing sebanyak-banyaknya dari 10 perwakilan di luar negeri			
1.	Promosi Penanaman Modal Sektoral Terpadu dan Terintegrasi di Dalam dan Luar Negeri (prioritas bidang)	Meningkatnya kualitas promosi penanaman modal sektoral terpadu yang berpijak pada peningkatan daya saing penanaman modal	1. Penyelenggaraan promosi penanaman modal berdasarkan sektor dan negara melalui antara lain temu usaha, <i>business forum</i> , <i>business match-making</i> , dan sebagainya.  2. Jumlah Marketing Investasi Indonesia dan <i>Rebranding</i> penanaman modal Indonesia melalui Media Internasional yang berpijak pada daya saing penanaman modal.  3. Target partisipasi <i>stakeholder</i> di tingkat pusat dalam penyelenggaraan promosi penanaman modal berdasarkan sektor dan negara di luar negeri.	16 kegiatan	25 kegiatan	PROGRAM PENINGKATAN DAYA SAING PENANAMAN MODAL	BKPM	183,2



**BIDANG PEMBANGUNAN : PEREKONOMIAN**

**PRIORITAS : Peningkatan Investasi**

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil <i>outcomes/output</i> yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
m.	Fasilitasi Daerah Dalam Rangka Kegiatan Promosi Penanaman Modal (prioritas bidang)	Meningkatnya kualitas fasilitasi daerah yang berpijak pada peningkatan daya saing penanaman modal	1. Jumlah fasilitasi promosi daerah	33 Instansi Penanaman Modal Propinsi untuk ikut serta dalam kegiatan promosi investasi di dalam dan luar negeri	33 Instansi Penanaman Modal Propinsi untuk ikut serta dalam kegiatan promosi investasi di dalam dan luar negeri	PROGRAM PENINGKATAN DAYA SAING PENANAMAN MODAL	BKPM	91,6
			2. Jumlah fasilitasi pelayanan penerimaan misi penanam modal luar negeri di pusat dan di daerah tempat tujuan rencana penanaman modal.	misi investasi 33 kali di pusat dan daerah	misi investasi 50 kali di pusat dan daerah			
			3. Jumlah pelayanan pendampingan misi pusat dan daerah ke negara potensial penanam modal di berbagai sektor usaha.	promosi investasi di 6 negara	promosi investasi di 18 negara			

**BIDANG PEMBANGUNAN : PEREKONOMIAN**

**PRIORITAS : Peningkatan Investasi**

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil <i>outcomes/output</i> yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
			4. Jumlah kegiatan promosi penanaman modal daerah di dalam negeri antara lain <i>Talkshow</i> , Gelar Potensi Investasi Daerah (GPID), Seminar Investasi ( <i>Business Meeting, Match Making, One on One Meeting</i> ).	6 kali <i>TalkShow</i> di TV Nasional, 2 kali Gelar Potensi Investasi Daerah (GPID) di Jawa Timur dan Sulawesi Utara, 2 kali Seminar Investasi di Jawa Timur dan Sulawesi Utara ( <i>Business Meeting, Matchmaking, One-on-One Meeting</i> )	8 kali <i>TalkShow</i> di TV Nasional, 3 kali Gelar Potensi Investasi Daerah (GPID) di Sumatera Barat, Kalimantan Selatan dan DKI Jakarta, 3 kali Seminar Investasi di Sumatera Barat, Kalimantan Selatan dan DKI Jakarta ( <i>Business Meeting, matchmaking, One-on-One Meeting</i> )			

**BIDANG PEMBANGUNAN : PEREKONOMIAN**

**PRIORITAS : Peningkatan Investasi**

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil <i>outcomes/output</i> yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
			5. Jumlah kegiatan promosi penanaman modal daerah di luar negeri antara lain <i>Marketing Investasi Indonesia (MII)</i> dan <i>Trade, Tourism and Investment (TTI) Forum, Joint Promotion</i> antara Pusat dan Daerah, <i>Joint Promotion</i> antar Instansi Pusat (instansi penanaman modal pusat dengan instansi-instansi sektor dan lembaga-lembaga terkait)	Terfasilitasinya Instansi Penanaman Modal Propinsi/Instansi Penanaman Modal Kabupaten (IPMP/IPMK) dalam kegiatan MII di 3 negara dan TTI di 6 negara	Terfasilitasinya IPMP/IPMK dalam kegiatan MII di 3 negara dan TTI di 6 negara			
n.	Penyelenggaraan Pameran dan Penyediaan Sarana Promosi Penanaman Modal untuk Kegiatan di Dalam dan di Luar Negeri (prioritas bidang)	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pameran dan penyediaan sarana promosi penanaman modal yang berpijak pada peningkatan daya saing penanaman modal	1. Jumlah kegiatan pameran yang mengikutsertakan instansi penanaman modal di pusat dan daerah, instansi sektoral pusat dan daerah, asosiasi/kalangan dunia usaha serta masyarakat lainnya dalam pelaksanaan pameran.	150 pameran	150 pameran	PROGRAM PENINGKATAN DAYA SAING PENANAMAN MODAL	BKPM	51,1

**BIDANG PEMBANGUNAN : PEREKONOMIAN**

**PRIORITAS : Peningkatan Investasi**

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil <i>outcomes/output</i> yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
			2. Informasi potensi penanaman modal, antara lain profil proyek, brosur, <i>leaflet</i> , <i>Indonesian Investment News</i> , <i>Guide for Investor</i> , <i>Investment Procedure</i> s, film, video, slide, CD ROM dan multimedia/situs web .	1000 eksemplar brosur dan <i>leaflet</i> , 6500 eksemplar <i>Brief Guide for Investment</i> , 15000 eksemplar <i>Investment Procedures</i> dan buku-buku peraturan, media elektronik.	2500 eksemplar brosur dan <i>leaflet</i> , 9000 eksemplar <i>Brief Guide for Investment</i> , 30000 eksemplar <i>Investment Procedures</i> dan buku-buku peraturan, media elektronik.			
			3. Jumlah kegiatan pameran baik di dalam maupun di luar negeri.	9 pameran di dalam negeri dan 15 pameran di luar negeri	13 pameran di dalam negeri dan 22 pameran di luar negeri			
			4. Jumlah kunjungan dan minat penanaman modal sebagai respon terhadap penyelenggaraan pameran serta kegiatan promosi lainnya baik di dalam dan di luar negeri	1.650 pengunjung dan 100 peminat	1.650 pengunjung dan 100 peminat			

**BIDANG PEMBANGUNAN : PEREKONOMIAN**

**PRIORITAS : Peningkatan Investasi**

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil <i>outcomes/output</i> yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
o.	Kerjasama Bilateral dan Multilateral di Bidang Penanaman Modal (prioritas bidang)	Meningkatnya strategi dan teknik yang berdaya saing untuk memperoleh manfaat yang optimal dari perundingan-perundingan kerjasama bilateral dan multilateral dalam rangka memberikan jaminan dan perlindungan di bidang penanaman modal	1. Jumlah laporan partisipasi aktif BKPM dalam fora perundingan kerjasama bilateral dan multilateral.	23 laporan	106 laporan <sup>K)</sup>	PROGRAM PENINGKATAN DAYA SAING PENANAMAN MODAL	BKPM	22,5
			2. Jumlah laporan tentang jumlah dan kualitas bahan posisi perundingan dalam rangka kerjasama bilateral dan multilateral.	4 Laporan	20 Laporan <sup>K)</sup>			
			3. Jumlah laporan koordinasi internal dan eksternal dalam kerangka kerjasama pengembangan ekonomi wilayah tertentu.	2 Laporan	10 Laporan <sup>K)</sup>			
			4. Jumlah peserta sosialisasi hasil-hasil perundingan bilateral dan multilateral.	120 Orang	100 Orang			

**BIDANG PEMBANGUNAN : PEREKONOMIAN**

**PRIORITAS : Peningkatan Investasi**

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil <i>outcomes/output</i> yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
p.	Kerjasama Regional di Bidang Penanaman Modal (prioritas bidang)	Meningkatnya strategi dan teknik yang berdaya saing untuk memperoleh manfaat yang optimal dari perundingan- perundingan kerjasama regional dalam rangka memberikan jaminan dan perlindungan di bidang penanaman modal	1. Jumlah laporan partisipasi aktif BKPM dalam fora perundingan kerjasama regional.	30 Laporan	155 Laporan <sup>K)</sup>	PROGRAM PENINGKATAN DAYA SAING PENANAMAN MODAL	BKPM	30,1
			2. Jumlah laporan tentang jumlah dan kualitas bahan posisi perundingan dalam rangka kerjasama regional.	33 Laporan	158 Laporan <sup>K)</sup>			
			3. Jumlah laporan kegiatan penyelenggaraan Seknas KESR.	24 Laporan	120 Laporan <sup>K)</sup>			
			4. Jumlah peserta sosialisasi hasil-hasil perundingan kerjasama regional	180 Orang	220 Orang			
q.	Kerjasama dengan Dunia Usaha Asing di Dalam dan di Luar Negeri di Bidang Penanaman Modal (prioritas bidang)	Meningkatnya strategi dan teknik yang berdaya saing untuk memperoleh manfaat yang optimal dari perundingan- perundingan kerjasama dunia usaha internasional	1. Jumlah partisipasi aktif BKPM dalam fora perundingan kerjasama dengan dunia usaha internasional.	35 kali	50 kali	PROGRAM PENINGKATAN DAYA SAING PENANAMAN MODAL	BKPM	16,9
			2. Jumlah kesepakatan kerjasama dengan dunia usaha internasional	4 kesepakatan	16 kesepakatan			

**BIDANG PEMBANGUNAN : PEREKONOMIAN**

**PRIORITAS : Peningkatan Investasi**

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil <i>outcomes/output</i> yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
			3. Jumlah laporan pendataan penanam modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia dan sosialisasinya kepada instansi terkait.	Laporan pendataan dan informasi FDI <i>Outflow</i> Indonesia melalui 5 kali sosialisasi di KBRI/KJRI	Laporan pendataan dan informasi FDI <i>Outflow</i> Indonesia melalui 10 kali sosialisasi di KBRI/KJRI			
r.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah I (prioritas bidang)	Mendorong realisasi penanaman modal di Sumatera	1. Jumlah proyek yang dipantau perkembangan realisasi penanaman modalnya di seluruh propinsi di Pulau Sumatera dan kepulauan di sekitarnya. 2. Jumlah daerah yang mendapatkan bimbingan dan fasilitasi penyelesaian masalah yang dihadapi 3. Jumlah perusahaan yang mendapatkan pengawasan pelaksanaan penanam modal.	1.500 proyek 10 Daerah 200 Perusahaan	1.700 proyek 10 Daerah 150 Perusahaan	PROGRAM PENINGKATAN DAYA SAING PENANAMAN MODAL	BKPM	42,7

**BIDANG PEMBANGUNAN : PEREKONOMIAN**

**PRIORITAS : Peningkatan Investasi**

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil <i>outcomes/output</i> yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
s.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah II (prioritas bidang)	Mendorong realisasi penanaman modal di Kalimantan , DKI Jakarta dan DI Yogyakarta	1. Jumlah proyek yang dipantau perkembangan realisasi penanaman modalnya di propinsi DKI Jakarta, DI Yogyakarta, dan seluruh propinsi di Pulau Kalimantan dan kepulauan di sekitarnya.	6.000 Proyek	7.000 Proyek	PROGRAM PENINGKATAN DAYA SAING PENANAMAN MODAL	BKPM	28,0
			2. Jumlah daerah yang mendapatkan bimbingan dan fasilitasi penyelesaian masalah yang dihadapi penanam modal antara lain dengan instansi terkait, masyarakat sekitar lokasi proyek, lingkungan hidup dan ketenagakerjaan	6 Daerah	6 Daerah			
			3. Jumlah perusahaan yang mendapatkan pengawasan pelaksanaan penanam modal	240 Perusahaan	480 Perusahaan			



**BIDANG PEMBANGUNAN : PEREKONOMIAN**

**PRIORITAS : Peningkatan Investasi**

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil <i>outcomes/output</i> yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
t.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah III (prioritas bidang)	Mendorong realisasi penanaman modal di Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah dan Sulawesi	1. Jumlah proyek yang dipantau perkembangan realisasi penanaman modalnya di Propinsi Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah dan seluruh propinsi di Pulau Sulawesi dan kepulauan di sekitarnya.	4.000 Proyek	6.000 Proyek	PROGRAM PENINGKATAN DAYA SAING PENANAMAN MODAL	BKPM	14,7
			2. Jumlah daerah yang mendapatkan bimbingan dan fasilitasi penyelesaian masalah yang dihadapi penanaman modal antara lain dari aspek dengan instansi terkait, masyarakat sekitar lokasi proyek, lingkungan hidup dan ketenagakerjaan	9 Daerah	9 Daerah			
			3. Jumlah perusahaan yang mendapatkan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	400 perusahaan	600 perusahaan			

**BIDANG PEMBANGUNAN : PEREKONOMIAN**

**PRIORITAS : Peningkatan Investasi**

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil <i>outcomes/output</i> yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)	
				2010	2014				
u.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV (prioritas bidang)	Mendorong realisasi penanaman modal di Direktorat Wilayah IV (Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat)	1. Jumlah proyek yang dipantau perkembangan realisasi penanaman modalnya seluruh propinsi Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat	1.550 proyek	2.000 proyek	PROGRAM PENINGKATAN DAYA SAING PENANAMAN MODAL	BKPM	41,1	
			2. Jumlah daerah yang mendapatkan bimbingan dan fasilitasi penyelesaian masalah yang dihadapi penanaman modal antara lain dari aspek dengan instansi terkait, masyarakat sekitar lokasi proyek, lingkungan hidup dan ketenagakerjaan	8 daerah	8 daerah				
			3. Jumlah perusahaan yang pengawasan pelaksanaan penanaman modal	200 perusahaan	150 perusahaan				
			4. Pemberian penghargaan investasi dan pelayanan Penanaman Modal kepada Propinsi atau Kabupaten/Kota serta perusahaan PMA/PMDN	-	4 paket <sup>K)</sup>				
<b>TOTAL</b>									<b>1.609,9</b>

**RENCANA TINDAK PRIORITAS BIDANG PEREKONOMIAN**

**BIDANG PEMBANGUNAN : PEREKONOMIAN**

**PRIORITAS : Peningkatan Ekspor**

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN /LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
1.	FOKUS : Peningkatan Diversifikasi Pasar Tujuan Ekspor	Meningkatnya diversifikasi pasar tujuan ekspor, yang diukur dengan menurunnya tingkat kebergantungan kepada lima pasar tujuan ekspor terbesar	Pangsa pasar di 5 negara tujuan ekspor nonmigas terbesar/Indeks CRS (%)	47	43		Kementerian Perdagangan	1.251,6
a.	Peningkatan kualitas promosi dan kelembagaan ekspor (Prioritas Bidang)	Meningkatnya peran lembaga promosi dan nilai tambah produk ekspor non migas	Jumlah pameran dagang dalam negeri	21	30	Pengembangan Ekspor	Kementerian Perdagangan	726,1
		Jumlah kerjasama dengan instansi terkait/asosiasi/dunia usaha	8	11				
		Jumlah penyelenggaraan kantor ITPC	20	30				
		Persentase penyerapan anggaran Dekon Pengembangan Ekspor Daerah	100	100				
b.	Pengembangan Pasar dan Produk Ekspor di Wilayah Afrika dan Timur Tengah (Prioritas Bidang)	Berkembangnya informasi pasar dan produk ekspor bagi dunia usaha, serta meningkatnya kerjasama dengan instansi terkait di wilayah Afrika dan Timur Tengah	Jumlah promosi dagang internasional yang diikuti	20	42	Program Pengembangan Ekspor	Kementerian Perdagangan	66,6
		Jumlah inquiry yang dihasilkan dari pameran dagang	600	1350				
		Jumlah peserta yang mengikuti pameran dagang	160	275				
		Jumlah buku petunjuk pasar, profil produk, analisa pasar dan katalog produk yang disusun	27	48				
		Jumlah kerjasama dengan instansi terkait dalam pengembangan produk dan pasar di wilayah Afrika dan Timur Tengah	5	9				

**BIDANG PEMBANGUNAN : PEREKONOMIAN**

**PRIORITAS : Peningkatan Ekspor**

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN /LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
c.	Pengembangan Pasar dan Produk Ekspor di Wilayah Asia, Australia dan Selandia Baru (Prioritas Bidang)	Berkembangnya informasi pasar dan produk ekspor bagi dunia usaha, serta meningkatnya kerjasama dengan instansi terkait di wilayah Asia, Australia dan Selandia Baru	Jumlah promosi dagang internasional yang diikuti	18	35	Program Pengembangan Ekspor	Kementerian Perdagangan	95,4
			Jumlah inquiry yang dihasilkan dari pameran dagang	600	1350			
			Jumlah peserta yang mengikuti pameran dagang	230	530			
			Jumlah buku petunjuk pasar, profil produk, analisa pasar dan katalog produk yang disusun	19	32			
			Jumlah kerjasama dengan instansi terkait dalam pengembangan produk dan pasar di wilayah Asia, Australia dan Selandia Baru	7	15			
d.	Pengembangan SDM Bidang Ekspor (Prioritas Bidang)	Meningkatnya jumlah dan kualitas pelatihan eksportir dan calon eksportir	Jumlah pelatihan yang berorientasi ekspor	120	140	Program Pengembangan Ekspor	Kementerian Perdagangan	131,5
			Jumlah pelayanan prima terhadap peserta diklat	50	70			
			Jumlah pengembangan kurikulum dan metode diklat	9	10			
			Jumlah laporan monitoring dan evaluasi diklat ekspor	120	140			
			Jumlah kegiatan promosi kegiatan PPEI	25	50			
			Jumlah kerjasama diklat ekspor di dalam dan luar negeri	55	65			
			Jumlah peserta kegiatan temu alumni	100	100			
			Jumlah kegiatan partisipasi pameran bersama bagi alumni sebagai layanan program pascadiklat	4	12			

**BIDANG PEMBANGUNAN : PEREKONOMIAN**

**PRIORITAS : Peningkatan Ekspor**

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN /LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
e.	Peningkatan Peran dan Kemampuan Diplomasi Perdagangan Internasional (Prioritas Nasional)	Meningkatnya peran dan kemampuan Indonesia di bidang diplomasi perdagangan internasional guna pembukaan, peningkatan dan pengamanan akses pasar	Jumlah partisipasi dalam perundingan perdagangan internasional	40	55	Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional	Kementerian Perdagangan	179,9
			Jumlah posisi runding yang disusun	40	55			
			Jumlah penyelenggaraan sidang internasional di Dalam Negeri	8	8			
			Jumlah hasil perundingan Perdagangan Internasional (MRA, MoU, Agreement, Agreed Minutes, Declaration, Chair Report)	34	34			
			Jumlah forum konsultasi teknis kesepakatan perundingan internasional	6	8			
f.	Peningkatan Kerjasama dan Perundingan Bilateral di Kawasan Asia, Amerika dan Australia (Prioritas Bidang)	Meningkatnya hasil kerjasama dan perundingan perdagangan bilateral di kawasan Asia, Amerika dan Australia	Jumlah partisipasi dalam perundingan kerjasama bilateral di kawasan Asia, Amerika dan Australia	20	42	Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional	Kementerian Perdagangan	26,0
			Jumlah hasil perundingan kerjasama perdagangan bilateral di kawasan Asia, Amerika dan Australia	5	2			
			Jumlah kesepakatan kerjasama perdagangan bilateral di kawasan Asia, Amerika dan Australia yang diratifikasi	1	2 <sup>k)</sup>			
g.	Peningkatan Kerjasama dan Perundingan Bilateral di Kawasan Afrika, Eropa, dan Timur Tengah (Prioritas Bidang)	Meningkatnya hasil kerjasama dan perundingan perdagangan bilateral di Kawasan Afrika, Eropa, dan Timur Tengah	Jumlah partisipasi dalam perundingan kerjasama bilateral di Kawasan Afrika, Eropa, dan Timur Tengah	12	12	Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional	Kementerian Perdagangan	26,0
			Jumlah hasil perundingan kerjasama perdagangan bilateral di Kawasan Afrika, Eropa, dan Timur Tengah	6	20 <sup>k)</sup>			

**BIDANG PEMBANGUNAN : PEREKONOMIAN**

**PRIORITAS : Peningkatan Ekspor**

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN /LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
			Jumlah kesepakatan kerjasama perdagangan bilateral di Kawasan Afrika, Eropa, dan Timur Tengah yang diratifikasi	0	1			
2.	FOKUS : Peningkatan Kualitas dan Keberagaman Produk Ekspor	Meningkatnya kualitas dan keberagaman produk ekspor, yang diukur dengan meningkatnya indeks diversifikasi produk ekspor nonmigas	Indeks diversifikasi ekspor nonmigas	0.67	0.59		Kementerian Perdagangan	637,0
a.	Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Mutu Barang (Prioritas Bidang)	Tersedianya kebijakan dan bimbingan teknis pengawasan dan pengendalian mutu	<p>PEDULI MUTU :</p> <p>1.1 Jumlah bimbingan teknis, sosialisasi, monitoring untuk meningkatkan mutu produk ekspor (komoditi)</p> <p>1.2 Jumlah bimtek, sosialisasi untuk meningkatkan kepedulian mutu produk impor (daerah)</p> <p>KENDALI MUTU:</p> <p>2.1 Pengawasan mutu barang ekspor melalui <i>preshipment inspection</i> (komoditi)</p> <p>2.2 Pengawasan mutu barang impor melalui pengawasan pra-pasar dengan mekanisme pendaftaran Nomor Pendaftaran Barang (NPB)</p> <p>2.3 Pengawasan mutu barang produk dalam negeri setara dengan mutu produk impor melalui mekanisme pendaftaran Nomor Registrasi Produk (NRP)</p>	3	10	Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri	Kementerian Perdagangan	111,6
			<p>JEJARING KERJA MUTU</p> <p>3.1 Road map kerjasama lembaga penilaian kesesuaian (LPK) baik dalam maupun luar negeri</p>	1	5 <sup>k)</sup>			

**BIDANG PEMBANGUNAN : PEREKONOMIAN**

**PRIORITAS : Peningkatan Ekspor**

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN /LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
			3.2 Jumlah kemampuan Lembaga Penilai Kesesuaian (LPK) yang dipantau	20	100 <sup>k)</sup>			
			3.3 Jumlah pejabat fungsional Penguji Mutu Barang (PMB) (orang)	65	325 <sup>k)</sup>			
			3.4 Jumlah Penerapan Angka Kredit (PAK) Penguji Mutu Barang (PMB) yang diterbitkan	95	495 <sup>k)</sup>			
b.	Pengembangan Standardisasi Bidang Perdagangan (Prioritas Bidang)	Terlaksananya standardisasi bidang perdagangan yang mengacu pada standar internasional	Jumlah rumusan standar barang dan jasa perdagangan	2	2	Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perdagangan	Kementerian Perdagangan	73,0
			Jumlah negosiasi pada sidang internasional yang terjadwal	18	21			
			Jumlah penyusunan regulasi teknis standardisasi dalam bidang perdagangan	1	5 <sup>k)</sup>			
			Pembuatan buku standar contoh karet konvensional (sesuai amanat International Rubber Asosiation - IRA - setiap 2 tahun) (buku)	-	800			
			Penyelesaian pendaftaran Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) (hari)	5	3			
			Persentasi dukungan dan pemahaman publik terhadap Kebijakan Standardisasi Bidang Perdagangan (indeks persepsi stakeholder)	-	80%			
c.	Peningkatan Kerjasama di Bidang Perdagangan Jasa (Prioritas Bidang)	Meningkatnya Kerjasama di Bidang Perdagangan Jasa	Jumlah perundingan bidang jasa yang diikuti	10	30	Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional	Kementerian Perdagangan	20,4
			Jumlah hasil perundingan bidang jasa di forum internasional	3	2			

**BIDANG PEMBANGUNAN : PEREKONOMIAN**

**PRIORITAS : Peningkatan Ekspor**

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN /LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
d.	Pengembangan Pasar dan Produk di Wilayah Amerika dan Eropa (Prioritas Bidang)	Berkembangnya informasi pasar dan produk ekspor bagi dunia usaha, serta meningkatnya kerjasama dengan instansi terkait di wilayah Amerika dan Eropa	Jumlah promosi dagang internasional yang diikuti	19	36	Program Pengembangan Ekspor	Kementerian Perdagangan	107,2
			Jumlah <i>inquiry</i> yang dihasilkan dari pameran dagang	600	1.560			
			Jumlah peserta yang mengikuti pameran dagang	195	350			
			Jumlah buku petunjuk pasar, profil produk, analisa pasar dan katalog produk yang disusun	19	33			
			Jumlah kerjasama dengan instansi terkait dalam pengembangan produk dan pasar di wilayah Amerika dan Eropa	4	9			
e.	Koordinasi Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Meningkatnya kualitas koordinasi kebijakan peningkatan dan pengembangan ekspor	Presentase rekomendasi hasil koordinasi kebijakan peningkatan dan pengembangan ekspor yang terimplementasikan	60-70%	95-100%	Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian	Kemenko Perekonomian	11,4
3.	FOKUS : Peningkatan Fasilitas Ekspor	Meningkatnya kelancaran dan kemudahan ekspor	Jumlah perijinan ekspor/impor online	44	81		Kementerian Perdagangan	1.037,5
			Waktu pemrosesan perijinan ekspor/impor	5 HR	1 HR			
			Jumlah pengguna perijinan ekspor/impor online (INA-TRADE)	1500	7500			
a.	Pengelolaan Fasilitas Ekspor dan Impor (Prioritas Nasional)	Tersedianya kebijakan, Koordinasi, Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi di bidang fasilitasi ekspor dan impor	Jumlah penerbitan kebijakan fasilitasi ekspor dan impor (Peraturan)	4	20 <sup>k)</sup>	Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri	Kementerian Perdagangan	100,8
			Jumlah pengembangan sistem elektronik bidang fasilitasi pelayanan publik (Kegiatan)	2	2			



**BIDANG PEMBANGUNAN : PEREKONOMIAN**

**PRIORITAS : Peningkatan Ekspor**

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN /LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
			Jumlah pengguna perijinan ekspor/impor online melalui INATRADE (Perusahaan)	1.500	7.500			
			Jumlah bimbingan teknis bidang fasilitasi perdagangan (Kegiatan)	5	5			
			Jumlah koordinasi bidang fasilitasi perdagangan (Kegiatan)	60	60			
			Jumlah partisipasi sidang - sidang fasilitasi perdagangan didalam dan luar negeri (Kegiatan)	17	17			
			Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan monitoring fasilitasi perdagangan (Bahan)	5	5			
b.	Peningkatan Pengamanan dan Perlindungan Akses Pasar (Prioritas Bidang)	Meningkatnya hasil pengamanan dan perlindungan akses pasar	Jumlah submisi/sanggahan atas tuduhan dumping/tuduhan subsidi/tuduhan safeguard	28	30	Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional	Kementerian Perdagangan	34,3

**BIDANG PEMBANGUNAN : PEREKONOMIAN**

**PRIORITAS : Peningkatan Ekspor**

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN /LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
			Jumlah abstraksi atas non confidential complaint tuduhan dumping, tuduhan subsidi, dan tindakan safeguard	19	20			
			Jumlah profil kasus tuduhan dumping, tuduhan subsidi dan tindakan safeguard	19	20			
c.	Pengelolaan Impor (Prioritas Bidang)	Tersedianya kebijakan, standardisasi, dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang impor	Jumlah rumusan kebijakan/peraturan di bidang impor (PERATURAN )	5	5	Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri	Kementerian Perdagangan	48,0
			Jumlah data dan informasi importasi barang yang diatur tataniaga impornya (JENIS)	3	15 <sup>k)</sup>			
			Jumlah penerbitan penetapan importir terdaftar(IT),	4000	5000			
			Jumlah penerbitan pengakuan sebagai Importir Produsen (IP)	2000	2800			
			Jumlah penerbitan surat persetujuan Impor (SPI)	3000	4000			
			Jumlah bimbingan teknis di bidang impor (Kegiatan)	5	9			
			Jumlah laporan evaluasi monitoring pelaksanaan kebijakan impor (Dokumen)	5	25 <sup>k)</sup>			
d.	Dukungan Sektor Perdagangan Terhadap Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (Prioritas Nasional)	Meningkatnya peranan sektor perdagangan di Kawasan Ekonomi Khusus	Jumlah PP tentang Kawasan Ekonomi Khusus	1	2	Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri	Kementerian Perdagangan	10,9
			Jumlah kebijakan perdagangan yang dilimpahkan ke KEK (peraturan)	1	5 <sup>k)</sup>			

**BIDANG PEMBANGUNAN : PEREKONOMIAN**

**PRIORITAS : Peningkatan Ekspor**

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN /LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
e.	Perumusan Kebijakan dan Pengembangan Teknologi Informasi Kepabeanan dan Cukai	1. Terciptanya administrator kepabeanan dan cukai yang dapat memberikan fasilitasi terbaik berbasis teknologi informasi kepada industri, perdagangan, dan masyarakat serta optimalisasi penerimaan  2. Terwujudnya tingkat pelayanan yang efisien kepada pemangku kepentingan berkaitan dengan layanan berbasis teknologi informasi	1. Persentase sistem aplikasi dan infrastruktur TI yang sesuai dengan proses bisnis DJBC  2. Persentase penyelesaian aplikasi sistem kepabeanan yang terintegrasi dengan portal NSW  3. PMK untuk pengembangan sistem elektronik terkait dengan perijinan investasi di bidang kepabeanan dan perpajakan  4. PMK tentang Authorized Economic Operator (AEO) dan dukungan terkait dengan Sistem Logistik Nasional  5. PMK tentang Kawasan Pelayanan Pabean Terpadu (KPPT) dalam rangka pengembangan sistem logistik  6. PMK-PMK tentang pemberian fasilitas fiskal sesuai peraturan perundang-undangan dan skema pembiayaan infrastruktur ke dan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)  7. PMK untuk memadukan Kawasan Pelayanan Pabean Terpadu (KPPT) dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di 5 lokasi (di Jawa dan Sumatra)	100%	100%	Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai	Kemenkeu	675,4

**BIDANG PEMBANGUNAN : PEREKONOMIAN**

**PRIORITAS : Peningkatan Ekspor**

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN /LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
f.	Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis Fasilitas Kepabeanan	1. Terciptanya administrator di bidang fasilitas kepabeanan yang dapat memberikan dukungan industry, perdagangan dan masyarakat serta optimalisasi pendapatan  2. Terwujudnya pelayanan yang efisien dan pengawasan efektif	1. Persentase realisasi janji layanan publik terkait pemberian fasilitas pembebasan dan keragaman bea masuk	70%	80%	Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai	Kemenkeu	133,0
			2. Persentase realisasi janji layanan public terkait pemberian fasilitas pertambangan	70%	80%			
			3. Persentase realisasi janji layanan public terkait pemberian tempat penimbunan berikat (TPB).	70%	80%			
			4. Persentase penyelesaian rancangan PMK dan aturan pelaksanaan lainnya terkait sistem pelayanan kepabeanan yang menunjang Sistem Logistik Nasional ( <i>Customs Advance Trade Systems</i> )	-	100%			
			5. Persentase penyelesaian peraturan terkait sistem pelayanan kepabeanan dan cukai di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	-	100%			
			6. PMK untuk pengembangan sistem elektronik terkait dengan perijinan investasi di bidang kepabeanan dan perpajakan	-	100%			
			7. PMK tentang <i>Authorized Economic Operator</i> (AEO) dan dukungan terkait dengan Sistem Logistik Nasional	-	100%			
			8. PMK-PMK tentang pemberian fasilitas fiskal sesuai peraturan perundang-undangan dan skema pembiayaan infrastruktur ke dan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	-	100%			

**BIDANG PEMBANGUNAN : PEREKONOMIAN**

**PRIORITAS : Peningkatan Ekspor**

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN /LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
			9.PMK untuk memadukan Kawasan Pelayanan Pabean Terpadu (KPPT) dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di 5 lokasi (di Jawa dan Sumatra)	-	100%			
g.	Koordinasi Pengembangan dan Penerapan Sistem National Single Window (NSW) dan ASEAN Single Window (ASW)	Meningkatnya Koordinasi di Bidang Pengembangan dan Penerapan NSW dan ASW	Persentase Rekomendasi hasil koordinasi kebijakan di Bidang Pengembangan dan Penerapan NSW dan ASW yang terimplementasikan	80%	95%	Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian	Kemenko Perekonomian	15,6
h.	Koordinasi Pengembangan Kerjasama Ekonomi Dan Pembiayaan Eropa, Afrika Dan Timur Tengah	Meningkatnya koordinasi kerjasama ekonomi dan pembiayaan Eropa, Afrika dan Timur Tengah	Persentase hasil koordinasi di bidang kerjasama ekonomi dan pembiayaan Eropa, Afrika dan Timur Tengah yang terimplementasikan	60-70%	95-100%	Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian	Kemenko Perekonomian	9,7
i.	Koordinasi Pengembangan Kerjasama Ekonomi Dan Pembiayaan Asia	Meningkatnya koordinasi kerjasama ekonomi dan pembiayaan Asia	Persentase rekomendasi hasil koordinasi kebijakan di bidang kerjasama ekonomi dan pembiayaan Asia yang diimplementasikan	60-70%	95-100%	Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian	Kemenko Perekonomian	9,7
<b>4.</b>	<b>Fokus : Pengembangan Industri Pariwisata</b>	<b>Meningkatnya nilai investasi di bidang pariwisata</b>	<b>Persentase investasi bidang pariwisata terhadap investasi nasional</b>	<b>5,19</b>	<b>6,43</b>			<b>213,0</b>
a.	Pengembangan Usaha, Industri dan Investasi Pariwisata	Berkembangnya usaha, industri dan investasi pariwisata	1. Jumlah kebijakan usaha pariwisata (naskah) 2. Jumlah industri/asosiasi pariwisata yang mendapat dukungan 3. Jumlah pola perjalanan ( <i>travel pattern</i> ) 4. Jumlah profil investasi pariwisata 5. Jumlah UMKM dan industri kreatif bidang pariwisata	8 4 6 5 8	48 <sup>k)</sup> 35 <sup>k)</sup> 37 <sup>k)</sup> 33 <sup>k)</sup> 48 <sup>k)</sup>	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Kemenbudpar	73,0

**BIDANG PEMBANGUNAN : PEREKONOMIAN**

**PRIORITAS : Peningkatan Ekspor**

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN /LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
b.	Pengembangan Standardisasi Pariwisata	Terlaksananya penyusunan dan pemutakhiran standard pariwisata serta penerapan standard dan kompetensi pariwisata	1. Jumlah standard kompetensi	8	38 <sup>k)</sup>	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Kemenbudpar	140,0
			2. Jumlah standard usaha	6	32 <sup>k)</sup>			
			3. Jumlah materi uji kompetensi dan pedoman sertifikasi usaha	8	36 <sup>k)</sup>			
			4. Jumlah master assesor dan assesor	1.000	5.000 <sup>k)</sup>			
			5. Jumlah Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan LSU pariwisata	7	36 <sup>k)</sup>			
			6. Jumlah fasilitasi sertifikasi kompetensi (ribu orang)	10	50 <sup>k)</sup>			
			7. Jumlah tenaga kerja yang disertifikasi (ribu orang)	10	50 <sup>k)</sup>			

**BIDANG PEMBANGUNAN : PEREKONOMIAN**

**PRIORITAS : Peningkatan Ekspor**

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN /LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
5.	Fokus : Pengembangan Destinasi Pariwisata	Meningkatnya destinasi pariwisata yang berdaya saing tinggi di pasar global	<b>1. Lama tinggal wisatawan (hari):</b> 1. Mancanegara 2. Nusantara <b>2. Pengeluaran wisatawan harian:</b> 1. Mancanegara (USD) 2. Nusantara (Rp.)	7,8 2,1 1.000 600	7,5 3 2.000 750			1.168,5
a.	Pengembangan Daya Tarik Pariwisata	Meningkatnya kualitas dan kuantitas penataan daya tarik wisata	Jumlah daya tarik wisata alam, bahari dan budaya	7	29	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Kemenbudpar	101,3
b.	Pemberdayaan Masyarakat di Destinasi Pariwisata	Meningkatnya kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan	1. Jumlah kelompok sadar wisata 2. Jumlah masyarakat sadar wisata (orang)	200 4.000	1.100 <sup>k)</sup> 22.000 <sup>k)</sup>	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Kemenbudpar	65,0
c.	Peningkatan PNPB Mandiri Bidang Pariwisata	Meningkatnya jumlah desa wisata	Jumlah desa wisata	200	2.000 <sup>k)</sup>	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Kemenbudpar	406,0
d.	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata	Terselenggaranya kegiatan koordinasi perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan penyusunan kebijakan, peningkatan kualitas SDM aparatur, dan pendudukan teknis dalam meningkatkan kapasitas pengelolaan destinasi pariwisata	1. Jumlah kegiatan pemutakhiran basis data dan informasi destinasi 2. Jumlah Organisasi Pengelolaan Destinasi (Destination Management Organization/ DMO) (buah) 3. Jumlah dukungan fasilitas pariwisata (daya tarik) 4. Jumlah dukungan teknis pengembangan destinasi pariwisata	7 2 7 36	29 15 29 239 <sup>k)</sup>	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Kemenbudpar	596,2

**BIDANG PEMBANGUNAN : PEREKONOMIAN**

**PRIORITAS : Peningkatan Ekspor**

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN /LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
6.	Fokus: Pengembangan Pemasaran dan Promosi Pariwisata	Meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara	1. Jumlah kunjungan wisman (juta orang)	6,75	8,6			2.437,0
			2. Jumlah pergerakan wisnus (juta perjalanan)	230	276			
a.	Peningkatan Promosi Pariwisata Luar Negeri	Meningkatnya partisipasi pariwisata Indonesia pada bursa, misi penjualan ( <i>sales mission</i> ) dan festival di tingkat internasional	1. Jumlah partisipasi pada bursa pariwisata internasional, pelaksanaan misi penjualan ( <i>sales mission</i> ), dan dukungan penyelenggaraan festival ( <i>event</i> )	72	361 <sup>k)</sup>	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Kemenbudpar	544,6
			2. Jumlah perwakilan promosi pariwisata Indonesia ( <i>Indonesia Tourism Promotion Representative Officers</i> ) di luar negeri (kota)	12	65 <sup>k)</sup>			
b.	Peningkatan Promosi Pariwisata Dalam Negeri	Meningkatnya jumlah <i>event</i> pariwisata dalam negeri	1. Jumlah penyelenggaraan promosi langsung ( <i>direct promotion</i> ), dan <i>event</i> pariwisata berskala nasional dan internasional.	43	220 <sup>k)</sup>	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Kemenbudpar	225,6
			2. Jumlah dukungan <i>event</i> seni, budaya, dan pariwisata daerah ( <i>event</i> )	31	162 <sup>k)</sup>			
c.	Pengembangan Informasi Pasar Pariwisata	Meningkatnya pemanfaatan informasi pasar pariwisata oleh pelaku pariwisata	1. Jumlah dokumen hasil analisis pasar dalam dan luar negeri (naskah)	23	115 <sup>k)</sup>	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Kemenbudpar	211,0
			2. Jumlah penyebaran informasi fokus pasar pariwisata Indonesia (naskah)	640	3.200 <sup>k)</sup>			
			3. Jumlah peserta Perjalanan Pengenalan ( <i>Familirization Trip/ Fam Trip</i> ) sesuai target, jadwal, fokus pasar dan pasar potensial (media atau usaha)	100	550 <sup>k)</sup>			



**BIDANG PEMBANGUNAN : PEREKONOMIAN**

**PRIORITAS : Peningkatan Ekspor**

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN /LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
			4. Jumlah permintaan pasar untuk berkunjung ke Indonesia (transaksi)	8.000	44.000 <sup>k)</sup>			
d.	Peningkatan Publikasi Pariwisata	Meningkatnya kelengkapan informasi tujuan pariwisata Indonesia	1. Jumlah destinasi yang memiliki data dan informasi yang lengkap (daerah)	10	50 <sup>k)</sup>	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Kemenbudpar	724,7
			2. Jumlah bahan promosi cetak, promosi elektronik, publikasi media cetak, media elektronik dan media luar ruang (ribu buah)	1.150	5.706 <sup>k)</sup>			
			3. Jumlah bahan promosi cetak dan promosi elektronik yang didistribusikan (ribu eksemplar)	709	3.544 <sup>k)</sup>			
e.	Peningkatan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran ( <i>Meeting, Incentive Travel, Conference, and Exhibition/ MICE</i> )	Meningkatnya penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran ( <i>Meeting, Incentive Travel, Conference, and Exhibition/ MICE</i> ) nasional dan internasional di Indonesia	1. Jumlah daerah yang dikembangkan menjadi tujuan wisata MICE (daerah)	5	32 <sup>k)</sup>	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Kemenbudpar	229,7
			2. Jumlah promosi penyelenggaraan MICE	12	60 <sup>k)</sup>			
			3. Jumlah pendukung penawaran ( <i>bidding</i> ) dan penyelenggaraan MICE	56	292 <sup>k)</sup>			
f.	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pemasaran	Terselenggaranya kegiatan koordinasi perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, penyusunan kebijakan, peningkatan kualitas SDM aparatur, dan dukungan teknis peningkatan pemasaran pariwisata	5. Jumlah event pengembangan kebijakan pemasaran dan promosi pariwisata oleh masyarakat dan daerah	102	476 <sup>k)</sup>	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Kemenbudpar	501,4
7.	Fokus: Pengembangan Sumber Daya Pariwisata	Meningkatnya kapasitas sumber daya pembangunan pariwisata	1. Jumlah lulusan pendidikan tinggi kepariwisataan yang terserap di pasar tenaga kerja di dalam maupun luar negeri (orang)	1.241	6.831 <sup>k)</sup>			1.158,5
			2. Jumlah penelitian dan pengembangan kepariwisataan	8	50 <sup>k)</sup>			

**BIDANG PEMBANGUNAN : PEREKONOMIAN**

**PRIORITAS : Peningkatan Ekspor**

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN /LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
a.	Pengembangan SDM Kebudayaan dan Pariwisata	Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia aparatur/industri dan masyarakat bidang kebudayaan dan pariwisata	Jumlah sumber daya yang dilatih di bidang kebudayaan dan pariwisata (orang)	1.150	5.865 <sup>k)</sup>	Program Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata	Kemenbudpar	34,0
b.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Kepariwisataan	Meningkatnya litbang pariwisata dalam mendukung kebijakan pembangunan kepariwisataan	Jumlah penelitian dan pengembangan bidang kepariwisataan	8	50 <sup>k)</sup>	Program Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata	Kemenbudpar	36,0
c.	Pengembangan Pendidikan Tinggi Bidang Pariwisata	Meningkatnya profesionalisme dan daya saing SDM bidang pariwisata di lembaga pendidikan tinggi pariwisata	1. Jumlah program studi	34	42	Program Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata	Kemenbudpar	1.088,5
			2. Jumlah mahasiswa aktif	4.780	27.030 <sup>k)</sup>			
			3. Jumlah dosen	390	500			
			4. Jumlah lulusan pendidikan kepariwisataan di lembaga pendidikan tinggi pariwisata (orang)	1.241	6.831 <sup>k)</sup>			
			5. Jumlah penelitian dosen (naskah/laporan)	79	588 <sup>k)</sup>			
<b>TOTAL</b>								<b>7.903,1</b>

**KETERANGAN :**

<sup>k)</sup> Angka Kumulatif 5 tahun (2010-2014)

**RENCANA TINDAK PRIORITAS BIDANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH TAHUN 2010 - 2014**

**PRIORITAS : PENINGKATAN DAYA BELI MASYARAKAT**

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ EMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
1.	FOKUS : Peningkatan Jaringan Distribusi Untuk Menunjang Pengembangan Logistik Nasional	Meningkatnya efisiensi distribusi barang dan jasa	ranking biaya logistik domestik di Indonesia	92	87		Kementerian Perdagangan	1.109,9
		Menurunnya disparitas harga bahan pokok antar wilayah	rasio variasi harga antar provinsi terhadap variasi harga nasional (standar deviasi/rata-rata harga)	<1	<1			
a.	Peningkatan Kelancaran Distribusi Bahan Pokok (Prioritas Nasional)	Terlaksananya kebijakan dan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kelancaran distribusi dan stabilisasi harga bahan pokok	1.Jumlah rumusan kebijakan dan standar, norma, kriteria dan prosedur di bidang pembinaan pasar dan distribusi (jenis)	6	25 <sup>ki)</sup>	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI	Kementerian Perdagangan	226,8
			2.Jumlah pelaku usaha yang mengikuti pembinaan, pelatihan dan bimbingan teknis (orang)	1920	3000			
			3.Persentase rata-rata perbedaan tingkat harga Bahan Pokok antar provinsi di Indonesia	15%	9%			
			4.Persentase ketersediaan barang kebutuhan pokok bagi masyarakat	90%	98%			
			5.Jumlah perizinan di bidang pembinaan pasar dan distribusi yang dilayani secara online	6	11			
			6.Waktu penyelesaian perizinan dan non perizinan di bidang pembinaan pasar dan distribusi (hari)	6	2			
b.	Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan (Prioritas Nasional)	Terbangunnya sarana distribusi dalam rangka kelancaran distribusi barang pokok	1.Jumlah pengembangan pasar percontohan (unit)	13	26	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI	Kementerian Perdagangan	875,5
			2.Jumlah pembangunan pusat distribusi (unit)	-	4 <sup>ki)</sup>			
			3.Jumlah rekomendasi penataan sistem distribusi (rekomendasi)	2	6			

**PRIORITAS : PENINGKATAN DAYA BELI MASYARAKAT**

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTRIAN/ EMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
c.	Koordinasi Penataan dan Pengembangan Sistem Logistik Nasional	Terkoordinasinya Pelaksanaan Kebijakan Penataan dan Pengembangan Sistem Logistik Nasional	Persentase Rekomendasi hasil koordinasi Kebijakan Penataan dan Pengembangan Sistem Logistik Nasional yang ditindaklanjuti	60%	85%	Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian	Kemenko Perekonomian	7,6
2.	<b>Fokus : Penguatan Pasar Domestik dan Efisiensi Pasar Komoditi</b>	<b>Meningkatnya aktivitas perdagangan domestik</b>	Pertumbuhan PDB riil subsektor perdagangan besar dan eceran	3,4-3,5%	4,8-7,0%		<b>Kementerian Perdagangan</b>	<b>773,2</b>
a.	Pengembangan Kelembagaan dan Pelaku Usaha Perdagangan (Prioritas Bidang)	Terlaksananya kebijakan dan bimbingan teknis di bidang pembinaan kelembagaan dan pelaku usaha di bidang Perdagangan dalam negeri	1.Jumlah rumusan kebijakan pembinaan usaha, lembaga perdagangan dan pendaftaran perusahaan yang disusun (kebijakan) 2.Jumlah perizinan di bidang usaha perdagangan yang dilayani secara online 3.Waktu penyelesaian perizinan dan non perizinan di bidang usaha perdagangan (hari) 4.Jumlah data dan informasi perusahaan (perusahaan) 5.Jumlah pelaku usaha mengikuti pembinaan, pelatihan dan bimbingan teknis (orang) 6.Jumlah waralaba asing yang terdaftar (berdasarkan jumlah Surat Tanda Pendaftaran Waralaba-STPW yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan) 7.Jumlah waralabalokal/UKM yang terdaftar (berdasarkan jumlah Surat Tanda Pendaftaran Waralaba-STPW yang dikeluarkan oleh Disperindag Kabupaten/Kota)	10 6 6 27.500 150 126 51	10 7 2 27.500 300 165 89	Program Pengembangan Dan Pengamanan Perdagangan Dalam Negeri	Kementerian Perdagangan	85,7
b.	Pemberdayaan Dagang Kecil dan Menengah (Prioritas Bidang)	Meningkatnya kreativitas, kapasitas, dan kompetensi UMKM perdagangan	1.Jumlah kebijakan dan pedoman untuk pengembangan usaha UKM mitra binaan (bahan)	4	24 <sup>K)</sup>	Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perdagangan	Kementerian Perdagangan	110,0

**PRIORITAS : PENINGKATAN DAYA BELI MASYARAKAT**

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/L EMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
			2.Jumlah UKM mitra binaan yang diberikan bimbingan teknis, promosi/pemasaran, kemitraan usaha, sarana dagang/sarana usaha produktif, sertifikasi, fasilitasi, pendaftaran serta akses jaringan pembiayaan	1000	1200			
			3.Jumlah UKM yang tercantum pada database PDKM	200	1000			
			4.Jumlah wirausaha baru dalam rangka pemberdayaan masyarakat madani melalui program Bantuan Sarana Usaha Mandiri (BSUM) (UKM)	50	50			
			5.Jumlah kegiatan verifikasi dan evaluasi	6	6			
c.	Pengembangan Ekonomi Kreatif (Prioritas Bidang)	Meningkatnya kontribusi pelaku kreatif (UKM Kreatif dan Insan Kreatif) terhadap PDB Ekonomi Kreatif	1.Persentase PDB ekonomi kreatif terhadap PDB nasional	2%	4%	Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perdagangan	Kementerian Perdagangan	217,5
			2.Persentase UKM kreatif yang mendapat transaksi bisnis di pameran DN & LN	90%	90%			
			3.Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang diberikan promosi/pemasaran, kemitraan, fasilitasi, penghargaan dan akses pembiayaan.(UKM)	400	900			
			4.Persentase pelaku ekonomi kreatif di Indonesia yang tercantum dalam database on-line	20%	20%			
			5.Jumlah brand produk ekonomi kreatif yang dihasilkan	26	93			
d.	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (Prioritas Bidang)	Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri	Jumlah promosi produk dalam negeri (kegiatan)	4	6	Program Pengembangan Dan Penguatan Perdagangan Dalam Negeri	Kementerian Perdagangan	221,8
e.	Pembinaan dan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (Prioritas Bidang)	Meningkatnya hasil pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha dibidang perdagangan berjangka komoditi	1.Persentase kepatuhan penyampaian laporan kegiatan pelaku usaha PBK	85%	95%	Program Peningkatan Efisiensi Pasar Komoditi	Kementerian Perdagangan	37,5
			2.Jumlah hari penyelesaian perizinan pelaku usaha PBK setelah dokumen lengkap	32	20			

**PRIORITAS : PENINGKATAN DAYA BELI MASYARAKAT**

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ EMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
			3.Jumlah Peserta Pelatihan Teknis Pelaku Usaha PBK (orang)	120	250			
			4.Persentase kepatuhan pelaksanaan transaksi	85%	95%			
			5.Jumlah pelaku usaha PBK yang diaudit (perusahaan)	12	20			
f.	Pembinaan dan Pengawasan Pasar Lelang (PL) dan Sistem Resi Gudang (SRG)- (Prioritas Bidang)	Meningkatnya hasil pembinaan dan pengawasan Pasar Lelang dan Sistem Resi Gudang	1.Jumlah pengelola SRG	45	95	Program Peningkatan Efisiensi Pasar Komoditi	Kementerian Perdagangan	100,7
			2.Persentase penanganan masalah PL dan SRG	90%	90%			
			3.Jumlah peserta pelatihan teknis penyelenggara PL dan SRG (orang)	150	150			
			4.Jumlah pemantauan dan evaluasi PL dan SRG(kali)	65	100			
			5.Jumlah hari penyelesaian perizinan pelaku usaha SRG setelah dokumen lengkap	32	20			
3.	Fokus : Peningkatan Efektivitas Pengawasan Dan Iklim Usaha Perdagangan	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan iklim usaha perdagangan	1.Jumlah penegakan hukum persaingan usaha	252	305		Kementerian Perdagangan dan KPPU	741,6
			2.Waktu penyelesaian perizinan dan non perizinan di bidang perdagangan dalam negeri (hari)	6	2			
			3.Jumlah perizinan perdagangan dalam negeri yang dapat dilayani secara online	12	21			

**PRIORITAS : PENINGKATAN DAYA BELI MASYARAKAT**

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTRIAN/ EMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
a.	Penegakan Hukum Persaingan Usaha	Meningkatnya jumlah kegiatan penegakan hukum persaingan usaha sehingga mampu menciptakan kepastian hukum dan iklim usaha yang lebih kondusif	1.peningkatan jumlah kegiatan penanganan pelaporan	60	80	Program Pengawasan Persaingan Usaha	KPPU	70,1
			2.peningkatan jumlah kegiatan pemberkasan dan penanganan perkara persaingan usaha	140	160			
			3.peningkatan jumlah kegiatan litigasi dan monitoring pelaksanaan Putusan KPPU	50	60			
			4.peningkatan jumlah kegiatan penilaian dan notifikasi terhadap rencana merger, akuisisi, dan konsolidasi	2	5			
b.	Pengembangan dan Harmonisasi Kebijakan Persaingan Usaha	Meningkatnya jumlah kegiatan pengembangan dan harmonisasi kebijakan persaingan usaha yang sehat dalam berbagai kebijakan/ peraturan/regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah guna mendorong efisiensi kinerja perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan rakyat	1.peningkatan jumlah kegiatan monitoring pelaku usaha	30	40	Program Pengawasan Persaingan Usaha	KPPU	47,4
			2.peningkatan jumlah kajian sektor industri dan perdagangan	5	28 <sup>K)</sup>			
			3.peningkatan jumlah kegiatan evaluasi kebijakan pemerintah dari perspektif persaingan usaha	16	20			
			4.peningkatan jumlah saran/ pertimbangan yang disampaikan kepada pemerintah/stakeholder	10	14			
			5.peningkatan jumlah perangkat aturan hukum persaingan usaha yang diterbitkan/disahkan	6	32 <sup>K)</sup>			
c.	Pengembangan Kebijakan dan Pemberdayaan Perlindungan Konsumen (Prioritas Bidang)	Terlaksananya kebijakan pemberdayaan perlindungan konsumen	1.Jumlah rumusan kebijakan dan standar norma, kriteria dan prosedur di bidang perlindungan konsumen (rumusan)	5	20 <sup>K)</sup>	Program Pengembangan dan Pngamanan Perdagangan Dalam Negeri	Kementerian Perdagangan	72,5
			2.Jumlah peserta pelatihan Perlindungan Konsumen yang mengikuti pelatihan (orang)	562	872			
			3.Jumlah Layanan Klinik Konsumen	48	96			
			4.Jumlah forum-forum koordinasi perlindungan konsumen	59	65			
			5.Jumlah sosialisasi Perlindungan Konsumen	43	60			

**PRIORITAS : PENINGKATAN DAYA BELI MASYARAKAT**

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/L EMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
			6.Jumlah evaluasi dan pelaporan di bidang Perlindungan Konsumen (laporan)	32	34			
d.	Penguatan Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional (Prioritas Bidang)	Meningkatnya saran dan pertimbangan kepada Pemerintah terkait dengan upaya perlindungan konsumen di Indonesia	1.Jumlah rekomendasi kebijakan dan bahan pertimbangan kepada Pemerintah (rek)	6	42 <sup>1)</sup>	Program Pengembangan Dan Pengamanan Perdagangan Dalam Negeri	Kementerian Perdagangan	84,0
			2.Persentase masyarakat yang memahami perlindungan konsumen	2,50%	12,50%			
			3.Persentase kajian dan telaahan yang dipublikasikan	-	60%			
			4. Persentase isu/pengaduan yang ditangani	70%	80%			
			5.Jumlah supervisi kepada LPKSM dalam aspek pengawasan barang dan advokasi konsumen	-	20			
			6.Jumlah jenis dan pemutakhiran database perlindungan konsumen	-	40			
			7.Jumlah kegiatan fasilitasi, pelatihan dan edukasi serta penyebaran informasi perlindungan konsumen	9	21			



**PRIORITAS : PENINGKATAN DAYA BELI MASYARAKAT**

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/L EMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
e.	Peningkatan Tertib Ukur (Prioritas Bidang)	Meningkatnya pelayanan dan pengawasan di bidang metrologi legal	1.Jumlah rumusan kebijakan metrologi legal yang disusun (kebijakan)	8	40 <sup>K)</sup>	Program Pengembangan Dan Pengamanan Perdagangan Dalam Negeri	Kementerian Perdagangan	350,6
			2.Jumlah UTTP yang memerlukan penanganan khusus yang dapat ditangani untuk ditera dan tera ulang (unit)	8.100	8.100			
			3.Jumlah SDM metrologi legal yang melaksanakan kegiatan metrologi legal seperti tenaga pengamat tera, tenaga penera, tenaga pranata laboratorium, tenaga penguji, PPNS, dan tenaga penyuluh. (orang)	705	1.000			
			4.Jumlah Unit Pelaksana Teknis Daerah yang dinilai dan dibina	20	20			
			5.Jumlah standar milik Unit Pelaksana Teknis dan Unit Pelaksana Teknis Daerah yang telah ditelusur secara nasional	20	20			
			6.Pengadaan Standar dan Peralatan standar BSML di Medan, Makassar, Yogyakarta, dan Banjarmasin (unit)	10	50 <sup>K)</sup>			
			7.Jumlah perizinan di bidang kemetrologian yang dilayani secara online	-	3			
			8.Waktu penyelesaian perizinan dan non perizinan di bidang kemetrologian (hari)	-	2			

**PRIORITAS : PENINGKATAN DAYA BELI MASYARAKAT**

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/L EMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
f.	Peningkatan Efektifitas Pengawasan Barang Beredar dan Jasa (Prioritas Bidang)	Meningkatnya efektifitas pengawasan barang dan jasa	1.Jumlah rumusan kebijakan, standar, norma dan pedoman pengawasan barang dan jasa (kebijakan)	11	55 <sup>K)</sup>	Program Pengembangan Dan Pengamanan Perdagangan Dalam Negeri	Kementerian Perdagangan	117,0
			2.Jumlah kegiatan pengawasan barang dan jasa	7	7			
			3. Jenis barang beredar ber-SNI wajib yang diawasi (notifikasi WTO)	14	46			
			4.Jumlah kegiatan sosialisasi, serta publikasi peraturan dan hasil pengawasan	5	5			
			5.Jumlah diklat dan bimbingan teknis PPNS-PK dan PPBJ (orang)	180	300			
<b>TOTAL</b>								<b>1.851,5</b>

**KETERANGAN :**

<sup>K)</sup> Angka Kumulatif 5 tahun (2010-2014)

**RENCANA TINDAK PRIORITAS BIDANG PEREKONOMIAN**

**BIDANG PEMBANGUNAN: PEREKONOMIAN**

**PRIORITAS : OPTIMALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH DAN PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA**

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTRIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
1.	FOCUS : Optimalisasi Anggaran Belanja Pemerintah Pusat	Terlaksananya fungsi penganggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah	Terwujudnya pengelolaan anggaran negara yang tepat waktu, transparan, dan akuntabel	100%	100%			100,5
a.	Pengelolaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat (ABPP)	Terlaksananya kebijakan penganggaran yang transparan dan akuntabel	1. Pengalokasian belanja pemerintah pusat yang tepat waktu dan efisien 2. Penyediaan anggaran secara tepat waktu dan tepat jumlah untuk menunjang program di bidang pangan, pertanian, dan industri perdesaan sesuai dengan persetujuan 3. PMK No. 261/2008 tentang tatacara penyediaan anggaran, perhitungan, pembayaran, dan pertanggungjawaban subsidi pupuk 4. Dokumen RAPBN-P 2010 tentang perubahan sistem pengelolaan pendanaan BLU Tanah dan <i>Land Capping</i> untuk ditampung dalam APBN-P 2010 5. Peraturan pelaksanaan anggaran R&D berdasarkan program prioritas K/L yang bersangkutan sesuai dengan alokasi anggaran dalam APBN	100%	100%	Pengelolaan Anggaran Negara	Kemenkeu	35,5
				100%	100%			
				-	100%			
				100%	-			
				100%	-			

**PRIORITAS : OPTIMALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH DAN PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA**

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
b.	Pengembangan Sistem Penganggaran	Terlaksananya penerapan sistem penganggaran berorientasi kinerja dan penerapan MTEF	1. Tersedianya norma penganggaran berbasis kinerja dan penerapan MTEF yang kredibel dan tepat waktu 2. Revisi Keppres 80/2003, usulan mengenai percepatan proses pengadaan barang dan jasa, termasuk dalam angka pinjaman luar negeri	100%	100%	Pengelolaan Anggaran Negara	Kemenkeu	47,4
c.	Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain (BSBL)	Tersusunnya Laporan Keuangan BSBL yang transparan dan akuntabel	Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Lain-lain (BSBL) yang lengkap dan tepat waktu	100%	100%	Pengelolaan Anggaran Negara	Kemenkeu	17,6
2.	<b>FOCUS : Pengelolaan Perimbangan Keuangan</b>	<b>1. Peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah</b>  2. Terciptanya tata kelola yang tertib sesuai peraturan perundang-undangan, transparan, kredibel, akuntabel, dan profesional dalam pelaksanaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah	<b>1. Persentase ketepatan jumlah penyaluran dana transfer ke daerah</b>  2. Ketepatan waktu penyelesaian dokumen pelaksanaan penyaluran dana transfer ke daerah  3. Indeks kepuasan Pemda terhadap norma, standar, dan pengelolaan belanja transfer daerah ke pihak eksternal  4. Realisasi janji pelayanan evaluasi Perda/Raperda PDRD ke pihak eksternal dalam bentuk rekomendasi Menteri Keuangan  5. Kajian revisi UU 33/2004 dan PP 54/2005	<b>100%</b>	<b>100%</b>			<b>392,4</b>

**PRIORITAS : OPTIMALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH DAN PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA**

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTRIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
a.	Perumusan kebijakan, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi di bidang pembiayaan dan kapasitas daerah	1. Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Pinjaman Daerah, Hibah Daerah, Obligasi Daerah, dan Investasi Daerah	1. Persentase jumlah kebijakan Pembiayaan dan Kapasitas Daerah yang dapat diimplementasikan	100%	100%	Peningkatan Pengelolaan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah	Kemenkeu	153,4
		2. Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi Penataan Daerah	2. Persentase jumlah konsep kebijakan pembiayaan dan kapasitas daerah sesuai dengan rencana	100%	100%			
		3. Peningkatan Kapasitas Aparat Pengelola Keuangan Daerah	3. Persentase kepatuhan dan penegakan ketentuan/peraturan dibidang hibah ke daerah	80%	85%			
b.	Perumusan kebijakan, bimbingan teknis, dan pengelolaan transfer ke Daerah	1. Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Dana Transfer	1. Persentase ketepatan jumlah penyaluran jumlah dana transfer ke daerah	100%	100%	Peningkatan Pengelolaan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah	Kemenkeu	86,4
		2. Terciptanya Tata Kelola yang Tertib Sesuai Peraturan Perundang-undangan, Transparan, adil, proporsional, Kredibel, Akuntabel, dan Profesional dalam Pelaksanaan Transfer ke Daerah	2. Ketepatan waktu penyelesaian dokumen pelaksanaan penyaluran dana transfer ke daerah	4 hari	3 hari			
c.	Perumusan kebijakan bimbingan teknis, monitoring, dan evaluasi di bidang PDRD	1. Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	1. Persentase jumlah kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dapat diimplementasikan	80%	85%	Peningkatan Pengelolaan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah	Kemenkeu	68,7
		2. Mewujudkan Kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mendukung Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	2. Realisasi janji pelayanan evaluasi Perda/Raperda PDRD ke pihak eksternal dalam bentuk rekomendasi Menteri Keuangan	15 hari	12 hari			

**PRIORITAS : OPTIMALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH DAN PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA**

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
			3. Evaluasi dan rekomendasi Perda dan Raperda PDRD bermasalah	75%	100%			
			4. Program transisi/pengalihan PBB menjadi Pajak Daerah	-	100%			
			5. Pengalihan BPHTB menjadi Pajak Daerah	-	100%			
			6. Penerapan Pajak Rokok menjadi Pajak Daerah	-	100%			
			7. RPP tentang sistem pemungutan pajak daerah	100%	-			
			8. RPKM pemberian sanksi terhadap daerah yang melanggar ketentuan PDRD	100%	-			
			9. Mengkaji penerapan PBBKB di daerah berkaitan dengan harga dan subsidi BBM	100%	-			
d.	Perumusan kebijakan, pemantauan dan evaluasi di bidang pendanaan daerah dan ekonomi daerah, penyusunan laporan keuangan transfer ke daerah, serta pengembangan sistem informasi keuangan daerah	1. Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Dana Desentralisasi, Dana Dekonsentrasi, dan Dana Tugas Pembantuan	1. Persentase jumlah kebijakan Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah sesuai rencana	100%	100%	Peningkatan Pengelolaan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah	Kemenkeu	84,0
		2. Terkendalinya Defisit Anggaran Daerah	2. Persentase penyelesaian laporan hasil evaluasi pendanaan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta perekonomian daerah sesuai rencana	100%	100%			
		3. Terselenggaranya SIKD Nasional yang TRUST (Complete, Reliable, Up to date, Secure, and Accurate)	3. Persentase tersedianya layanan informasi yang lengkap dan terkini pada website dan Mofisda sesuai yang disampaikan oleh penyaji data	80%	90%			

**PRIORITAS : OPTIMALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH DAN PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA**

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
3.	FOCUS : Pengelolaan Perbendaharaan Negara	Meningkatkan pengelolaan keuangan negara secara profesional, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan	1. Persentase ketepatan penarikan dana	50%	80%			471,8
			2. Jumlah penerimaan remunerasi atas penyimpanan, penempatan, dan investasi jangka pendek (Idle Cash KUN)	3 Triliun	16,9 <sup>K)</sup> Triliun			
			3. Persentase ketepatan penyediaan dana untuk membiayai pengeluaran negara	98%	98%			
			4. Persentase realisasi kontribusi RDI/RPD kepada APBN	100%	100%			
			5. Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat	WDP	WTP			
			6. Jumlah LK K/L dan LK BUN yang mendapat opini WTP/WDP dari BPK	78 K/L & PA BUN WTP:50 WDP:28	83K/L & PA BUN WTP:81 WDP:2			
a.	Pembinaan Pelaksanaan Anggaran dan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran	Agar pelaksanaan kegiatan dan pencairan dana dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang direncanakan	Persentase ketepatan penarikan dana	50%	80%	Pengelolaan Perbendaharaan Negara	Kemenkeu	80,2
b.	Peningkatan Pengelolaan Kas Negara	1. Optimalisasi <i>Idle Cash</i> Pemerintah	1. Jumlah penerimaan remunerasi atas penyimpanan, penempatan, dan investasi jangka pendek (Idle Cash KUN)	3 triliun	16,9 triliun <sup>K)</sup>	Pengelolaan Perbendaharaan Negara	Kemenkeu	96,9
		2. Menutup <i>cost of fund</i> pemerintah dalam pembiayaan defisit APBN	2. Persentase ketepatan penyediaan dana untuk membiayai pengeluaran Negara	98%	98%			

**PRIORITAS : OPTIMALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH DAN PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA**

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
		3. Mengukur kinerja pengelolaan kas terkait pelayanan dalam penyaluran dana APBN						
c.	Manajemen Investasi dan Penerusan Pinjaman	Mengoptimalkan penerimaan APBN hasil penerusan pinjaman sehingga mampu mendukung pengelolaan keuangan negara yang berkelanjutan	Persentase realisasi kontribusi RDI/RPD kepada APBN	100%	100%	Pengelolaan Perbendaharaan Negara	Kemenkeu	107,6
d.	Penyelenggaraan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran	1. Menjamin akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban keuangan negara	1. Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat	WDP	WTP	Pengelolaan Perbendaharaan Negara	Kemenkeu	154,9
		2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara	2. Jumlah LK K/L dan LK BUN yang mendapat opini WTP dan WDP dari BPK	78 K/L& PA BUN WTP:50 WDP:28	83K/L& PA BUN WTP:81 WDP:2			
		3. Pengelolaan Keuangan Kementerian memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK		WDP	WTP			
e.	Penyusunan Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah	1. Tersedianya strategi, kebijakan, dan regulasi di bidang pengadaan umum	1. Jumlah peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan umum	2	7 <sup>K)</sup>	Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)	32,2
		2. Tersosialisasinya strategi, kebijakan, dan regulasi di bidang pengadaan umum	2. Jumlah pihak yang mendapatkan sosialisasi	5	25 <sup>K)</sup>			
4.	FOCUS Pengelolaan Kekayaan Negara	Terselenggaranya pengelolaan kekayaan negara, penyelesaian pengurusan Piutang Negara dan pelayanan Lelang yang profesional, tertib, tepat guna, dan optimal serta mampu membangun citra baik bagi stakeholder	1. Jumlah Penerimaan Negara dan penerimaan kembali yang berasal dari pembiayaan APBN					385,4
			- Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	67,7 Miliar	413,33 <sup>K)</sup> Miliar			
			- Bea Lelang	44,04 Miliar	260,01 <sup>K)</sup> Miliar			
			- Penerimaan pembiayaan APBN	350 Miliar	1105 <sup>K)</sup> Miliar			



**PRIORITAS : OPTIMALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH DAN PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA**

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTRIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
			2. Jumlah penyelesaian piutang Negara dan pelayanan lelang					
			- Piutang negara yang dapat diselesaikan	770 Miliar	7109,76 <sup>K)</sup> Miliar			
			- Pokok lelang	3, 15 Triliun	18,57 <sup>K)</sup> Triliun			
			3.Persentase penyelesaian permohonan pengelolaan kekayaan negara, termasuk pemanfaatan aset idle	68%	87,80%			
			4.Persentase BMN yang disertifikasi	-	90%			
a.	Perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, evaluasi dan pengelolaan Barang Milik Negara	Terselenggaranya pengelolaan Barang Milik Negara yang professional, tertib, optima, serta akuntabel	1. Persentase formulasi / pembaruan peraturan perundangan di bidang pengelolaan BMN	80%	100%	Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara, dan Pelayanan Lelang	Kemenkeu	57,0
			2. Persentase penyelesaian permohonan pengelolaan kekayaan Negara, termasuk pemanfaatan aset idle.	70%	82,50%			
			3. Persentase BMN yang akan disertifikasi	-	90%			
			4. Penyelesaian inventarisasi dan penilaian terhadap Barang Milik Negara serta koreksi neraca	-	100%			

**PRIORITAS : OPTIMALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH DAN PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA**

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTRIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
b.	Perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, evaluasi dan pengelolaan Barang Milik Negara dan Kekayaan Negara yang Dipisahkan	Terselenggaranya pengelolaan barang milik negara dan kekayaan negara yang dipisahkan yang professional, tertib, optimal serta akuntabel	1. Persentase formulasi / pembaruan peraturan perundangan di bidang pengelolaan BMN	55%	100%	Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara, dan Pelayanan Lelang	Kemenkeu	39,4
			2. Persentase penyelesaian permohonan pengelolaan kekayaan Negara, termasuk pemanfaatan aset idle.	66%	93%			
			3. Persentase BMN yang akan disertifikasi	-	90%			
			4. Persentase penyelesaian pengelolaan dan penatausahaan Kekayaan Negara Dipisahkan	60%	100%			
			5. Penyelesaian inventarisasi dan penilaian terhadap Barang Milik Negara serta koreksi neraca	-	100%			
c.	Perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, evaluasi dan Pengelolaan Kekayaan Negara Lain-lain	Terselenggaranya pengelolaan kekayaan negara lain lain secara professional, efektif, efisien, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sekaligus mampu mengoptimalkan penerimaan negara yang berasal dari kekayaan negara lain-lain	1. Jumlah formulasi / pembaharuan peraturan perundangan di bidang pengelolaan kekayaan negara lain-lain\	6	20 <sup>K)</sup>	Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara, dan Pelayanan Lelang	Kemenkeu	289,0
			2. Jumlah penyelesaian berkas kekayaan negara lain lain	1770	3970 <sup>K)</sup>			
			3. Jumlah penerimaan kembali (recovery) yang berasal dari pengeluaran pembiayaan APBN	350 Miliar	1105 <sup>K)</sup> Miliar			
			4. Penyelesaian inventarisasi dan penilaian terhadap Barang Milik Negara serta koreksi neraca	-	100%			
<b>TOTAL</b>								<b>1.350,1</b>

**KETERANGAN :**

<sup>K)</sup> Angka Kumulatif 5 tahun (2010-2014)

**RENCANA TINDAK PRIORITAS BIDANG PEREKONOMIAN**

**BIDANG PEMBANGUNAN: PEREKONOMIAN**

**PRIORITAS : PENGELOLAAN APBN YANG BERKELANJUTAN**

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
1.	Perumusan Kebijakan Fiskal, Pengelolaan Pembiayaan Anggaran, dan Pengendalian Resiko	1. Terwujudnya kebijakan fiskal yang <i>sustainable</i> dengan beban risiko fiskal yang terukur dalam rangka stabilisasi dan mendorong pertumbuhan perekonomian  2. Terlaksananya fungsi penganggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah  3. Mengoptimalkan pengelolaan utang pemerintah, baik yang berasal dari Surat Berharga Negara maupun pinjaman dengan biaya dan tingkat risiko yang dikelola dengan baik untuk mendukung kesinambungan fiskal	1. Tingkat akurasi kebijakan fiskal					495,9
			- Rata-rata persentase deviasi asumsi makro	10%	5%			
			- Persentase deviasi target defisit APBN	10%	8%			
			- Persentase deviasi proyeksi pendapatan Negara	4,50%	4%			
			2. Pemenuhan target pembiayaan melalui utang	100%	100%			
			3. Terwujudnya pengelolaan anggaran negara yang tepat waktu, transparan, dan akuntabel	100%	100%			
4. Terpenuhinya struktur portofolio SUN sesuai dengan strategi yang ditetapkan	100%	100%						

**PRIORITAS : PENGELOLAAN APBN YANG BERKELANJUTAN**

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
a.	Perumusan Kebijakan APBN	Tersedianya rekomendasi kebijakan APBN yang <i>sustainable</i> untuk mendukung pembangunan nasional	1. Persentase deviasi target defisit APBN 2. Persentase deviasi proyeksi penerimaan perpajakan 3. Penyempurnaan PMK no.261/2008 tentang tata cara penyediaan anggaran, perhitungan, pembayaran, dan pertanggungjawaban subsidi pupuk 4. Penyempurnaan kebijakan subsidi BBM, listrik dan pupuk agar lebih cepat dan efisien 5. Kajian penerapan PBBKB di daerah berkaitan dengan harga dan subsidi BBM 6. Kajian tentang rasionalisasi subsidi listrik dan subsidi BBM	10% 4,50% - 100% 100% 100%	8% 4% 100% - - -	Program Perumusan Kebijakan Fiskal	Kemenkeu	68,1
b.	Pengelolaan Risiko Fiskal dan Sektor Keuangan	1. Terwujudnya pengelolaan risiko fiskal yang antisipatif dan responsif yang dapat mendukung stabilisasi serta mendorong pertumbuhan perekonomian 2. Tersedianya rekomendasi dan pernyataan risiko fiskal	1. Jumlah risiko fiskal teridentifikasi yang terukur 2. Perubahan sistem pengelolaan pendanaan BLU Tanah dan Land Capping untuk ditampung dalam APBN-P 2010	4 100%	21 <sup>k)</sup> -	Program Perumusan Kebijakan Fiskal	Kemenkeu	66,6
c.	Perumusan Kebijakan Ekonomi	Terwujudnya kebijakan ekonomi makro yang antisipatif dan responsif yang dapat mendukung stabilisasi dan mendorong pertumbuhan perekonomian	Persentase rata rata deviasi proyeksi asumsi makro	10%	5%	Program Perumusan Kebijakan Fiskal	Kemenkeu	93,3
d.	Perumusan Kebijakan Pajak, Kepabeanan, Cukai dan PNBPN	Tersedianya rekomendasi dan rumusan kebijakan pendapatan negara yang mendukung terwujudnya kebijakan fiskal	1. Persentase efektifitas kebijakan pendapatan negara	75%	85%	Program Perumusan Kebijakan Fiskal	Kemenkeu	68,0

**PRIORITAS : PENGELOLAAN APBN YANG BERKELANJUTAN**

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
e	Penyusunan Rancangan APBN	Tersusunnya APBN yang sehat, kredibel, dan berkelanjutan	1. Tersusunnya Draft NK, RAPBN, & RUU APBN (APBN-P) dengan besaran yang akurat dan tepat waktu	100%	100%	Pengelolaan Anggaran Negara	Kemenkeu	26,1
			2. Peraturan pelaksanaan anggaran R&D berdasarkan program prioritas K/L yang bersangkutan sesuai dengan alokasi anggaran dalam APBN	100%	-			
			3. Road Map rasionalisasi subsidi listrik	100%	-			
			4. Roap Map rasionalisasi subsidi BBM	100%	-			
			5. RPP tentang penghapusan PNB	-	100%			
f.	Pengelolaan Pinjaman	Terpenuhinya kebutuhan pembiayaan APBN yang aman melalui pengadaan pinjaman	1. Pemenuhan target pembiayaan melalui pinjaman program	100%	100%	Pengelolaan dan Pembiayaan Utang	Kemenkeu	47,9
			2. Penyelesaian perjanjian pinjaman dan hibah	100%	100%			
g.	Pengelolaan Surat Utang Negara	Terpenuhinya kebutuhan pembiayaan APBN yang aman bagi kesinambungan fiskal melalui pengelolaan Surat Utang Negara (SUN)	1. Pemenuhan target pembiayaan melalui SUN	100%	100%	Pengelolaan dan Pembiayaan Utang	Kemenkeu	44,1
			2. Terpenuhinya struktur portofolio SUN sesuai dengan strategi yang ditetapkan	100%	100%			
h.	Pengelolaan Pembiayaan Syariah	Terpenuhinya kebutuhan pembiayaan APBN yang aman bagi kesinambungan fiskal melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)	1. Pemenuhan target pembiayaan melalui SBSN	100%	100%	Pengelolaan dan Pembiayaan Utang	Kemenkeu	34,0
			2. Terpenuhinya struktur portofolio SBSN sesuai dengan strategi yang ditetapkan	100%	100%			
i.	Pengelolaan Strategi dan Portofolio Utang	Penyediaan strategi pengelolaan utang yang mempertimbangkan aspek biaya dan risiko	1. Tersedianya dokumen Strategi pengelolaan utang	1	6 <sup>K)</sup>	Pengelolaan dan Pembiayaan Utang	Kemenkeu	17,7
			2. Pencapaian target effective cost yang kredibel	100%	100%			

**PRIORITAS : PENGELOLAAN APBN YANG BERKELANJUTAN**

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
j.	Pelaksanaan Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen Utang	Terwujudnya pelaksanaan penyelesaian transaksi, pencatatan, dan pelaporan utang pemerintah yang profesional, efektif, transparan, dan akuntabel	1. Pembayaran utang secara tepat waktu, jumlah, dan sasaran 2. Ketersediaan informasi dalam rangka transparansi pengelolaan utang	100%	100%	Pengelolaan dan Pembiayaan Utang	Kemenkeu	30,0
2.	Peningkatan Dan Optimalisasi Penerimaan Negara	1. Terlaksananya fungsi penganggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah 2. Peningkatan penerimaan pajak negara yang optimal 3. Terciptanya administrator kepabeanan dan cukai yang dapat memberikan fasilitasi terbaik kepada industri, perdagangan, dan masyarakat serta optimalisasi penerimaan	1. Terwujudnya pengelolaan anggaran negara yang tepat waktu, transparan, dan akuntabel 2. Persentase realisasi penerimaan pajak terhadap target penerimaan pajak 3. Persentase realisasi waktu pelayanan terhadap janji waktu pelayanan (quick win) 4. Jumlah Penerimaan Bea dan Cukai 5. Persentase penyelesaian rancangan PMK dan aturan pelaksanaan lainnya terkait sistem pelayanan kepabeanan yang menunjang Sistem Logistik Nasional ( <i>Customs Advance Trade Systems</i> ) 6. Persentase kantor pabean di perbatasan dengan kondisi sarana dan prasarana yang memadai 7. Tersedianya PMK-PMK ttg Pemberian Fasilitas Fiskal sesuai Peraturan Per-UU-an dan skema Pembiayaan Infrastruktur ke & di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) 8. Persentase penyelesaian aplikasi sistem kepabeanan yang terintegrasi dengan portal NSW	100%	100%			3.365,2

**PRIORITAS : PENGELOLAAN APBN YANG BERKELANJUTAN**

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
a.	Pengelolaan PNBPN dan subsidi	Mengoptimalkan keuangan negara di bidang PNBPN dengan tetap menjaga pelayanan kepada masyarakat	1. Tercapainya target penerimaan SDA Migas dan Laba BUMN dalam APBN atau APBN-P 2. Tersusunnya target dan pagu penggunaan PNBPN untuk APBN dan atau APBN-P 3. Terlaksananya pembayaran subsidi energi yang tepat waktu dan jumlah 4. Road Map rasionalisasi subsidi listrik 5. Roap Map rasionalisasi subsidi BBM 6. RPP tentang penghapusan PNBPN 7. Melaksanakan penyempurnaan kebijakan dan peraturan subsidi SOP verifikasi perhitungan subsidi BBM, listrik, dan Pupuk agar lebih cepat dan efisien	95% 100% 100% 100% 100% - -	100% 100% 100% - - 100% 100%	Pengelolaan Anggaran Negara	Kemenkeu	38,8
b.	Peningkatan efektivitas pemeriksaan, dan optimalisasi pelaksanaan penagihan	Pemeriksaan dan Penagihan yang optimal untuk peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dan Peningkatan Penerimaan Pajak	Persentase jumlah Refund Discrepancy dan Penerimaan Pajak dari Pemeriksaan dan Penagihan terhadap Realisasi Penerimaan Pajak	4%	3%	Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak	Kemenkeu	17,1
c.	Perumusan kebijakan di bidang PPN, PBB, BPHTB, KUP, PPSP, dan Bea Materai	Peningkatan efektifitas pembuatan peraturan	1. Persentase penyelesaian usulan pembuatan / Revisi peraturan perundangan terhadap peraturan perundangan yang harus dibuat / direvisi 2. Tersedianya PMK-PMK ttg Pemberian Fasilitas Fiskal sesuai Peraturan Per-UU-an dan skema Pembiayaan Infrastruktur ke & di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	100% -	100% 100%	Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak	Kemenkeu	12,1
d.	Perumusan kebijakan di bidang PPh dan perjanjian kerjasama perpajakan internasional	Peningkatan efektifitas pembuatan peraturan	1. Persentase penyelesaian usulan pembuatan / Revisi peraturan perundangan terhadap peraturan perundangan yang harus dibuat / direvisi	100%	100%	Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak	Kemenkeu	13,3

**PRIORITAS : PENGELOLAAN APBN YANG BERKELANJUTAN**

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
			2. Tersedianya PMK-PMK ttg Pemberian Fasilitas Fiskal sesuai Peraturan Per-UU-an dan skema Pembiayaan Infrastruktur ke & di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	-	100%			
			3. Peraturan pelaksanaan mengenai insentif potongan PPh 5% bagi perusahaan yang melakukan R&D	100%	-			
e.	Peningkatan kualitas pelayanan serta efektivitas penyuluhan dan kehumasan	Tingkat Kepuasan yang Tinggi atas Pelayanan Perpajakan	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dan penyuluhan	72	76	Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak	Kemenkeu	344,8
f.	Perencanaan, pengembangan, dan evaluasi di bidang teknologi, komunikasi dan informasi	Teknologi informasi dan komunikasi yang handal dan tepat guna	Persentase penyelesaian pembangunan dan pengembangan sistem informasi terhadap target	100%	100%	Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak	Kemenkeu	772,6
g.	Pelaksanaan reformasi proses bisnis	Proses Bisnis yang efektif dan efisien	1. Persentase penyelesaian SOP terhadap SOP yang harus dibuat	100%	100%	Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak	Kemenkeu	1.397,2
			2. Persentase penyelesaian proses bisnis/ SOP terhadap proses bisnis/SOP yang harus disempurnakan	100%	100%			
h.	Pengelolaan data dan dokumen Perpajakan	Kepuasan yang tinggi dari pengguna data dan dokumen perpajakan	Persentase penyelesaian pemindaian berkas SPT	71%	79%	Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak	Kemenkeu	146,2



**PRIORITAS : PENGELOLAAN APBN YANG BERKELANJUTAN**

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
i.	Perumusan Kebijakan dan Peningkatan Pengelolaan Penerimaan Bea dan Cukai	1. Terciptanya administrasi penerimaan kepabeanan dan cukai yang tertib dan dapat memberikan fasilitasi terbaik kepada industri, perdagangan, dan masyarakat serta optimalisasi penerimaan	1. Jumlah penerimaan bea dan cukai	100%	100%	Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai	Kemenkeu	19,6
		2. Terwujudnya profesionalisme SDM di bidang penerimaan dan peraturan kepabeanan dan cukai	2. Persentase penyelesaian evaluasi dan rekomendasi, penyempurnaan perancangan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai	70%	80%			
		3. Tercapainya perumusan peraturan di bidang kepabeanan dan cukai	3. Persentase peraturan pelaksanaan di bidang kepabeanan dan cukai yang selaras (tidak bertentangan) dengan perundang-undangan	75%	90%			
		4. Terwujudnya pelayanan yang efisien dan pengawasan yang efektif	4. PMK tentang <i>Authorized Economic Operator</i> (AEO) dan dukungan terkait dengan Sistem Logistik Nasional 5. PMK-PMK tentang pemberian fasilitas fiskal sesuai peraturan perundang-undangan dan skema pembiayaan infrastruktur ke dan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	-	100%			
j.	Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis Bidang Kepabeanan	1. Terwujudnya profesional SDM di bidang Teknis Kepabeanan	1. Frekuensi pemutahiran Database harga I	12x	60x <sup>k)</sup>	Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai	Kemenkeu	6,6

**PRIORITAS : PENGELOLAAN APBN YANG BERKELANJUTAN**

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
		2. Terciptanya pelayanan yang pasti di bidang kepabeanaan kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholders)	2. Presentase ketepatan waktu penyelesaian penetapan nilai pabean dan klasifikasi barang	75%	80%			
			3. Persentase rumusan peraturan yang menjadi keputusan di bidang teknis kepabeanaan	75%	80%			
			4. PMK untuk pengembangan sistem elektronik terkait dengan perijinan investasi di bidang kepabeanaan dan perpajakan	-	100%			
			5. PMK tentang <i>Authorized Economic Operator</i> (AEO) dan dukungan terkait dengan Sistem Logistik Nasional	-	100%			
			6. PMK tentang Kawasan Pelayanan Kepabeanaan Terpadu (KPPT) dalam rangka pengembangan Sistem Logistik	-	100%			
			7. PMK-PMK tentang Pemberian Fasilitas Fiskal sesuai peraturan perundang-undangan dan skema pembiayaan infrastruktur ke dan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	-	100%			
			9. PMK dan Perdirjen mengenai prosedur penetapan nilai pabean termasuk prosedur pengaduan dan keberatan	100%	-			
			10. Penerapan secara konsisten dan pemberian penjelasan kepada pengguna jasa kepabeanaan mengenai SOP tentang penetapan nilai pabean	100%	-			
			11. sistem penanganan pengaduan masyarakat khusus mengenai penetapan nilai pabean	100%	-			

**PRIORITAS : PENGELOLAAN APBN YANG BERKELANJUTAN**

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
k.	Pelaksanaan Pengawasan dan Penindakan atas Pelanggaran Peraturan Perundangan, Intelijen dan Penyidikan Tindak Pidana Kepabeanaan dan Cukai	1. Terciptanya administrator kepabeanaan dan cukai yang dapat memberikan fasilitasi terbaik kepada industri, perdagangan, dan masyarakat serta optimalisasi penerimaan	1. Persentase tindak pidana di bidang kepabeanaan dan cukai yang diserahkan ke kejaksaan	40%	50%	Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanaan dan Cukai	Kemenkeu	596,8
		2. Terciptanya institusi kepabeanaan dan cukai yang dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat	2. PMK tentang Authorized Economic Operator (AEO) dan dukungan terkait dengan Sistem Logistik Nasional	-	100%			
		3. Terwujudnya profesionalisme SDM di bidang intelijen, penindakan dan penyidikan yang handal						
		4. Terwujudnya pengawasan efektif dan pelayanan yang efisien						
<b>3.</b>	<b>Pengelolaan dan Pembinaan BUMN</b>					<b>Kemeneg BUMN</b>	<b>297,7</b>	
a.	Dukungan pelaksanaan program prioritas Pemerintah bidang energi (Prioritas Nasional)	Risalah rapat	Risalah	5	5	Pembinaan BUMN	Kemeneg BUMN	13,8
		Surat persetujuan	Surat	1	1	Pembinaan BUMN	Kemeneg BUMN	
		Laporan hasil monitoring	Laporan	5	5	Pembinaan BUMN	Kemeneg BUMN	
b.	Restrukturisasi BUMN besar / penting / strategis (Prioritas Nasional)	Kajian Restrukturisasi BUMN	Laporan	1	1	Pembinaan BUMN	Kemeneg BUMN	29,2
		Pelaksanaan Restrukturisasi	Laporan	10	10	Pembinaan BUMN	Kemeneg BUMN	20,3
		Monitoring dan Evaluasi	Laporan	6	6	Pembinaan BUMN	Kemeneg BUMN	12,7
e.	Penyusunan best practice GCG	Tersusunnya best practice GCG	paket	1	1	Pembinaan BUMN	Kemeneg BUMN	8,8
f.	Penetapan sistem remunerasi berbasis kinerja di BUMN	Peraturan mengenai sistem remunerasi	Peraturan			Pembinaan BUMN	Kemeneg BUMN	
g.	Penyusunan peraturan mengenai penilaian kinerja di BUMN yang mangacu pada standar internasional	Peraturan mengenai penerapan sistem penilaian yang mengacu kepada standar internasional	Peraturan			Pembinaan BUMN	Kemeneg BUMN	
h.	Kajian, evaluasi dan monitoring pendayagunaan aset BUMN	Inventarisasi dokumen yang terkait dengan pendayagunaan aset	Dokumen	3	3	Pembinaan BUMN	Kemeneg BUMN	16,8
i.	Penetapan target, monitoring, dan evaluasi kinerja BUMN	Risalah rapat RUPS/RPB	Risalah	282	282	Pembinaan BUMN	Kemeneg BUMN	93,5

**PRIORITAS : PENGELOLAAN APBN YANG BERKELANJUTAN**

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
j.	Penetapan peraturan pelaksanaan pemisahan administrasi keuangan PSO dan Perpres tentang SOP pelaksanaan PSO	Peraturan pelaksanaan pemisahan administrasi keuangan PSO dan Perpres tentang SOP pelaksanaan PSO	Peraturan	2		Pembinaan BUMN	Kemeneg BUMN	
k.	Penyusunan peraturan perundangan yang mengarah pada perwujudan pengelolaan BUMN berbasis mekanisme korporasi murni	Terwujudnya harmonisasi peraturan perundangan yang mengarah pada perwujudan pengelolaan BUMN berbasis mekanisme korporasi murni	Peraturan		1	Pembinaan BUMN	Kemeneg BUMN	4,0
l.	Kajian BUMN rugi dan bermasalah	Berkurangnya jumlah BUMN Rugi dan Bermasalah	Laporan	1	1	Pembinaan BUMN	Kemeneg BUMN	25,0
m.	Penyusunan dan pelaksanaan Program Tahunan Privatisasi	Penyusunan Program Tahunan Privatisasi	Laporan	1	1	Pembinaan BUMN	Kemeneg BUMN	10,8
n.	Kajian rightsizing BUMN	Hasil kajian	Laporan	1	1	Pembinaan BUMN	Kemeneg BUMN	4,0
o.	Uji kepatutan dan kelayakan calon Direksi dan Dewan Komisaris	Terpilihnya Direksi dan Komisaris	BUMN	20	20	Pembinaan BUMN	Kemeneg BUMN	25,0
p.	Dukungan pelaksanaan program prioritas Pemerintah bidang ketahanan pangan	Risalah rapat	Risalah	5	5	Pembinaan BUMN	Kemeneg BUMN	18,5
		surat persetujuan	Surat	1	1	Pembinaan BUMN	Kemeneg BUMN	
		Laporan hasil monitoring	Laporan	5	5	Pembinaan BUMN	Kemeneg BUMN	
q.	Dukungan pelaksanaan program prioritas Pemerintah bidang infrastruktur	Risalah rapat	Risalah	5	5	Pembinaan BUMN	Kemeneg BUMN	12,8
		surat persetujuan	Surat	1	1	Pembinaan BUMN	Kemeneg BUMN	
		Laporan hasil monitoring	Laporan	5	5	Pembinaan BUMN	Kemeneg BUMN	
<b>TOTAL</b>								<b>4.158,8</b>

**KETERANGAN :**

<sup>k)</sup> Angka Kumulatif 5 tahun (2010-2014)

**RENCANA TINDAK PRIORITAS BIDANG PEREKONOMIAN**

**BIDANG PEMBANGUNAN: PEREKONOMIAN**

**PRIORITAS : STABILITAS SEKTOR KEUANGAN**

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTRIAN/L EMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
<b>I</b>	<b>FOCUS : Peningkatan Ketahanan Dan Daya Saing Sektor Keuangan</b>							375,7
a.	Koordinasi Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR)	Meningkatnya Koordinasi Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR)	Persentase Rekomendasi hasil koordinasi Kebijakan KUR yang terimplementasikan	60%	80%	Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian	Kemenko Perekonomian	3,1
b.	Koordinasi Penyusunan Skim Pembiayaan Kredit, Asuransi, dan Remitansi untuk Pekerja Migran	Meningkatnya Koordinasi Penyusunan Skim Pembiayaan Kredit, Asuransi, dan Remitansi untuk Pekerja Migran	Persentase Rekomendasi hasil koordinasi Kebijakan Koordinasi Pembiayaan Kredit, Asuransi, dan Remitansi untuk Pekerja Migran yang diimplementasikan	60%	80%	Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian	Kemenko Perekonomian	1,9
c.	Perumusan Peraturan, Penetapan Sanksi dan Pemberian Bantuan Hukum	1. Terciptanya regulasi di bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank yang mampu menjamin kepastian hukum, adil, dan transparan	1. Persentase jumlah regulasi di bidang pasar modal dan LKNB yang memenuhi asas peraturan perundang-undangan yang baik.	90%	90%	Program Pengaturan, Pembinaan dan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank	Kemenkeu	align="right">27,2
2. Terwujudnya penegakan hukum di bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank yang obyektif dan efektif		2. Persentase jumlah sanksi administrasi atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Jasa Keuangan yang obyektif.	97%	97%				
3. Terjaganya kredibilitas Bapepam dan LK dengan mengamankan seluruh kebijakan yang telah diambil melalui pelaksanaan Litigasi yang taktis dan efektif.		3. Persentase jumlah perkara/litigasi yang diselesaikan dengan baik.	50%	50%				
d.	Riset Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank serta Pengembangan Teknologi Informasi	1. Terwujudnya kebijakan berbasis riset dan sistem pengawasan yang berbasis teknologi informasi terhadap industri pasar modal dan jasa keuangan non bank	1. Persentase penyelesaian jumlah laporan hasil riset yang tepat dan akurat di bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sesuai rencana	100%	100%	Program Pengaturan, Pembinaan dan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank	Kemenkeu	25,7

**PRIORITAS : STABILITAS SEKTOR KEUANGAN**

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTRIAN/ EMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
		2. Terwujudnya industri pasar modal dan jasa keuangan non bank yang kredibel sebagai penggerak perekonomian nasional dan berdaya saing global	2. Persentase jumlah sistem yang terimplementasi sesuai dengan rencana	60%	80%			
e.	Pemeriksaan dan penyidikan di bidang Pasar Modal	1. Terciptanya penegakan hukum di bidang pasar modal yang kredibel	1. Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan yang dapat diterima oleh Ketua atau Komite Penetapan Sanksi dan Keberatan (KPSK)	80%	90%	Program Pengaturan, Pembinaan dan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank	Kemenkeu	34,0
		2. Terwujudnya kepastian hukum di bidang Pasar Modal dan memberikan perlindungan bagi pemodal dan masyarakat	2. Persentase penyelesaian perilaku pelaku Pasar Modal yang menyimpang:					
			a. Penyelesaian pelanggaran terhadap kewajiban pelaporan, baik berkala maupun insidental sesuai target waktu (keterlambatan penyampaian pelaporan)	90%	98%			
			b. Penyelesaian pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang memerlukan Surat Perintah Pemeriksaan sesuai target waktu	70%	90%			
			c. Penyelesaian pelanggaran terhadap ketentuan pidana di bidang Pasar Modal yang memerlukan Surat Perintah Penyidikan sesuai target waktu	50%	70%			
f.	Pengaturan, Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pengelolaan Investasi	1. Terwujudnya Biro Pengelolaan Investasi sebagai salah satu biro yang kredibel, akuntabel dan transparan	1. Capaian pelaksanaan pemeriksaan dalam satu tahun:			Program Pengaturan, Pembinaan dan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank	Kemenkeu	20,8
		2. Terwujudnya industri pengelolaan investasi yang tangguh dan berdaya saing global	a. Persentase pemeriksaan kepatuhan terhadap Manajer Investasi sesuai rencana	100%	100%			
			b. Persentase pemeriksaan kepatuhan terhadap Agen Penjual Efek Reksa Dana sesuai rencana	100%	100%			

**PRIORITAS : STABILITAS SEKTOR KEUANGAN**

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ EMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)					
				2010	2014								
			2. Persentase layanan yang memenuhi target SOP:										
			a. Layanan Pendaftaran Reksa Dana yang memenuhi target SOP	100%	100%								
			b. Layanan Perizinan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana yang memenuhi target SOP	90%	90%								
g.	Pengaturan, Pembinaan dan Pengawasan Bidang Transaksi dan Lembaga Efek	1. Terwujudnya Biro Transaksi dan Lembaga Efek sebagai salah satu biro di Bapepam-LK yang kredibel, akuntabel dan transparan 2. Terwujudnya Lembaga Efek yang berkualitas dan berdaya saing global serta Transaksi Efek yang teratur, wajar dan efisien	1. Persentase lama proses perijinan yang sesuai dengan target SOP. a. Proses perijinan Wakil Perantara Pedagang Efek. b. Proses perijinan Wakil Penjamin Emisi Efek 2. Persentase jumlah pemeriksaan Lembaga Efek yang dilaksanakan dibandingkan dengan yang direncanakan. 3. Persentase tingkat penyelesaian penelaahan hasil pengawasan transaksi efek yang dindikasikan tidak wajar	90%	100%	90%	100%	100%	67%	70%	Program Pengaturan, Pembinaan dan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank	Kemenkeu	28,1
h.	Penelaahan dan Pemantauan Perusahaan Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Jasa	1. Meningkatnya tata kelola Perusahaan yang baik atas Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Jasa 2. Meningkatnya jumlah Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Jasa	1. Persentase jumlah Laporan Keuangan Tahunan, Laporan Keuangan Tengah Tahunan, dan Laporan Tahunan yang ditelaah sesuai dengan rencana 2. Persentase jumlah pemrosesan Penyataan Pendaftaran sesuai SOP 3. Diterbitkannya produk regulasi terkait penyederhanaan proses dan persyaratan Penawaran Umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	Program Pengaturan, Pembinaan dan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank	Kemenkeu	14,4

**PRIORITAS : STABILITAS SEKTOR KEUANGAN**

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTRIAN/ EMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
i.	Penelaahan dan Pemantauan Perusahaan Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Riil	1. Meningkatnya tata kelola perusahaan yang baik atas Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Riil	1. Persentase jumlah Laporan Keuangan Tahunan, Laporan Keuangan Tengah Tahunan dan Laporan Tahunan yang ditelaah sesuai dengan rencana	100%	100%	Program Pengaturan, Pembinaan dan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank	Kemenkeu	14,8
		2. Meningkatnya jumlah Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Riil	2. Persentase jumlah pemrosesan Pernyataan Pendaftaran sesuai SOP 3. Diterbitkannya produk regulasi terkait penyederhanaan proses dan persyaratan Penawaran Umum	100%	100%			
j.	Pengaturan dan Pengawasan di bidang Lembaga Pembiayaan dan Penjaminan	1. Membangun otoritas Lembaga Pembiayaan dan Penjaminan yang profesional yang mampu mewujudkan industri jasa pembiayaan dan penjaminan sebagai penggerak ekonomi nasional yang tangguh dan berdaya saing tinggi	1. Persentase jumlah kebijakan di bidang pembiayaan dan penjaminan yang dihasilkan	100%	100%	Program Pengaturan, Pembinaan dan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank	Kemenkeu	23,5
		2. Terwujudnya industri jasa pembiayaan dan penjaminan yang sehat, kuat dan kompetitif dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat	2. Persentase jumlah peraturan di bidang pembiayaan dan penjaminan yang dihasilkan	100%	100%			
		3. Persentase perizinan perusahaan pembiayaan dan penjaminan sesuai SOP	100%	100%				
k.	Pengaturan, Pembinaan, dan Pengawasan bidang Perasuransian	1. Terwujudnya Biro perasuransian yang memegang teguh prinsip akuntabilitas dan integritas	1. Persentase jumlah rumusan peraturan di bidang perasuransian sesuai rencana	100%	100%	Program Pengaturan, Pembinaan dan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank	Kemenkeu	39,0
		2. Meningkatnya peran dan kualitas pelaku industri perasuransian	2. Persentase layanan pemberian izin usaha asuransi dan reasuransi yang memenuhi target SOP	100%	100%			
		3. Persentase jumlah laporan keuangan perusahaan asuransi dan reasuransi yang telah dianalisis sesuai dengan target waktu	100%	100%				



**PRIORITAS : STABILITAS SEKTOR KEUANGAN**

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ EMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
l.	Pengaturan, Pembinaan, dan Pengawasan Bidang Dana Pensiun	1. Terwujudnya Biro Dana Pensiun sebagai lembaga yang memegang teguh prinsip-prinsip tata kelola yang baik ( <i>good government governance</i> )	1. Persentase pengesahan pembentukan dana pensiun yang sesuai dengan SOP	100%	100%	Program Pengaturan, Pembinaan dan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank	Kemenkeu	34,8
		2. Terwujudnya industri dana pensiun sebagai penopang pembangunan ekonomi nasional dan sarana untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat di hari tua	2. Persentase jumlah laporan hasil analisis sesuai rencana	100%	100%			
			3. Persentase jumlah pemeriksaan langsung sesuai rencana	100%	100%			
m.	Pengembangan Riset dan Analisis Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme	1. Hasil riset (analisis strategis, tipologi, dan statistik) yang berkualitas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pendanaan terorisme.	a. Jumlah laporan analisis strategis dan tipologi.	4 laporan	20 laporan <sup>k)</sup>	Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme	PPATK	47,4
			b. Persentase informasi hasil riset yang dapat menggambarkan perkembangan, pemetaan, dan modus pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia.	100%	100%			
		2. Hasil analisis yang berkualitas dan bermanfaat bagi penyidik dan instansi pengguna lainnya terkait pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pendanaan terorisme	a. Jumlah laporan hasil analisis yang disampaikan kepada penyidik dan instansi lainnya.	250 laporan	1.400 laporan <sup>k)</sup>			
			b. Persentase hasil analisis awal terhadap seluruh LTKM yang diterima dan telah dikategorikan ( <i>high, medium, low</i> ).	85%	90%			
n.	Pelaksanaan Kerjasama Nasional dan Internasional di Bidang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan pendanaan terorisme.	1. Kerjasama dengan instansi dalam dan luar negeri sebagai upaya penguatan kebijakan anti pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia.	a. Jumlah instansi yang secara formal melakukan kerjasama dengan PPATK dalam bentuk Nota Kesepahaman (MoU).	4 MOU	20 MOU <sup>k)</sup>	Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Teroris	PPATK	35,6
			b. Persentase terimplementasikannya kerjasama dengan instansi dalam negeri dalam upaya penguatan kebijakan anti pencucian uang dan pendanaan teroris di Indonesia.	70%	80%			

**PRIORITAS : STABILITAS SEKTOR KEUANGAN**

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ EMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
o.	Penelaahan dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pemberian pendapat dan bantuan hukum terkait TPPU dan pendanaan terorisme.	1. Pendapat dan bantuan hukum terkait TPPU dan pendanaan terorisme.	a. Jumlah dokumen pendapat hukum terkait masalah TPPU dan pendanaan teroris maupun masalah terkait lainnya.	24 dokumen	144 dokumen <sup>KJ</sup>	Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Teroris	PPATK	32,9
			b. Persentase pemberian pendapat hukum terkait masalah TPPU dan pendanaan teroris maupun masalah terkait lainnya oleh internal dan eksternal PPATK.	100%	100%			
		2. Rancangan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksana terkait masalah TPPU serta rancangan peraturan dan kebijakan internal PPATK.	Jumlah rancangan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksana terkait masalah TPPU, pendanaan teroris dan masalah terkait lainnya serta rancangan peraturan dan kebijakan internal PPATK terkait implementasi UU TPPU dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya	12 dokumen	72 dokumen <sup>KJ</sup>			
p.	Pengawasan Kepatuhan terhadap Pihak Pelapor dalam menyampaikan kewajiban pelaporan ke PPATK.	Kepatuhan Pihak Pelapor dalam memenuhi kewajiban penyampaian laporan ke PPATK.	a. Jumlah pelaksanaan audit kepatuhan terhadap Pihak Pelapor.	75 PJK	375 PJK <sup>KJ</sup>	Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Teroris	PPATK	12,5
			a. Persentase kesesuaian laporan yang diterima dari Pihak Pelapor dengan pedoman tata cara pelaporan.	99%	100%			
<b>TOTAL</b>								<b>375,7</b>

**KETERANGAN :**

<sup>KJ</sup> Angka Kumulatif 5 tahun (2010-2014)

**TABEL 2.2**  
**RENCANA TINDAK PRIORITAS BIDANG**  
**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH TAHUN 2010 - 2014**

**PRIORITAS : STABILITAS MONETER**

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTRIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
I.	<b>FOCUS : Peningkatan Stabilitas Rupiah dan nilai Tukar</b>	Meningkatnya Stabilitas Rupiah dan nilai Tukar					Kemenko Perekonomian	109,1
a.	Koordinasi Kebijakan Makro	Meningkatnya koordinasi kebijakan makro yang mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi	Persentase pelaksanaan rencana tindak kebijakan makro yang tepat waktu	50%	75%	<b>Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian</b>	Kemenko Perekonomian	3,0
b.	Koordinasi Kebijakan Pasar Modal, Perbankan Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Meningkatnya koordinasi kebijakan pasar modal, perbankan dan lembaga keuangan bukan bank yang mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi	Persentase pelaksanaan rencana tindak kebijakan pasar modal, perbankan, dan lembaga keuangan bukan bank yang tepat waktu	60%	80%	<b>Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian</b>	Kemenko Perekonomian	3,5
c.	Koordinasi Kebijakan Ketahanan Pangan	Meningkatnya koordinasi urusan ketahanan pangan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi kebijakan bidang ketahanan pangan yang terimplementasikan	50%	90%	<b>Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian</b>	Kemenko Perekonomian	19,5
d.	Koordinasi Kebijakan Bidang Perkebunan dan Hortikultura	Meningkatnya Koordinasi kebijakan di bidang Perkebunan dan Hortikultura	Persentase Rekomendasi hasil koordinasi kebijakan perkebunan dan hortikultura yang diimplementasikan	85%	100%	<b>Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian</b>	Kemenko Perekonomian	11,6
e.	Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Urusan Perikanan dan Peternakan	Meningkatnya Koordinasi kebijakan di bidang Pengembangan Urusan Perikanan dan Peternakan	Persentase Rekomendasi hasil kordinasi kebijakan Pengembangan Urusan Perikanan dan Peternakan yang diimplementasikan	85%	100%	<b>Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian</b>	Kemenko Perekonomian	11,8
f.	Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pengembangan Bahan Bakar Nabati	Meningkatnya koordinasi kebijakan pengembangan bahan bakar nabati	Persentase rekomendasi kebijakan hasil koordinasi pengembangan bahan bakar nabati yang diimplementasikan	40%	75%	<b>Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian</b>	Kemenko Perekonomian	4,7
g.	Koordinasi Pengembangan Desa Mandiri Energi	Meningkatnya koordinasi pengembangan Desa Mandiri Energi	Persentase rekomendasi hasil koordinasi kebijakan Desa Mandiri Energi yang diimplementasikan	40%	70%	<b>Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian</b>	Kemenko Perekonomian	5,7

**PRIORITAS : STABILITAS MONETER**

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/L EMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
h.	Koordinasi Dan Sinkronisasi Kebijakan Bidang Percepatan Penyediaan Dan Pemanfaatan Energi Alternatif	Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi implementasi kebijakan bidang penyediaan dan pemanfaatan energi alternatif	Persentase rekomendasi hasil Koordinasi Dan Sinkronisasi Kebijakan Bidang Percepatan Penyediaan Dan Pemanfaatan Energi Alternatif yang terimplementasi	50%	90%	Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian	Kemenko Perekonomian	30,0
i.	Koordinasi Pengembangan Urusan Infrastruktur Transportasi	Meningkatnya Koordinasi Urusan Infrastruktur Transportasi	Persentase rekomendasi hasil koordinasi kebijakan Urusan Infrastruktur Transportasi yang terimplementasi	60%	85%	Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian	Kemenko Perekonomian	19,3
<b>TOTAL</b>								<b>109,1</b>

**KETERANGAN :**

<sup>k)</sup> Angka Kumulatif 5 tahun (2010-2014)

**RENCANA TINDAK PRIORITAS BIDANG PEREKONOMIAN**

**BIDANG PEMBANGUNAN: PEREKONOMIAN**

**PRIORITAS BIDANG: Revitalisasi Industri**

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/L EMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)	
				2010	2014				
<b>I</b>	<b>FOCUS : Penumbuhan Populasi Usaha Industri</b>	<b>Tumbuhnya populasi industri yang kuat dan sehat</b>						2.782,3	
1	Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kimia Dasar	Tumbuh dan kuatnya struktur industri kimia dasar	Pada akhir tahun 2014, utilisasi kapasitas produksi pulih mencapai 100%	40%	100%	Program Revitalisasi Dan Penumbuhan Basis Industri Manufaktur	Kemenperin	64,0	
			Nilai tambah produk kimia dasar	20%	50%			35,0	
a.	a.Revitalisasi Industri Pupuk (PN5)	Fasilitasi pembangunan restrukturisasi 5 pabrik pupuk urea baru dan 5 pabrik pupuk NPK	Persen Kemajuan	20%	100%			29,0	
	b.	Pengembangan kluster industri berbasis migas, kondensat di Jawa Timur dan Kalimantan Timur (PN8)	Berkembangnya kluster industri berbasis migas	Jumlah Lokasi (Jawa Timur dan Kalimantan)	2	2			
			Entitas Kolaborasi Kluster	152	152				
2	Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Material Dasar dan Permesinan	Tumbuh dan kuatnya struktur industri material dasar permesinan	Pada akhir tahun 2014, utilisasi kapasitas produksi pulih mencapai 100%	40%	100%	Program Revitalisasi Dan Penumbuhan Basis Industri Manufaktur	Kemenperin	1.831,9	
			Meningkatnya jumlah populasi industri material dasar dan permesinan	9	104 <sup>K)</sup>				
		Berkembangnya kluster industri baja, listrik, TPT, mesin dan peralatan umum	Jumlah entitas kolaborasi kluster baja, listrik, TPT, mesin dan peralatan umum	123	528				
		Terwujudnya peremajaan permesinan industri	Jumlah perusahaan	158	968 <sup>K)</sup>				
3	Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Bahan Bangunan dan Konstruksi	Tumbuh dan kuatnya struktur industri bahan bangunan dan konstruksi	Pada akhir tahun 2014, utilisasi kapasitas produksi pulih mencapai 100%	40%	100%	Program Revitalisasi Dan Penumbuhan Basis Industri Manufaktur	Kemenperin	45,7	
			Meningkatnya jumlah populasi industri bahan bangunan dan konstruksi	100%	105%				

**BIDANG PEMBANGUNAN: PEREKONOMIAN**

**PRIORITAS BIDANG: Revitalisasi Industri**

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTRIAN/L EMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
a.	Pengembangan Kluster Industri Bahan Bangunan Konstruksi	Berkembangnya kluster industri semen dan industri keramik	Jumlah entitas kolaborasi kluster industri semen dan industri keramik	42	324			
4	Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Aneka dan Alat Pertanian	Tumbuh dan kuat struktur industri aneka dan alat pertanian	Pada akhir tahun 2014, utilisasi kapasitas produksi pulih mencapai 100%	40%	100%	Program Revitalisasi & Penumbuhan Basis Industri Manufaktur	Kemenperin	23,0
			Nilai tambah produk industri aneka dan alat pertanian	100%	120%			
		Berkembangnya kluster industri Alas Kaki	Jumlah entitas kolaborasi kluster	46	226			
5	Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Makanan	Tumbuhnya industri Makanan	Pada akhir tahun 2014, utilisasi kapasitas produksi pulih mencapai 85% sebagaimana sebelum krisis		85%	Program Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Agro	Kemenperin	39,2
a.	Revitalisasi Industri Gula (PNS)	Terlaksananya restrukturisasi 3 perusahaan industri permesinan dalam negeri pendukung PG	Jumlah Pabrik	3	3	Program Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Agro	Kemenperin	9,0
		Fasilitasi pembangunan pabrik gula baru	Jumlah Pabrik	10	11			
b.	Pengembangan Kluster Industri Pengolahan Kelapa, Kakao, dan Gula	Berkembangnya kluster industri pengolahan kelapa, kakao, dan gula	Jumlah instansi dan perusahaan terkait industri kelapa, kakao, dan gula	160	160	Program Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Agro	Kemenperin	30,2
			Beroperasinya masing-masing 1 unit peralatan pengolahan kelapa dan kakao	2	2			
6	Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan	Tumbuh industri Hasil Hutan dan Perkebunan	Pada akhir tahun 2014, utilisasi kapasitas produksi pulih mencapai 85% sebagaimana sebelum krisis		85%			216,8
a.	Pengembangan kluster industri berbasis pertanian, oleochemical di Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Riau (PNL2)	Berkembangnya kluster industri	Jumlah perusahaan di 3 kawasan	40	100	Program Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Agro	Kemenperin	30,4

**BIDANG PEMBANGUNAN: PEREKONOMIAN**

**PRIORITAS BIDANG: Revitalisasi Industri**

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/L EMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
			Jumlah kawasan	0	3			
			unit pilot project berbasis hasil samping / limbah sawit	1	1			
b.	Pengembangan Klaster Industri Karet, Kelapa Sawit, Furniture, dan Kertas	Berkembangnya klaster industri karet, kelapa sawit furniture dan kertas	Jumlah instansi dan perusahaan terkait	140	145	Program Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Agro	Kemenperin	109,7
			Mesin peralatan dalam rangka meningkatkan mutu produk karet	2	2			
			Terminal Kayu & Rotan	2	9 <sup>κ)</sup>			
			Peralatan pensortir kertas bekas		4 <sup>κ)</sup>			
c.	Pengembangan Industri Bahan Bakar Nabati	Teknologi dan pemanfaatan bahan bakar nabati	Unit Peralatan	4	12 <sup>κ)</sup>	Program Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Agro	Kemenperin	76,0
7	Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Hasil Laut	Tumbuhnya industri hasil laut	Pada akhir tahun 2014, utilisasi kapasitas produksi pulih mencapai 75% sebagaimana sebelum krisis		75%	Program Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Agro	Kemenperin	33,7
a.	Pengembangan Klaster Industri Pengolahan Ikan	Berkembangnya klaster industri pengolahan ikan	Jumlah instansi dan perusahaan terkait	50	50			4,5
			Peralatan pengolahan ikan	1	5 <sup>κ)</sup>			11,7
b.	Pengembangan Industri Berbasis Rumput Laut	Berkembangnya industri berbasis rumput laut	Wilayah	3	3			17,5
8	Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Minuman dan Tembakau	Tumbuhnya industri minuman dan tembakau	Pada akhir tahun 2014, utilisasi pulih mencapai 87,5% sebagaimana sebelum krisis		87,50%	Program Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Agro	Kemenperin	71,5
a.	Pengembangan Klaster Industri Pengolahan Tembakau, Buah, Kopi, dan Susu	Berkembangnya klaster industri pengolahan tembakau, buah, kopi, dan susu	Jumlah instansi dan perusahaan terkait industri pengolahan tembakau, buah, kopi dan susu	180	195			23,6

**BIDANG PEMBANGUNAN: PEREKONOMIAN**

**PRIORITAS BIDANG: Revitalisasi Industri**

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTRIAN/L EMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
			Peralatan peningkatan efisiensi pengolahan tembakau (tungku)	40	50			4,8
			Mesin dan peralatan pengolahan buah	2	6 <sup>k)</sup>			5,3
			Mesin dan peralatan pengolahan kopi	2	18 <sup>k)</sup>			18,0
			Unit peralatan utk peningkatan mutu susu	5	5			9,8
			Pabrik susu		1			10,0
9	Fasilitasi Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (PN7)	Meningkatnya Fasilitasi Pengembangan Kawasan Zona Industri di 5 KEK	Dokumen Fasilitasi (AMDAL, Engineering Design/DED, dan kelembagaan) di 5 kawasan	5	5	Program Pewilayahan Industri	Kemenperin	32,4
<b>II</b>	<b>FOCUS : Penguatan Struktur Industri</b>	<b>Penumbuhkembangan klaster industri dan pembinaan IKM yang terintegrasi dengan industri skala besar</b>						<b>1.780,8</b>
1	Pengembangan IKM melalui pendekatan Klaster	Meningkatnya kemampuan desain, manajemen dan kreatifitas perajin	Terlaksananya implementasi kolaborasi dan kelembagaan klaster industri garam, fashion dan batik, batu mulia dan perhiasan, gerabah dan keramik hias, minyak atsiri dan makanan ringan yang semakin kuat. Terbentuknya jaringan kerjasama bisnis dan pengembangan Industri Kreatif	22 lokasi	39 lokasi	Program Revitalisasi dan Penumbuhan IKM	Kemenperin	82,9
2	Penyebaran dan Pengembangan IKM di Kawasan Barat Indonesia	Terbinanya Pengembangan IKM di Kawasan Barat Indonesia	Meningkatnya Unit Usaha dan Tenaga Kerja	16 Prov 32 Kab/ Kota	16 Prov 32 Kab/ Kota	Program Revitalisasi dan Penumbuhan IKM	Kemenperin	775,8
			Terbinanya Produk IKM Pangan, Sandang, KBB dan Kerajinan melalui pendekatan OVOP	18 Kab/ Kota di 6 Pro-pinsi	18 Kab/ Kota di 6 Pro-pinsi			



**BIDANG PEMBANGUNAN: PEREKONOMIAN**

**PRIORITAS BIDANG: Revitalisasi Industri**

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/L EMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
3	Penyebaran dan Pengembangan IKM di Kawasan Tengah Indonesia	Terbinanya Pengembangan IKM di Kawasan Tengah Indonesia	Meningkatnya Unit Usaha dan Tenaga Kerja	12 Prop	12 Prop	Program Revitalisasi dan Penumbuhan IKM	Kemenperin	562,3
				28 Kab /Kota	28 Kab /Kota			
			Terbinanya Produk IKM Pangan, Sandang, KBB dan Kerajinan melalui pendekatan OVOP	12 Kab/ Kota di 7 Pro-pinsi	12 Kab/ Kota di 7 Pro-pinsi			
4	Penyebaran dan Pengembangan IKM di Kawasan Timur Indonesia	Terbinanya Pengembangan IKM di Kawasan Timur Indonesia	Meningkatnya Unit Usaha dan Tenaga Kerja	5 Prop	5 Prop	Program Revitalisasi dan Penumbuhan IKM	Kemenperin	247,7
			Terbinanya Produk IKM Pangan, Sandang, KBB dan Kerajinan melalui pendekatan OVOP	8 Kab/ Kota	8 Kab/ Kota			
5	Peningkatan Promosi Investasi dan Pemasaran Industri	Meningkatnya fasilitasi promosi investasi dan pemasaran industri	Jumlah paket promosi investasi (temubisnis, eksibisi, dll)	2	11	Program Kerjasama Industri Internasional	Kemenperin	23,3
6	Pengembangan Standardisasi Industri dan Manajemen HAKI	Meningkatnya RSNI	Jumlah RSNI	100	500 <sup>ko</sup>	Program Kebijakan, Iklim Usaha, Mutu, dan Industri Hijau	Kemenperin	48,0
		Meningkatnya hasil litbang yang dipatenkan	Hasil litbang yang dipatenkan	5	25 <sup>ko</sup>			19,2
7	Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Publik	Meningkatkan profesionalisme aparatur yang tercermin dengan meningkatnya pelayanan kepada pemangku kepentingan dengan lebih cepat, singkat dan transparan	Peningkatan waktu pelayanan	-	95%	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Kemenperin	21,7
a.	Reformasi Birokrasi di Bidang Pelayanan Umum							
III	<b>FOCUS : Peningkatan Produktifitas Industri</b>	<b>Meningkatnya nilai tambah produk melalui penerapan iptek</b>						<b>267,1</b>

**BIDANG PEMBANGUNAN: PEREKONOMIAN**

**PRIORITAS BIDANG: Revitalisasi Industri**

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/L EMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
1	Pengembangan Industri Alat Angkut	Tercapainya penguasaan dan pengembangan teknologi di Bidang Alat Angkut secara berkesinambungan	Jumlah Perusahaan klaster industri kendaraan bermotor	100	200	Program Penumbuhan Industri Unggulan Berbasis Iptek	Kemenperin	148,3
			Jumlah Perusahaan klaster industri perkapalan	75	122			
			Jumlah Perusahaan klaster industri kedirgantaraan	1	1			
			Jumlah Perusahaan klaster industri perkeretaapian	1	1			
2	Pengembangan Industri Elektronika dan Telematika	Tercapainya penguasaan dan pengembangan teknologi di Bidang Telematika secara berkesinambungan	Jumlah Perusahaan dalam klaster industri elektronika	60	100	Program Penumbuhan Industri Unggulan Berbasis Iptek	Kemenperin	118,8
			Jumlah Perusahaan dalam klaster industri telekomunikasi	3	7			
			Jumlah Perusahaan dalam klaster industri komputer	3	7			
			Jumlah Perusahaan dalam klaster industri konten multimedia	5	9			
<b>TOTAL</b>								<b>4.830,2</b>

**KETERANGAN :**

<sup>KJ</sup> Angka Kumulatif 5 tahun (2010-2014)

**RENCANA TINDAK PRIORITAS BIDANG PEREKONOMIAN**

**BIDANG PEMBANGUNAN: PEREKONOMIAN**

**PRIORITAS: Daya Saing Ketenagakerjaan**

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil <i>outcomes</i> /output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
I.	FOKUS: Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Tenaga Kerja	Meningkatkan daya saing dan posisi tawar tenaga kerja  Meningkatkan produktivitas tenaga kerja, terutama di sektor industri pengolahan	Jumlah tenaga kerja yang kompeten					8.693,2
			Biaya tenaga kerja per nilai tambah sektor industri pengolahan					
a.	Pengembangan Standardisasi Kompetensi Kerja dan Program Pelatihan	Tersusunnya standar kompetensi kerja nasional yang sesuai dengan kebutuhan pengguna sektor industri manufaktur dan sektor non-industri manufaktur	Peta kompetensi industri sesuai kebutuhan pengguna		Survey dan pemetaan sektor manufaktur dan non-manufaktur	Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas	Kemnakertrans	458,7
			Jumlah asosiasi profesi yang terlibat penyusunan SKKNI		40% asosiasi profesi			
			Jumlah penetapan SKKNI sesuai peta kompetensi industri		50% SKKNI			
			Jumlah penetapan SKKNI sesuai peta kompetensi non manufaktur termasuk jasa logistik		30% SKKNI			
			Jumlah ketetapan SKKNI yang diterapkan oleh lembaga pelatihan kerja		40% SKKNI			
Tersusunnya harmonisasi peraturan tentang sertifikasi kompetensi tenaga kerja	peraturan kerangka kualifikasi nasional	peraturan kerangka kualifikasi nasional	K)					

**BIDANG PEMBANGUNAN: PEREKONOMIAN**

**PRIORITAS: Daya Saing Ketenagakerjaan**

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil <i>outcomes</i> /output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
			Jumlah penetapan standar kompetensi dalam kerangka MRA		6 K)			
			Jumlah program pelatihan berbasis kompetensi	50	500 K)			
		Terlaksananya pelatihan berbasis kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	25.000	370.000 K)			
b.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, Sarana dan Pemberdayaan Kelembagaan Pelatihan dan Produktivitas	Diterapkannya tata kelola manajemen yang baik oleh lembaga pelatihan berbasis kompetensi	Tersusunnya standar baku lembaga pelatihan kerja berbasis kompetensi	Rancangan standar baku	Penetapan standar baku dan sosialisasi di 33 provinsi K)	Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas	Kemnakertrans	696,7
			Tersusunnya panduan tata pengelolaan dan pengembangan manajemen lembaga pelatihan	Pedoman manajemen lembaga pelatihan yang berlaku secara nasional	Pedoman manajemen lembaga pelatihan dan sosialisasi di 33 provinsi K)			
			Jumlah lembaga pelatihan kerja yang menerapkan pedoman tata pengelolaan dan pengembangan manajemen lembaga pelatihan		65 K)			
			Jumlah Pemerintah Daerah yang melaksanakan komitmen kesepakatan dan kesepakatan untuk pengembangan lembaga pelatihan berbasis kompetensi	40	65 K)			
			Jumlah BLK yang menyelenggarakan pelatihan berbasis kompetensi	11	43 K)			
			Jumlah BLK yang menerapkan ISO	3	20 K)			
			Jumlah BLK yang diakreditasi sebagai TUK	8	11 K)			
			Jumlah BLK yang ditetapkan sebagai BLU	4	11 K)			
			Jumlah lembaga pelatihan yang terakreditasi	40	120 K)			
			Jumlah BLK yang ditingkatkan kualitasnya	40	65 K)			
c.	Peningkatan Penyelenggaraan Pemagangan Dalam dan Luar Negeri	Terselenggaranya pelatihan melalui pemagangan bersertifikat kompetensi yang berbasis pengguna di dalam dan luar negeri	Jumlah peserta yang mengikuti pemagangan di perusahaan	10.000	50.000 K)	Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas	Kemnakertrans	247,6
			Jumlah peserta pemagangan yang mendapat sertifikat kompetensi	2.500	22.500 K)			

**BIDANG PEMBANGUNAN: PEREKONOMIAN**

**PRIORITAS: Daya Saing Ketenagakerjaan**

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil <i>outcomes</i> /output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
d.	Peningkatan Kompetensi Instruktur dan Tenaga Keahlian	Meningkatnya kompetensi instruktur dan tenaga keahliannya	Jumlah instruktur pelatihan berbasis kompetensi yang memiliki sertifikat	% instruktur berbasis kompetensi naik 30%	% instruktur berbasis kompetensi naik 60%	Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas	Kemnakertrans	209,5
			Jumlah manajer BLK berbasis kompetensi yang dilatih	20% manajer BLK	100% manajer BLK			
e.	Pelatihan Kewirausahaan	Terlaksananya pelatihan calon wirausaha baru	Jumlah calon wirausaha baru yang dilatih		40.000 K)	Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas	Kemnakertrans	417,5
f.	Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja dan perusahaan	Jumlah Tenaga kerja yang ditingkatkan produktivitasnya		47.500 K)	Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas	Kemnakertrans	163,4
			Jumlah kab/kota yang melaksanakan pengukuran produktivitas		110 kab/kota			
g.	Pengembangan SDM Industri *)	Meningkatnya pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku SDM industri	Jumlah SDM industrial yang mengikuti diklat	1.930	14.330	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Kementerian Perindustrian	Kemenperin	349,6
		Terwujudnya pendidikan untuk mendukung pengembangan kompetensi inti daerah	Jumlah penyelenggara pendidikan sesuai kompetensi inti daerah	1 unit	9 unit			
		Penguatan kelembagaan pelatihan dan pendidikan	Jumlah unit lembaga diklat yang ditingkatkan sarana dan prasarannya dan mengadopsi tata kelola manajemen yang baik	3 unit	6 unit			
h.	Pengembangan Pendidikan Vokasi Industri *)	Terciptanya SDM industri terampil yang siap kerja	Jumlah lulusan SDM terampil	1.100	7.150	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Kementerian Perindustrian	Kemenperin	718,0
		Terciptanya SDM industri madya sesuai dengan kebutuhan industri	Jumlah lulusan ahli madya	1.360	7.670			

**BIDANG PEMBANGUNAN: PEREKONOMIAN**

**PRIORITAS: Daya Saing Ketenagakerjaan**

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil <i>outcomes/output</i> yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)	
				2010	2014				
i.	Pembinaan Lindungan Lingkungan, Keselamatan Operasi dan Usaha Penunjang Bidang Migas *)	Pembinaan dan Pengawasan Keandalan Infrastruktur, K3, Keselamatan Operasi, dan Lingkungan, serta Usaha Penunjang dan Teknis serta Standardisasi	Jumlah Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKN) untuk kegiatan usaha migas	3	15 K)	Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi	Kem ESDM	29,9	
j.	Pembinaan Keselamatan dan Lindungan Lingkungan Ketenagalistrikan serta Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik *)	Meningkatnya pembinaan keselamatan dan lindungan lingkungan ketenagalistrikan	Jumlah standar kompetensi ketenagalistrikan	350	1.750 K)	Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi	Kem ESDM	21,6	
			Jumlah penetapan dan pemberlakuan standar kompetensi	3	15				
			Jumlah sertifikat kompetensi	560	3.100 K)				
			Jumlah Tenaga Teknik yang tersertifikasi	2.180	12.040 K)				
k.	Pembinaan Keteknikan Lindungan Lingkungan dan Usaha Penunjang Bidang Mineral, Batubara, Panas Bumi dan Air Tanah *)	Tersedianya standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang lindungan lingkungan, keselamatan pertambangan, standardisasi, teknik pertambangan serta usaha jasa pertambangan minerbapabum	Penyusunan rancangan SNI dan SKKNI bidang pertambangan Minerbapabum	5 SNI & 4 SKKNI	25 SNI & 20 K) SKKNI	Pembinaan dan Pengusahaan Mineral, Batubara, Panas Bumi dan Air Tanah	Kem ESDM	27,5	
			Tersedianya inspektur tambang di seluruh Indonesia dan peningkatan kemampuan teknis melalui diklat pusat maupun daerah	Jumlah kompetensi tenaga kerja industri pertambangan minerbapabum melalui sertifikasi	100				750 K)
			Meningkatnya kompetensi KTT dan penanggung jawab kegiatan di lapangan pada IUP (KP)	Jumlah SNI/SKKNI hasil kaji ulang	6				36 K)

**BIDANG PEMBANGUNAN: PEREKONOMIAN**

**PRIORITAS: Daya Saing Ketenagakerjaan**

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil <i>outcomes</i> /output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
l.	Pendidikan dan Pelatihan Minyak dan Gas Bumi *)	Terwujudnya sumberdaya manusia sub sektor minyak dan gas bumi yang memiliki kompetensi, profesional, berdaya saing tinggi, dan bermoral dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan	Jumlah penyelenggaraan diklat dalam setahun	139	718 K)	Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral	Kem ESDM	701,9
			Jumlah NSPK diklat yang ditetapkan dan diberlakukan	260	1.308 K)			
			Jumlah jenis diklat yang dibutuhkan	1	48 K)			
			Jumlah sarana diklat yang terakreditasi standar mutu	8	40 K)			
			Jumlah kegiatan pelayanan jasa sarana, keahlian, dan sertifikasi	27	149 K)			
m.	Pendidikan dan Pelatihan Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan *)	Terwujudnya sumberdaya manusia sub sektor ketenagalistrikan dan energi baru terbarukan yang memiliki kompetensi, profesional, berdaya saing tinggi, dan bermoral dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan	Jumlah penyelenggaraan diklat dalam setahun	36	203 K)	Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral	Kem ESDM	60,7
			Jumlah NSPK diklat yang ditetapkan dan diberlakukan	12	67 K)			
			Jumlah Lembaga Diklat Profesi/LDP yang terakreditasi sebagai penyelenggara Diklat Teknis	3	29 K)			
			Jumlah jenis diklat yang dibutuhkan	3	15 K)			
n.	Pendidikan dan Pelatihan Geologi *)	Terwujudnya sumberdaya manusia bidang kegeologian yang memiliki kompetensi, profesional, berdaya saing tinggi, dan bermoral dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan	Jumlah penyelenggaraan diklat dalam setahun	40	297 K)	Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral	Kem ESDM	198,9
			Jumlah NSPK diklat yang ditetapkan dan diberlakukan	110	641 K)			
			Jumlah kegiatan pelayanan jasa sarana, keahlian, dan sertifikasi	6	57 K)			
			Jumlah jenis diklat yang dibutuhkan	40	200 K)			
o.	Pendidikan dan Pelatihan Teknologi Mineral, Batubara, dan Panas Bumi *)	Terwujudnya sumberdaya manusia sub sektor mineral, batubara dan panas bumi yang memiliki kompetensi, profesional, berdaya saing tinggi, dan bermoral dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan	Jumlah penyelenggaraan diklat dalam setahun	119	595 K)	Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral	Kem ESDM	185,9

**BIDANG PEMBANGUNAN: PEREKONOMIAN**

**PRIORITAS: Daya Saing Ketenagakerjaan**

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil <i>outcomes</i> /output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
			Jumlah NSPK diklat yang ditetapkan dan diberlakukan	19	99 K)			
			Jumlah Lembaga Diklat Profesi/LDP yang terakreditasi sebagai penyelenggara Diklat Teknis	1	5 K)			
			Jumlah jenis diklat yang dibutuhkan	5	25 K)			
p.	Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah *)	Terwujudnya peningkatan kegiatan pelaksanaan dan pengembangan pendidikan dan pelatihan bidang tambang bawah tanah	Jumlah penyelenggaraan diklat dalam setahun	12	80 K)	Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral	Kem ESDM	54,0
			Jumlah NSPK diklat yang ditetapkan dan diberlakukan	13	86 K)			
			Jumlah Lembaga Diklat Profesi/LDP yang terakreditasi sebagai penyelenggara Diklat Teknis	1	15 K)			
			Jumlah jenis diklat yang dibutuhkan	2	10 K)			
			Jumlah sarana diklat yang terakreditasi standar mutu	-	10 K)			
			Jumlah kegiatan pelayanan jasa sarana, keahlian, dan sertifikasi		6 K)			
q.	Sertifikasi, Standarisasi dan Peningkatan Mutu SDM Kesehatan*)	Terselenggaranya sertifikasi, standarisasi dan peningkatan SDM kesehatan	Jumlah SDM kesehatan di fasilitas kesehatan yang telah ditingkatkan kemampuannya melalui pendidikan berkelanjutan	7.530	42.530 K)	Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan	Kemkes	2.316,0
			Persentase profesi tenaga kesehatan yang memiliki standar kompetensi	30	90			
r.	Pembinaan Keahlian dan Teknologi Konstruksi *)	Terciptanya inovasi dan penerapan teknologi/standar konstruksi karya anak bangsa	Jumlah Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) keahlian konstruksi yang dibina dan dikembangkan	10	50 K)	Pembinaan Konstruksi	Kemen PU	84,8
		Terciptanya SDM ahli konstruksi yang berkompentensi internasional	Jumlah tenaga ahli konstruksi yang dilatih dan bersertifikat	1.000	5.800 K)			
		Terciptanya SDM ahli konstruksi yang bersertifikat	Jumlah tenaga ahli konstruksi yang mengikuti program pemagangan di perguruan tinggi	200	2.700 K)			



**BIDANG PEMBANGUNAN: PEREKONOMIAN**

**PRIORITAS: Daya Saing Ketenagakerjaan**

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil <i>outcomes</i> /output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
			Jumlah paket kurikulum dan silabus pelatihan keahlian konstruksi yang disusun dan dikembangkan	5	40 K)			
			Jumlah calon pelatih tenaga ahli konstruksi yang dilatih dan bersertifikat	25	375 K)			
s.	Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi *)	Meningkatnya kapasitas SDM penyedia/pengguna dan masyarakat jasa konstruksi  Terciptanya SDM terampil konstruksi yang bersertifikat  Terciptanya balai pelatihan konstruksi yang sesuai standar internasional	Jumlah Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) keterampilan konstruksi yang dibina dan dikembangkan	30	150 K)	Pembinaan Konstruksi	Kemen PU	278,8
			Jumlah tenaga terampil tukang, teknisi peralatan dan perbengkelan jasa konstruksi yang dilatih dan bersertifikat	6.060	31.500 K)			
			Jumlah paket kurikulum dan silabus pelatihan manajemen teknik (teknisi) konstruksi dan pelatihan keterampilan konstruksi yang disusun dan dikembangkan	10	80 K)			
			Jumlah calon pelatih teknisi dan keterampilan konstruksi yang dilatih dan bersertifikat	175	875 K)			
			Jumlah balai peningkatan kemampuan dan kompetensi konstruksi yang direvitalisasi	1	10 K)			
t.	Penelitian dan Pengembangan Literasi dan Profesi*)	Mendorong tumbuhnya iklim penelitian dan pengembangan bidang komunikasi dan informatika serta terbangunnya sumber daya manusia unggul di bidang komunikasi dan informatika	Jumlah standar kompetensi kerja bidang kominfo		40 K)	Pengembangan dan Penelitian Profesi Kominfo	Kemenkominfo ***)	331,5
			Jumlah SDM Kominfo yang bersertifikat		4.600 K)			
u.	Pengembangan pelatihan berbasis kompetensi sektor kelautan dan perikanan *)	Tersusunnya standar kompetensi kerja nasional sektor kelautan dan perikanan yang sesuai dengan kebutuhan pengguna	Jumlah penetapan standar kompetensi sektor kelautan dan perikanan	1	9 K)	Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan	Kemen Kelautan dan Perikanan**)	

**BIDANG PEMBANGUNAN: PEREKONOMIAN**

**PRIORITAS: Daya Saing Ketenagakerjaan**

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil <i>outcomes</i> /output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
		Terlaksananya pelatihan berbasis kompetensi di lembaga pelatihan kelautan dan perikanan	Jumlah lembaga pelatihan kelautan dan perikanan yang menerapkan tata kelola manajemen yang baik	6	6			
			Jumlah lembaga pelatihan kelautan dan perikanan yang menyelenggarakan pelatihan berbasis kompetensi	6	6			
			Jumlah tempat uji kompetensi (TUK)	10	10			
			Jumlah pusat latihan mandiri kelautan dan perikanan (P2MKP) yang dikembangkan	10	50 K)			
			Jumlah penetapan standar penyelenggaraan pelatihan		32 K)			
			Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi dan tersertifikasi	4.000	20.000 K)			
v.	Pengembangan Sistem Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Profesi	Terbangunnya LSP, TUK, skema sertifikasi yang diakui industri nasional maupun internasional.  Terlayannya tenaga kerja agar bersertifikat kompetensi untuk memastikan dan memelihara	Jumlah LSP yang diberi lisensi	70 LSP	760 LSP K)	Pembangunan Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja	BNSP	203,3
		Jumlah tenaga kerja yang disertifikasi	20.000 orang	164.000 Orang K)				
		Jumlah standar kompetensi yang diverifikasi	70 standar	990 Standar K)				
		Jumlah asesor untuk pelaksanaan uji kompetensi yang ditingkatkan kapasitasnya	500 org	15.000 orang K)				
		Jumlah skema sertifikasi kompetensi yang disusun sesuai dengan permintaan industri	100 skema	1.180 K)				

**BIDANG PEMBANGUNAN: PEREKONOMIAN**

**PRIORITAS: Daya Saing Ketenagakerjaan**

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil <i>outcomes</i> /output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
w.	Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas layanan lembaga keuangan mikro (LKM) termasuk untuk akreditasi dan sertifikasi pelayanan LKM, termasuk LKM yang berbadan hukum koperasi *)	Meningkatnya kapasitas kelembagaan LKM Meningkatnya kapasitas dan kualitas layanan lembaga keuangan mikro (LKM)	Jumlah LKM yang terdaftar dan teakreditasi sesuai ketentuan hukum tentang LKM Jumlah pengelola LKM yang mengikuti pelatihan Jumlah SDM pengelola KSP/KJKS yang bersertifikat Jumlah LDP KJK dan TUK yang diperkuat Jumlah manajer/kepala cabang KJK yang diikutkan diklat dan sertifikasi kompetensi LKM	100	500 K) 4.000 K) 6.000 K) 8 unit K) 4.500 K)	Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Kemenegkop & UKM	22,5
x.	Pemantapan sistem pelatihan pertanian *)	Menumbuhkembangkan kelembagaan pelatihan dan kelembagaan petani Mengembangkan pelatihan non aparatur pertanian	Jumlah kelembagaan UPT Pusat dan P4S yang terakreditasi Jumlah non aparatur pertanian yang ditingkatkan kompetensinya melalui pelatihan	40	2.300 K) 113.004 K)	Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani	Kementan**)	
y.	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat *)	Tersedianya SDM transportasi darat yang berkompeten dan profesional	Jumlah peserta diklat penjenjangan dan teknis transportasi darat di STTD dan BP2TD	2.758	15.650 K)	Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan	Kemenhub	94,0
z.	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut *)	Tersedianya SDM transportasi laut yang berkompeten dan profesional	Jumlah peserta diklat penjenjangan dan teknis transportasi laut (STIP, BP3IP, BP2IP/SMK Pelayaran)	72.039	463.727 K)	Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan	Kemenhub	711,9
aa.	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Udara *)	Tersedianya SDM transportasi udara yang berkompeten dan profesional	Jumlah peserta diklat penjenjangan dan teknis transportasi udara di STPI, ATKP dan Balai/SMK Penerbangan	1.584	15.962 K)	Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan	Kemenhub	108,8
II.	<b>FOKUS: Peningkatan Fasilitas Dan Perlindungan Tenaga Kerja Dalam Rangka Mendukung Mobilitas Tenaga Kerja</b>							2.722,3

**BIDANG PEMBANGUNAN: PEREKONOMIAN**

**PRIORITAS: Daya Saing Ketenagakerjaan**

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil <i>outcomes</i> /output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
1.	Meningkatkan Pelayanan dan Perlindungan Pekerja Migran ke Luar Negeri	Kemudahan Pengurusan Dokumen Keberangkatan ke LN Penyelesaian Kasus Pekerja Migran	a. Jumlah TKI yang mendapat pelayanan dokumen sesuai standar b. Presentase TKI bermasalah yang mendapat penanganan sesuai prosedur c. Presentase kasus TKI bermasalah yang ditangani					
a.	Regulasi dan Sertifikasi Sistem Elektronik Jasa Aplikasi dan Konten*)	Terbangunnya layanan sistem informasi pasar kerja.	Adanya sistem informasi layanan pekerja migran	a. Electronic Form  b. Document Management c. Job Order Management d. Recruitment Management e. Selection Management	Sistem informasi layanan pekerja migran serta operasional dan pemeliharaan <sup>*)</sup>	Pengembangan Aplikasi Informatika	Kemenkominfo	10,0

**BIDANG PEMBANGUNAN: PEREKONOMIAN**

**PRIORITAS: Daya Saing Ketenagakerjaan**

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil <i>outcomes</i> /output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
				f. Security g. Interoperability h. Placement Management i. Campaign Managament j. Operasional				
			Jumlah instansi/lembaga yang terhubung dengan sistem	Kemnakertrans, BNP2TKI, Kemendagri, Kemenhukham, Kemenlu, Depdiknas, Kemenkominfo, Kemkes, , Daerah kantong TKI	Kemnakertrans, BNP2TKI, Kemendagri, Kemenhukham, Kemenlu, Depdiknas, Kemenkominfo, Kemkes, Daerah Kantong TKI, POLRI, Menko Perekonomian, Menko Kesra	Peningkatan Aplikasi dan Layanan Telematika	Kemenkominfo	

**BIDANG PEMBANGUNAN: PEREKONOMIAN**

**PRIORITAS: Daya Saing Ketenagakerjaan**

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil <i>outcomes</i> /output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
			Adanya infrastruktur SIM pekerja migran	a. Server b. Network c. Koneksi Internet	a. Server b. Network c. Koneksi Internet	Peningkatan Aplikasi dan Layanan Telematika	Kemkominfo	8,0
			Adanya <i>Business Process Reengineering</i>	Business Process Reengineering	Business Process Reengineering	Peningkatan Aplikasi dan Layanan Telematika	Kemkominfo	3,0
			Adanya regulasi berjalanya SIM pekerja migran	Regulasi Pendukung	Regulasi Pendukung	Peningkatan Aplikasi dan Layanan Telematika	Kemkominfo	3,0
b.	Pembinaan Administrasi Pendaftaran Penduduk *)	Tersedianya pelayanan dokumen kependudukan yang cepat, mudah, murah dan aman bagi pekerja migran (TKI)	Jumlah SKPLN (Surat Keterangan Pindah LN) yang diterbitkan sesuai dengan identitas calon pekerja migran	500 ribu pekerja migran	4,5 Juta Pekerja Migran <sup>K)</sup>	Penataan Administrasi Kependudukan	Kemendagri	4,6
			Jumlah pekerja migran yang terdaftar di Perwakilan RI/NIK calon pekerja migran	500 ribu pekerja migran	4,5 Juta Pekerja Migran <sup>K)</sup>			
c.	Pengelolaan Informasi Kependudukan *)	Tersedianya layanan informasi calon pekerja migran tingkat kecamatan di daerah asal calon pekerja migran	Jumlah pos pelayanan calon pekerja migran tingkat kecamatan di daerah asal calon pekerja migran	Persiapan	6.500 kecamatan <sup>K)</sup>	Penataan Administrasi Kependudukan	Kemendagri	16,8
			Jumlah calon pekerja migran yang tercatat di pos pelayanan	500 ribu pekerja migran	4,5 Juta Pekerja Migran <sup>K)</sup>			

**BIDANG PEMBANGUNAN: PEREKONOMIAN**

**PRIORITAS: Daya Saing Ketenagakerjaan**

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil <i>outcomes/output</i> yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
d.	Pelayanan Dokumen Perjalanan Visa dan Fasilitas Keimigrasian*)	Terselenggaranya akses pelayanan paspor yang mudah dan tidak duplikasi	Pelayanan keimigrasian yang transparan	Meningkatnya 20 % pelayanan keimigrasian yang transparan	Meningkatnya 100 % pelayanan keimigrasian yang transparan	Peningkatan Pelayanan dan Pengawasan Keimigrasian	Kemenhukham	49,1
			Persentase penerbitan visa yang memenuhi standar dengan data akurat	Meningkatnya 20% pelayanan penerbitan visa yang memenuhi standar dan akurat	Meningkatnya 100% pelayanan penerbitan visa yang memenuhi standar dan akurat			
			Persentase pemberian paspor TKI TIMUR Tengah yang memenuhi standar	Meningkatnya 20% pelayanan penerbitan paspor yang memenuhi standar	Meningkatnya 100% pelayanan penerbitan paspor yang memenuhi standar			
			Jumlah dan Jenis fasilitas keimigrasian yang diberikan memenuhi standar	Meningkatnya 20% pemberian jumlah dan jenis fasilitas keimigrasian yang memenuhi standar	Meningkatnya 100% pemberian jumlah dan jenis fasilitas keimigrasian yang memenuhi standar			
e.	Pembinaan penempatan dan perlindungan TKI luar negeri	Terintegrasinya pelayanan penempatan calon pekerja migran di daerah	Persentase calon pekerja migran yang terlayani dan tercatat pada dinas tenaga kerja provinsi dan kabupaten/kota	100% calon pekerja migran terlayani	100% calon pekerja migran terlayani	Penempatan dan Perluasan Kerja	Kemnakertrans	130,0

**BIDANG PEMBANGUNAN: PEREKONOMIAN**

**PRIORITAS: Daya Saing Ketenagakerjaan**

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil <i>outcomes</i> /output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
f.	Fasilitasi Pelayanan Dokumen Calon TKI	Meningkatnya kualitas pelayanan penempatan calon pekerja migran	Jumlah calon pekerja migran yang mendapat layanan dokumentasi sesuai standar	500 ribu pekerja migran	4,5 Juta Pekerja Migran <sup>K)</sup>	Peningkatan Fasilitasi Penempatan dan Perlindungan TKI	BNP2TKI	19,4
g.	Penyiapan pemberangkatan	Meningkatnya pemahaman hak dan kewajiban pekerja migran	Persentase jumlah calon pekerja migran yang ditempatkan sesuai dengan job order	100% pekerja migran ditempatkan sesuai dengan job order	100% pekerja migran ditempatkan sesuai dengan job order	Peningkatan Fasilitasi Penempatan dan Perlindungan TKI	BNP2TKI	528,0
			Jumlah calon pekerja migran yang terlayani KTKLN yang dikeluarkan oleh BNP2TKI sesuai dengan NIK	500 ribu pekerja migran	4,5 Juta Pekerja Migran <sup>K)</sup>	Peningkatan Fasilitasi Penempatan dan Perlindungan TKI	BNP2TKI	
			Jumlah pekerja migran yang memahami perlindungan dan prinsip-prinsip HAM	500 ribu pekerja migran	4,5 Juta Pekerja Migran <sup>K)</sup>			
h.	Pengamanan Keberangkatan	Pencegahan keberangkatan pekerja migran non prosedural	Persentase pekerja migran yang memiliki dokumen resmi bekerja ke luar negeri	100% pekerja migran bekerja dengan dokumen resmi	100% pekerja migran bekerja dengan dokumen resmi	Peningkatan Fasilitasi Penempatan dan Perlindungan TKI	BNP2TKI	15,0
i.	Koordinasi Kebijakan Penyusunan Skim Pembiayaan Kredit, Asuransi, dan Remitansi untuk Pekerja Migran*)	Meningkatnya koordinasi kebijakan penyusunan skim pembiayaan kredit, asuransi, dan remitansi untuk pekerja migran	Persentase rekomendasi kebijakan koordinasi pembiayaan kredit, asuransi, dan remitansi untuk pekerja migran yang diimplementasikan	60%	80%	Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian	Menko Perekonomian	1,9



**BIDANG PEMBANGUNAN: PEREKONOMIAN**

**PRIORITAS: Daya Saing Ketenagakerjaan**

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil <i>outcomes</i> /output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
j.	Pembinaan Penempatan dan Perlindungan TKI Luar Negeri	Tersedianya regulasi yang melindungi pekerja migran	Ratifikasi konvensi buruh migran dan keluarganya	1 Ratifikasi konvensi	Ratifikasi Konvensi Buruh migran	Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Kemnakertrans	490,8
			Amandemen UU 39/2004	Persiapan Amandemen UU	Amandemen UU			
			Persentase peraturan turunan amandemen UU		100% Peraturan turunan tersusun <sup>*)</sup>			
			Jumlah perjanjian penempatan MoU dengan negara tujuan	10 MoU	17 MoU <sup>*)</sup>			
			Persentase calon pekerja migran yang terlayani dan tercatat pada dinas tenaga kerja provinsi dan kabupaten	100% calon pekerja migran terlayani	100% calon pekerja migran terlayani			
		Tersedianya Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (Sisko TKLN)	14 Embarkasi	14 Embarkasi				
		Jumlah atase ketenagakerjaan yang memberikan perlindungan pekerja migran	13 Atase	13 Atase				

**BIDANG PEMBANGUNAN: PEREKONOMIAN**

**PRIORITAS: Daya Saing Ketenagakerjaan**

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil <i>outcomes/output</i> yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
k.	Peningkatan Perlindungan dan Pelayanan WNI/BHI di Luar Negeri*)	Tersedianya bantuan hukum bagi kepentingan pekerja migran	Jumlah pertemuan dengan negara sahabat terkait perlindungan WNI/BHI dengan negara lain	5 kali	35 kali <sup>K)</sup>	Peningkatan Kualitas Pelayanan Keprotokolan dan Kekonsuleran	Total Kemenlu Kemenlu Kemenlu Kemenlu Kemenlu	1.120,3
			Jumlah <i>Citizen Services</i> yang diperkuat	24 Citizen Services	24 Citizen Services			
			Jumlah WNI/TKI yang memperoleh fasilitas penampungan		14.998			
			Persentase TKI yang terkena masalah hukum mendapat bantuan hukum (advokasi dan <i>lawyer</i> ) bagi TKI		100%			
			Jumlah WNI/TKI yang dideportasi		24.020 <sup>K)</sup>			
l.	Pelayanan Advokasi dan Perlindungan Hukum	Terlaksananya pelayanan advokasi dan perlindungan hukum TKI	Kemudahan penyampaian pengaduan	-	1 <i>hotline services</i> 24 jam (bebas pulsa)	Peningkatan Fasilitas Penempatan dan Perlindungan TKI	BNP2TKI	135,0
			Jumlah pengaduan yang ditangani	100% pengaduan tertangani	100% pengaduan tertangani			

**BIDANG PEMBANGUNAN: PEREKONOMIAN**

**PRIORITAS: Daya Saing Ketenagakerjaan**

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil <i>outcomes</i> /output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
			Kualitas pelayanan <i>hotline service</i>		100% pekerja migran yang diproses melalui <i>hotline service</i> dalam waktu 24 jam			
			Jumlah orang yang berminat bekerja ke luar negeri yang mendapat advokasi		100% orang yang berminat menjadi pekerja migran teradvokasi			
			Persentase pekerja migran purna bermasalah yang direhabilitasi	60% pekerja migran bermasalah ditangani	100% pekerja migran bermasalah ditangani			
m.	Peningkatan Pemberdayaan TKI Purna	Meningkatnya kesadaran pengelolaan remitansi untuk kegiatan produktif	Jumlah pekerja calon migran/purna yang mendapat edukasi pengelolaan remitansi	2000 pekerja migran	17.000 pekerja migran	Peningkatan Fasilitas Penempatan dan Perlindungan TKI	BNP2TKI	8,6
n.	Peningkatan Pemulangan Pekerja Migran Bermasalah/TKIB*)	Terlayannya pemulangan pekerja migran bermasalah/TKIB yang dideportasi secara sehat dan bermartabat.	Terselenggaranya koordinasi pemulangan Pekerja migran/TKI B dari entry point ke daerah asal	Rapat koordinasi	Rapat koordinasi	Pengembangan Kebijakan Bidang Kesra	Menko Kesra	4,3
o.	Peningkatan Pelayanan Pemulangan Pekerja Migran Bermasalah/TKIB*)	Terlayannya pemulangan pekerja migran bermasalah/TKIB yang dideportasi sampai di daerah asal	Jumlah pemulangan pekerja migran bermasalah/TKIB yang dideportasi	100% TKIB dipulangkan ke daerah asal	100% TKIB dipulangkan ke daerah asal	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kemensos	123,3

**BIDANG PEMBANGUNAN: PEREKONOMIAN**

**PRIORITAS: Daya Saing Ketenagakerjaan**

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil <i>outcomes</i> /output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
p.	Peningkatan Ketenteraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat *)	Terselenggaranya ketenteraman dan ketertiban umum di lokasi debarkasi dan embarkasi	Kesiapsiagaan satgas <i>entry</i> /transit/daerah asal	100% TKIB deportasi terlayani	100% TKIB deportasi terlayani	Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Kemendagri	28,8
r.	Peningkatan Keamanan Pemulangan Pekerja Migran Bermasalah/TKIB*)	Tersedianya pengamanan pemulangan pekerja migran bermasalah	Terjaminnya keamanan pemulangan pekerja migran bermasalah/TKIB	100% kasus kriminal dan Polmas tertangani	100% kasus kriminal dan Polmas tertangani	Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban	POLRI	22,5
<b>III.</b>	<b>FOKUS: Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan dan Penguatan Hubungan Industrial</b>	<b>Meningkatkan daya saing dan posisi tawar tenaga kerja</b>	<b>Jumlah tenaga kerja yang kompeten</b>					<b>1.010,5</b>
a.	Penyempurnaan Peraturan Ketenagakerjaan	Tersusunnya peraturan yang dapat mendorong penciptaan kesempatan kerja dan memperkuat lembaga hubungan industrial	Tersusunnya Peraturan bidang HI yang meliputi pengaturan tentang kompensasi dan penetapan PHK, hubungan kerja (PKWT & <i>outsourcing</i> ), pengupahan, perlindungan pekerja, mogok kerja	Naskah akademik	Amandemen, <sup>K)</sup> UU, peraturan pelaksanaan, sosialisasi, konsolidasi	Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Kemnakertrans	182,0
		Peraturan tentang organisasi pekerja/buruh			Amandemen, <sup>K)</sup> UU, peraturan pelaksanaan, sosialisasi, konsolidasi			
		Peraturan tentang penyelesaian hubungan Industrial			Amandemen, <sup>K)</sup> UU, peraturan pelaksanaan, sosialisasi, konsolidasi			
		Terbangunnya kebijakan ketenagakerjaan pusat dengan kebijakan peraturan daerah secara sinergis	Harmonisasi kebijakan jaminan sosial		4 rancangan naskah <sup>K)</sup>			

**BIDANG PEMBANGUNAN: PEREKONOMIAN**

**PRIORITAS: Daya Saing Ketenagakerjaan**

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil <i>outcomes</i> /output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
			Selarasnya peraturan bidang HI	Inventarisasi Perda HI	Inventarisasi Perda HI, review & assesment, sosialisasi dan konsolidasi dengan Pemda <sup>K)</sup>			
b.	Pengelolaan Kelembagaan dan Pemasyarakatan Hubungan Industrial	Tercapainya kesepakatan dalam hubungan kerja	Mekanisme perundingan secara bipartit, pencatatan, keterwakilan dan verifikasi SP/SB	2 naskah	4 Naskah <sup>K)</sup>	Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Kemnakertrans	368,5
		Jumlah lembaga kerjasama (LKS) bipartit di perusahaan		naik 5%	% LKS bipartit di perusahaan naik 20% dari 2010			
		Jumlah perwakilan pekerja, SP/SB & pengusaha yang mendapat pendidikan teknik bernegosiasi		500	5.000 <sup>K)</sup>			
		Jumlah pembentukan LKS tripartit kabupaten/ kota		49	242 <sup>K)</sup>			
		Jumlah anggota LKS bipartit dan tripartit yang diberdayakan		160	1.800 <sup>K)</sup>			
		Jumlah SDM yang memahami HI		3.000	30.000 <sup>K)</sup>			
		Tersusunnya SKKNI ahli HI		Inventarisasi kompetensi	Inventarisasi kompetensi, pemetaan dan penerapan SKKNI AHI <sup>K)</sup>			

**BIDANG PEMBANGUNAN: PEREKONOMIAN**

**PRIORITAS: Daya Saing Ketenagakerjaan**

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil <i>outcomes</i> /output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
c.	Peningkatan Penerapan K3	Diterapkannya manajemen dan standar K3  Menurunnya jumlah kecelakaan dan penyakit akibat kerja	Jumlah perusahaan yang menerapkan manajemen K3	% perusahaan naik 10%	% perusahaan naik 50% dari 2010	Perlindungan Tenaga kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan	Kemnakertrans	460,0
			Jumlah tenaga pengawas K3 yang memenuhi standar kompetensi	20% tenaga pengawas K3 bersertifikat kompetensi	65% pengawas K3 bersertifikat kompetensi			
			Persentase tenaga pengawas yang ditingkatkan kapasitasnya		100% tenaga pengawas ditingkatkan kapasitasnya			
<b>TOTAL</b>								<b>12.425,9</b>

**KETERANGAN :**

<sup>K)</sup> Angka Kumulatif 5 tahun (2010-2014)

\*)Kegiatan ini masuk ke dalam Tabel 2.3 dan/atau Renstra K/L terkait

\*\*) Kegiatan ini sudah dianggarkan di Tabel 2.3 K/L terkait

\*\*\*) Alokasi anggaran juga digunakan untuk membiayai pemenuhan indikator lain dalam kegiatan ini

RENCANA TINDAK PRIORITAS BIDANG PEREKONOMIAN

BIDANG PEMBANGUNAN: PEREKONOMIAN

PRIORITAS : Pemberdayaan Koperasi dan UMKM

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN /LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
1.	FOKUS: Peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi koperasi dan UMKM	a. Terwujudnya pemberdayaan koperasi dan UMKM yang lebih koordinatif dan partisipatif, yang didukung peningkatan peran lembaga-lembaga swasta dan masyarakat.	a1. Sistem koordinasi dan konsultasi pemerintah, swasta dan masyarakat dalam penyelerasan upaya-upaya pemberdayaan koperasi dan UMKM dilembagakan.					49,3
			a2. Jumlah program dan kegiatan pemberdayaan koperasi dan UMKM di berbagai instansi pemerintah pusat dan daerah yang telah diselenggarakan dan dikoordinasikan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasinya.					
			a3. Jumlah program dan kegiatan pemberdayaan koperasi dan UMKM yang diselenggarakan lembaga-lembaga masyarakat secara mandiri dan/atau bekerja sama dengan pemerintah dan swasta.					
		b. Tersedianya regulasi/ kebijakan nasional dan daerah yang mendukung pemberdayaan koperasi dan UMKM.	Jumlah regulasi/kebijakan nasional dan daerah yang sudah diterbitkan/ disempurnakan untuk mendukung pemberdayaan koperasi dan UMKM.					

**BIDANG PEMBANGUNAN: PEREKONOMIAN**  
**PRIORITAS : Pemberdayaan Koperasi dan UMKM**

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN /LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
a.	Penataan peraturan perundang-undangan terkait perkoperasian, lembaga keuangan mikro (LKM), pendaftaran dan perijinan usaha, lokasi usaha, penggunaan produksi dalam negeri, dan penyebarluasan teknologi tepat guna, beserta ketentuan pelaksanaannya.	Peraturan perundang-undangan dan ketentuan pelaksanaan terkait koperasi, UMKM dan sistem pendukungnya yang diterbitkan/disempurnakan.	Jenis peraturan perundang-undangan yang terkait koperasi, UMKM dan sistem pendukungnya yang disepakati untuk disusun, diperbaiki, ditetapkan dan dijabarkan dalam ketentuan pelaksanaannya.	RUU Koperasi; Materi RUU LKM; RPP-UU No. 20/2008; PP-Pengganti PP 9/95; Perpres Lembaga Pengembangan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS); Perpres Lembaga APEX; Peraturan Teknis.	UU Koperasi; UU LKM; PP untuk UU No. 20/2008; PP-Pengganti PP 9/95; Perpres Lembaga Pengembangan dan Pengawasan KSP/ KJKS; Perpres Lembaga APEX; RPP-UU Koperasi; RPP-UU LKM; Peraturan Teknis.	Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Kemen. KUKM	39,5
b.	Peninjauan dan penghapusan berbagai pungutan dan regulasi yang merugikan koperasi dan UMKM, baik yang sektoral maupun spesifik daerah.	Terselenggaranya peninjauan pungutan yang merugikan koperasi dan UMKM, baik sektoral maupun spesifik daerah.	Laporan yang berisikan sejumlah rekomendasi penghapusan pungutan yang merugikan koperasi dan UMKM, baik sektoral maupun spesifik daerah.	40 Regulasi	200 Regulasi	Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Kemen. KUKM	7,5
c.	Pembentukan Forum Koordinasi Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.	Berfungsinya Forum Koordinasi Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.	Terbitnya landasan hukum.	Konsep struktur dan fungsi Forum Koordinasi Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Forum Koordinasi Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.	Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Kemen. KUKM	2,3



BIDANG PEMBANGUNAN: PEREKONOMIAN  
 PRIORITAS : Pemberdayaan Koperasi dan UMKM

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN /LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
2.	FOKUS: Pengembangan produk dan pemasaran bagi koperasi dan UMKM.	Berkembangnya produk koperasi dan UMKM yang berkualitas, inovatif dan kreatif untuk bersaing di	a. Jumlah produk dan jasa koperasi dan UMKM yang terstandarisasi. b. Omzet tahunan koperasi dan UMKM. c. Nilai pemasaran produk dan jasa koperasi dan UMKM yang berbasis inovasi dan kreativitas di pasar domestik dan mancanegara. d. Nilai ekspor produk yang dihasilkan koperasi dan UMKM. e. Tujuan pemasaran produk dan jasa koperasi dan UMKM.					566,2
a.	Penyediaan sistem insentif dan pembinaan bagi UMKM yang berbasis inovasi dan berorientasi ekspor.	a. Tersedianya sistem insentif bagi UMKM yang berbasis inovasi dan berorientasi ekspor.	Jenis dan jangkauan sistem insentif bagi UMKM yang berbasis inovasi dan berorientasi ekspor.	Insentif dukungan pemasaran, subsidi bunga dan peningkatan kapasitas SDM di 5 propinsi.	Insentif dukungan pemasaran, subsidi bunga dan peningkatan kapasitas SDM di 25 propinsi. <sup>ki)</sup>	Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Kemen. KUKM	5,0
				-	Pelatihan 800 orang terkait manajemen ekspor, ISO, mutu. <sup>ki)</sup>	Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Kemen. KUKM	4,0
		b. Tersedianya KUKM potensial mengikuti pameran di luar negeri.	Pengembangan/perluasan pasar ekspor produk KUKM melalui pameran di luar negeri.	140 KUKM	700 KUKM <sup>ki)</sup>	Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Kemen. KUKM	42,5
		c. Tersedianya KUKM dalam pengembangan desain produk.	Pengembangan daya saing pemasaran industri kreatif KUKM potensial/ ekspor.	160 KUKM	800 KUKM <sup>ki)</sup>	Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Kemen. KUKM	7,0
		d. Terwujudnya peningkatan kemampuan berinovasi UMKM dalam pengembangan desain produk UMKM dan pemasaran.	Peningkatan daya saing dan pemasaran produk kriya KUMKM.	100 KUKM	500 KUKM <sup>ki)</sup>	Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Kemen. KUKM	5,0
		e. Meningkatnya akses pasar produk KUMKM.	Meningkatnya daya saing dan identitas produk UMKM di bidang makanan dan minuman.	200 KUKM	1.000 KUKM <sup>ki)</sup>	Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Kemen. KUKM	7,0

**BIDANG PEMBANGUNAN: PEREKONOMIAN**  
**PRIORITAS : Pemberdayaan Koperasi dan UMKM**

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN /LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
		f. Berkembangnya komoditas unggulan daerah melalui pendekatan <i>One Village One Product</i> (OVOP) di beberapa propinsi.	Meningkatnya budidaya, pengolahan/industri, pemasaran dan sarana penunjang (modal, pendampingan, teknologi dll.).	4 lokasi	20 lokasi <sup>ki</sup>	Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Kemen. KUKM	10,0
b.	Pengembangan dan penguatan sentra-sentra produksi/ klaster usaha skala mikro dan kecil, terutama di daerah tertinggal dan terisolir	a. Meningkatkan peran koperasi dalam pengembangan dan pengelolaan pasar.	Pengembangan sarana pemasaran di daerah tertinggal/ perbatasan.	100 usaha mikro (UMi)	500 UMi <sup>ki</sup>	Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Kemen. KUKM	11,3
		b. Terfasilitasinya sarana usaha pedagang kaki lima (PKL) yang memiliki koperasi/ kelompok.	Tertatanya sarana usaha PKL dan terbangunnya sarana pemasaran produk KUMK.	150 UMi, 5 koperasi	2.150 UMi, 25 <sup>ki</sup> koperasi	Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Kemen. KUKM	34,2
		c. Meningkatkan kapasitas produksi sentra UMKM.	Bantuan sarana usaha produksi melalui koperasi.	60 koperasi	300 koperasi <sup>ki</sup>	Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Kemen. KUKM	175,0
		d. Tersedianya dukungan penguatan sentra-sentra produksi/ klaster usaha mikro dan kecil terutama di daerah tertinggal dan terisolir.	Jumlah usaha skala mikro dan kecil yang difasilitasi berupa bantuan usaha, pengenalan teknologi tepat guna, dan replikasi model teknologi tepat guna.	25 koperasi, 300 UMi, 180 UK	125 koperasi, <sup>ki</sup> 1.500 UMi, 900 UK	Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Kemen. KUKM	19,5
c.	Dukungan pengembangan kemitraan yang melibatkan koperasi dan UMKM dalam pengembangan produk-produk unggulan yang berbasis rantai nilai, subkontrak, alih teknologi, pemasaran/ ekspor, atau investasi	a. Terfasilitasinya pembentukan jaringan usaha melalui koperasi.	Pengembangan jaringan usaha melalui koperasi.	300 koperasi dan UMKM (KUMKM)	1.500 KUMKM <sup>ki</sup>	Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Kemen. KUKM	5,0
		b. Terfasilitasinya kemitraan pemasaran eko-produk KUMKM.	Pengembangan kemitraan eko-produk KUMKM	100 KUMKM	500 KUMKM <sup>ki</sup>	Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Kemen. KUKM	5,0
		c. Meningkatkan jumlah KUMKM yang bermitra di sektor pariwisata.	Kemitraan KUMKM di sektor pariwisata	300 KUMKM	1.500 KUMKM <sup>ki</sup>	Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Kemen. KUKM	6,4
		d. Terfasilitasinya kemitraan pola waralaba di kalangan KUMKM.	Kemitraan waralaba	100 KUMKM	500 KUMKM <sup>ki</sup>	Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Kemen. KUKM	3,0
		e. Terfasilitasinya kemitraan pemasaran produk energi biomassa KUMKM.	Kemitraan pemasaran produk energi biomassa	110 KUMKM	550 KUMKM <sup>ki</sup>	Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Kemen. KUKM	1,5
		f. Terfasilitasinya kemitraan KUMKM dengan BUMN.	Kemitraan KUMKM dengan BUMN	200 KUMKM	1.000 KUMKM <sup>ki</sup>	Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Kemen. KUKM	3,0
		g. Meningkatkan mutu dan desain kemasan produk KUKM.	Pengembangan kemasan produk KUKM	500 KUKM	2.500 KUMKM <sup>ki</sup>	Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Kemen. KUKM	11,3
		h. Terfasilitasinya kemitraan pola subkontrak di kalangan KUMKM.	Pengembangan kemitraan pola subkontrak	-	400 KUMKM <sup>ki</sup>	Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Kemen. KUKM	2,1

**BIDANG PEMBANGUNAN: PEREKONOMIAN**  
**PRIORITAS : Pemberdayaan Koperasi dan UMKM**

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN /LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
		i. Terwujudnya kemitraan yang saling menguntungkan antara koperasi dengan peritel modern.	Pengembangan jaringan dengan bisnis ritel modern (SME' sCo mart)	200 KUMKM	1.000 KUMKM <sup>ki</sup>	Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Kemen. KUKM	10,0
		j. Tercapainya peningkatan produktivitas UMKM.	Peningkatan produktivitas usaha mikro melalui klinik bisnis	150 Umi	750 KUMKM <sup>ki</sup>	Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Kemen. KUKM	13,8
d.	Dukungan pemasaran produk dan jasa koperasi dan UMKM melalui pengembangan dan penguatan kelembagaan, informasi pasar dan jaringan pemasaran baik domestik maupun ekspor.	a. Tersedianya <i>trading house</i> bagi KUMKM	Pengembangan <i>trading house</i> bagi KUMKM dalam rangka mengoptimalkan ekspansi pemasaran dan promosi produk KUMKM ke dalam maupun luar negeri, khususnya di Timur Tengah.	10 Unit	50 Unit <sup>ki</sup>	Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Kemen. KUKM	5,0
		b. Terpromosinya KUKM yang memiliki produk berkualitas.	Penyelenggaraan Smesco Festival	500 KUKM	2.500 KUKM <sup>ki</sup>	Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Kemen. KUKM	20,0
		c. Tersedianya dukungan pemasaran bagi usaha mikro.	Peningkatan akses produk usaha mikro melalui pasar rakyat	1.000 UMi	5.000 Umi <sup>ki</sup>	Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Kemen. KUKM	27,5
		d. Terwujudnya pengelolaan manajemen pasar tradisional oleh koperasi.	Pengembangan pengelolaan manajemen pasar tradisional	-	4 paket <sup>ki</sup>	Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Kemen. KUKM	1,2
		e. Pengembangan Pusat Promosi KUKM.	Pusat Promosi KUKM	5 lokasi	25 lokasi <sup>ki</sup>	Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Kemen. KUKM	2,5
		f. Peningkatan fungsi dan kualitas sarana dan prasarana pasar tradisional.	Pengembangan pasar tradisional melalui koperasi	200 UMi	1.000 UMi <sup>ki</sup>	Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Kemen. KUKM	20,0
		g. Tersebar informasi produk-produk KUMKM yang berkualitas.	Terselenggaranya pameran produk-produk KUMKM yang berkualitas	720 KUKM	3.600 KUMKM <sup>ki</sup>	Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Kemen. KUKM	59,8
		h. Meningkatnya akses pasar produk KUMKM melalui penyediaan sarana prasarana pemasaran.	Penyediaan fasilitas sarana prasarana pemasaran produk KUMKM	255 KUKM	1.275 KUKM <sup>ki</sup>	Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Kemen. KUKM	17,5
e.	Dukungan sistem insentif bagi penyedia jasa pendampingan dan konsultasi keuangan yang mendukung peningkatan akses koperasi dan UMKM kepada sumber-sumber pembiayaan.	Tersedianya jasa pendampingan dan konsultasi keuangan bagi koperasi dan UMKM.	Jumlah Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) yang ditingkatkan kapasitasnya.	200 orang KKMB	1.000 orang KKMB <sup>ki</sup>	Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Kemen. KUKM	2,7
			Jumlah koperasi dan UMKM yang sudah memanfaatkan jasa pendampingan dan konsultasi keuangan, baik yang disediakan pemerintah, swasta maupun masyarakat.	-	2.000 koperasi, <sup>ki</sup> 2.400 UMKM	Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Kemen. KUKM	4,0

BIDANG PEMBANGUNAN: PEREKONOMIAN  
 PRIORITAS : Pemberdayaan Koperasi dan UMKM

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN /LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
f.	Koordinasi Penataan Kelembagaan Pengembangan UKM berbasis inovasi	Meningkatnya kapasitas kewirausahaan UKM berbasis inovasi	Persentase rekomendasi hasil koordinasi kebijakan pengembangan UKM berbasis inovasi yang ditindaklanjuti.	70-75%	90-100%	Pogram Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian	Kemenko Perekonomian	24,7
3.	FOKUS: Peningkatan Daya Saing SDM Koperasi dan UMKM	a. Meningkatnya kapasitas dan produktivitas koperasi dan UMKM, yang didukung pengusaha, pengelola dan pekerja yang memiliki kewirausahaan dan kompetensi yang tinggi.	a. Tingkat produktivitas UMKM					196,9
			b. Tingkat kinerja koperasi					-
		b. Meningkatnya jumlah wirausaha baru yang didukung pola pengembangan kewirausahaan yang tersistem.	a. Jumlah wirausaha baru					-
			b. Sistem pengembangan kewirausahaan					-
a.	Penyusunan <i>blueprint</i> pengembangan kewirausahaan nasional yang didukung pembenahan pranata kelembagaan.	a. Tersusunnya <i>blueprint</i> pengembangan kewirausahaan nasional.	Dokumen <i>blueprint</i> pengembangan kewirausahaan nasional disusun.	Kajian <i>blueprint</i> pengembangan kewirausahaan nasional selesai.	Dokumen <sup>K)</sup> <i>blueprint</i> pengembangan kewirausahaan ditetapkan, dan pemasyarakatannya.	Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Kemen. KUKM	4,0
		b. Diperbaikinya pranata kelembagaan pengembangan kewirausahaan, terutama dalam aspek regulasi dan kurikulum pendidikan dan pelatihan kewirausahaan sesuai dengan <i>blueprint</i> pengembangan kewirausahaan.	a. Regulasi dan pranata kelembagaan pengembangan kewirausahaan nasional yang diselaraskan dengan dokumen <i>blueprint</i> .	-	Gerakan <sup>K)</sup> Kewirausahaan Nasional dan kelembagaan pendukung.	Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Kemen. KUKM	3,0

BIDANG PEMBANGUNAN: PEREKONOMIAN  
 PRIORITAS : Pemberdayaan Koperasi dan UMKM

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERI-AN /LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
			b. Kurikulum dan modul pendidikan dan pelatihan kewirausahaan khususnya untuk pengusaha skala mikro, kecil dan menengah, serta pengelola koperasi diperbaiki dan diterapkan.	-	Kurikulum dan modul diklat kewirausahaan bagi pengusaha skala mikro, kecil dan menengah, serta pengelola koperasi diterapkan. <sup>K)</sup>	Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Kemen. KUKM	5,0
b.	Dukungan pengembangan wirausaha baru melalui inkubator teknologi dan bisnis, serta pola-pola pengembangan lainnya sesuai <i>blueprint</i> pengembangan kewirausahaan.	a. Tersedianya dukungan pengembangan wirausaha baru melalui inkubator teknologi dan bisnis.	a. Jumlah wirausaha baru yang dikembangkan/difasilitasi melalui pola pengembangan wirausaha lainnya.	-	800 orang <sup>K)</sup>	Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Kemen. KUKM	16,0
			b. Jumlah tempat pendidikan keterampilan usaha (TPKU) yang dibangun.	200 unit	1.000 unit <sup>K)</sup>	Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Kemen. KUKM	100,0
			c. Jumlah calon wirausaha baru.	1.000 orang	5.000 orang <sup>K)</sup>	Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Kemen. KUKM	5,0
		b. Terfasilitasi wirausaha baru melalui pendampingan.	a. Kinerja kapasitas dan produktivitas koperasi dan wirausaha baru meningkat.	350 koperasi dan usaha mikro dan kecil (KUMK)	1.750 KUMK <sup>K)</sup>	Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Kemen. KUKM	21,5
		c. Meningkatnya kemampuan usaha UKM melalui inkubator	b. Jumlah UKM <i>tenant</i> binaan inkubator yang difasilitasi.	10 inkubator	10 inkubator <sup>K)</sup>	Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Kemen. KUKM	2,5

BIDANG PEMBANGUNAN: PEREKONOMIAN  
 PRIORITAS : Pemberdayaan Koperasi dan UMKM

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN /LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
c.	Peningkatan kompetensi pengusaha skala mikro, kecil dan menengah serta pengelola koperasi.	Meningkatnya kompetensi pengusaha skala mikro, kecil dan menengah serta pengelola koperasi.	a. Sistem standarisasi dan sertifikasi kompetensi sumber daya manusia (SDM) koperasi dan UMKM.	-	Sistem standarisasi dan sertifikasi kompetensi SDM koperasi dan UMKM dan pemasarakan nya. <sup>K)</sup>	Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Kemen. KUKM	4,0
			b. Jumlah pengusaha skala mikro, kecil dan menengah serta pengelola koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) keterampilan teknis dan manajerial.	450 pengusaha skala mikro, kecil dan menengah serta pengelola koperasi.	2.250 pengusaha skala mikro, kecil dan menengah serta pengelola koperasi. <sup>K)</sup>	Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Kemen. KUKM	2,5
			c. Jumlah modul diklat dan pendidikan <i>vocational</i>	5 modul	25 modul <sup>K)</sup>	Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Kemen. KUKM	2,5
			d. Jumlah peserta yg mengikuti diklat <i>vocational</i>	1.000 orang	5.000 orang <sup>K)</sup>	Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Kemen. KUKM	25,0
d.	Revitalisasi dan pengembangan lembaga pendidikan dan pelatihan koperasi dan UMKM.	Terlaksananya revitalisasi dan pengembangan lembaga pendidikan dan pelatihan koperasi dan UMKM.	a. Pedoman revitalisasi lembaga diklat KUMKM	-	Pedoman standarisasi diklat KUMKM. <sup>K)</sup>	Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Kemen. KUKM	2,9
			b. Jumlah tenaga pengelola dan instruktur pada lembaga diklat yang dilatih.	120 orang	600 orang <sup>K)</sup>	Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Kemen. KUKM	3,0
4.	FOKUS: Penguatan Kelembagaan Koperasi	a. Berkembangnya praktek berkoperasi yang sesuai prinsip dan asas koperasi.	Jumlah koperasi aktif dan jumlah koperasi aktif yang melaksanakan rapat anggota tahunan (RAT).					70,0

BIDANG PEMBANGUNAN: PEREKONOMIAN  
 PRIORITAS : Pemberdayaan Koperasi dan UMKM

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERI-AN /LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
		b. Meningkatnya peran koperasi dalam memfasilitasi perkembangan usaha anggota dan peningkatan kesejahteraan anggota.	a. Jumlah koperasi yang beranggotakan/ didirikan kelompok usaha mikro, kecil dan menengah.					-
			b. Jumlah koperasi yang sudah memiliki jaringan usaha sesuai kegiatan ekonomi produktif anggotanya.					-
			c. Jumlah koperasi yang sudah memiliki kapasitas sebagai lembaga penyedia jasa pengembangan usaha bagi anggotanya.					-
a.	Penyuluhan perkoperasian kepada masyarakat luas yang disertai dengan pemasyarakatan contoh-contoh koperasi sukses yang dikelola sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi yang baik.	Terselenggaranya penyuluhan perkoperasian yang menjangkau masyarakat luas dan disertai dengan contoh terbaik praktik berkoperasi.	a. Landasan hukum bagi penyelenggaraan penyuluhan perkoperasian.	Konsep landasan hukum tentang jabatan fungsional penyuluh perkoperasian	Landasan hukum tentang jabatan fungsional penyuluh perkoperasian <sup>ki</sup>	Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Kemen. KUKM	2,0
			b. Materi dan media penyuluhan	1 paket	5 paket <sup>ki</sup>	Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Kemen. KUKM	5,0
			c. Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam penyuluhan perkoperasian.	120 orang di 4 propinsi	600 orang di 20 propinsi <sup>ki</sup>	Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Kemen. KUKM	2,9
			d. Jumlah jabatan fungsional penyuluh koperasi	-	2.400 orang <sup>ki</sup>	Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Kemen. KUKM	4,0
			e. Jumlah peserta pembinaan dan pengembangan SDM koperasi.	-	2.400 orang <sup>ki</sup>	Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Kemen. KUKM	2,0
b.	Peningkatan kualitas administrasi dan pengawasan pemberian badan hukum koperasi.	Kualitas administrasi dan pengawasan pemberian badan hukum koperasi semakin meningkat.	Efisiensi proses administrasi pemberian badan hukum koperasi.	30 % koperasi sudah tertata administrasi badan hukumnya	70 % koperasi sudah tertata administrasi badan hukumnya	Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Kemen. KUKM	5,5

BIDANG PEMBANGUNAN: PEREKONOMIAN  
 PRIORITAS : Pemberdayaan Koperasi dan UMKM

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN /LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
c.	Penyediaan insentif dan fasilitasi dalam rangka pengembangan usaha dan jaringan kerja sama usaha antar koperasi, termasuk pengembangan koperasi sekunder.	Tersedianya fasilitasi bagi pengembangan jaringan kerja sama usaha antar koperasi.	Jangkauan fasilitasi bagi pengembangan kerja sama usaha antar koperasi.	5 model kerja sama antara koperasi sekunder dengan anggotanya; 5 fasilitasi pengembangan usaha koperasi	25 model kerja sama antara koperasi sekunder dengan anggotanya; 25 fasilitasi pengembangan usaha koperasi <sup>K)</sup>	Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Kemen. KUKM	3,7
d.	Peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi.	Meningkatnya kapasitas dan kinerja kelembagaan koperasi.	a. Jumlah koperasi dan peserta bimbingan teknis perkoperasian.	5 kebijakan dan 200 KUMKM	25 kebijakan dan 1.000 KUMKM <sup>K)</sup>	Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Kemen. KUKM	25,0
			b. Jumlah pengembangan organisasi kantor cabang koperasi simpan pinjam (KSP)/ unit simpan pinjam (USP).	15 kantor cabang	75 kantor cabang <sup>K)</sup>	Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Kemen. KUKM	1,3
			c. Jumlah koperasi yang menerapkan prinsip akuntabilitas dan pengendalian koperasi.	1.500 koperasi	7.500 koperasi <sup>K)</sup>	Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Kemen. KUKM	3,5
			d. Jumlah koperasi yang diperingkat.	1.000 koperasi, 75 koperasi berprestasi	5.000 koperasi, 375 koperasi berprestasi <sup>K)</sup>	Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Kemen. KUKM	10,4
e.	Peningkatan kemampuan pembina koperasi.	Meningkatnya kemampuan pembina koperasi.	a. Materi kurikulum dan diklat pembina koperasi.	Penyempurnaan kurikulum diklat pembina koperasi.	Kurikulum diklat pembina koperasi dan penerapannya. <sup>K)</sup>	Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Kemen. KUKM	2,9
			b. Jumlah pembina koperasi yang mengikuti diklat.	-	2.400 orang <sup>K)</sup>	Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Kemen. KUKM	2,0
<b>TOTAL</b>								<b>882,4</b>

KETERANGAN :  
<sup>K)</sup> Angka Kumulatif 5 tahun (2010-2014)



RENCANA TINDAK PRIORITAS BIDANG PEREKONOMIAN

BIDANG PEMBANGUNAN: PEREKONOMIAN

PRIORITAS : Jaminan Sosial

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
1.	FOKUS: Penataan Kelembagaan Jaminan Sosial	Peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia	Angka kemiskinan, angka HDI			1. Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Kemenko Kesra, Kemenkes, Kemenakertrans, Kemenkeu, Bappenas, Kemdagri, Kemenhan, MenPAN	892,5
a.	Penataan Kelembagaan Jaminan Sosial Nasional	1. Tersedianya NIK bagi setiap peserta jaminan sosial	NIK sudah terlaksana bagi seluruh masyarakat.	30%	100% <sup>k)</sup>	Program Pengembangan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kemenko Kesra/Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Kemdagri	50,1
		2. Tersusunnya perangkat hukum SJSN:	1. UU BPJS	100%	100%		Kemenko Kesra/DJSN, Kemenkes, Kemenakertrans, Kemenhan, KEMEN PAN dan RB, Kemenkeu	
			2. PP PBI					
			3. PP Jaminan Kesehatan					
			4. PP Kepesertaan					
			PP Pensiun; Jaminan Kecelakaan Kerja; Jaminan Hari Tua; dan Jaminan Kematian	80%	100%		Kemenko Kesra/DJSN, Kemenkeu	
			PP Tata Pengelolaan dan Pengembangan Dana Jaminan Sosial	30%	100%		Kemenko Kesra/DJSN, Kemenkeu	
		3. Tersusunnya berbagai studi dan kajian di bidang jaminan sosial untuk memperkuat pelaksanaan SJSN.	Unit Permodelan Keuangan SJSN	100%	100%		Kemenko Kesra/DJSN, Kemenkeu	
			Studi Lansia, Pensiun, Jamkesmas, Pekerja Informal		100%		Kemenko Kesra/DJSN, Bappenas	

BIDANG PEMBANGUNAN: PEREKONOMIAN

PRIORITAS : Jaminan Sosial

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
			Studi Keterkaitan Pembiayaan SJSN dengan Aturan Perdagangan, Ketenagakerjaan, Perpajakan dan Investasi.		100%		Kemenko Kesra/DJSN, Kemenkeu	
		4. Terharmonisasinya regulasi di bidang jaminan sosial;	Harmonisasi dengan UU Dana Pensiun		100%		Kemenko Kesra/DJSN, Kemenkeu	
			Harmonisasi dengan UU Jamsostek		100%		Kemenko Kesra/DJSN, Kemenakertrans	
		5. Terselenggaranya jaminan sosial berbasis asuransi bagi seluruh pekerja formal maupun informal dengan prioritas utama asuransi kesehatan; dan terciptanya sistem, prosedur, serta struktur organisasi penyelenggara jaminan sosial yang efisien dan efektif	1. Rencana Transisi BPJS 2. Rencana detail organisasi dan anggaran pengendali BPJS 3. Memulai pendaftaran pemberi kerja dan pekerja 4. Rencana Pendataan dan Jumlah Kontribusi 5. Merancang sosialisasi pada masyarakat 6. Membangun strategi pengembangan fasilitas kesehatan 7. Negosiasi dengan penyedia layanan kesehatan dan menyusun skema monitoringnya Implementasi model manajemen tabungan hari tua pada BPJS	100%	100%		Kemenko Kesra/DJSN, Kemenkeu, Kemenkes	
		6. Meningkatnya jangkauan/cakupan jaminan sosial terhadap pekerja miskin (yang tidak mampu memberikan kontribusi iuran);	Jumlah peserta jaminan sosial dari masyarakat miskin				Kemenko Kesra/DJSN, Kemenakertrans	
		7. Meningkatnya kualitas manfaat jaminan sosial bagi pekerja;	Kualitas manfaat jaminan sosial.				Kemenko Kesra/DJSN, Kemenakertrans	
b.	Pembinaan, Pengembangan Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	Terumuskannya kebijakan pembiayaan dan jaminan kesehatan	Persentase penduduk (termasuk seluruh penduduk miskin) yang memiliki jaminan kesehatan	59%	100%	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Kemenkes	842,4
<b>TOTAL</b>								<b>892,5</b>

KETERANGAN :

<sup>K)</sup> Angka Kumulatif 5 tahun (2010-2014)